

PROFIL GENDER DAN ANAK

KOTA YOGYAKARTA 2013

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA 2013**

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

@ Ninik Sri Rahayu, dkk, 2014

Profil Gender dan Anak Kota Yogyakarta 2012

1. Pendidikan 2. Gender 3. Sosial

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA 2012

Penulis:

Ninik Sri Rahayu, Abdul Rohman,
Amin Nurohmah, Ika Paska Himawati

Penyunting/Editor:

Masduki

Tata Letak & Rancang Sampul

Zarkoni

Penerbit:

Smartania Publishing
Jl. Monumen Yogya Kembali 90 Yogyakarta 55284
Telp. /Fax. (0274) 517887
E-mail: mucommyk@yahoo.com

Diterbitkan Atas Kerja Sama:

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP)
kota Yogyakarta Bekerjasama dengan Pusat Studi Gender (PSG)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Cetakan I, Januari 2014

xiv + 238; 14.5 X 21 Cm

ISBN : 978-602-14066-6-3

PENGANTAR PENULIS

Penyusunan data pilah gender di Kota Yogyakarta merupakan salah satu langkah nyata mendorong penguatan isu gender dan anak dalam berbagai bidang pembangunan. Ketersediaan data yang terinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur, termasuk data dan statistik anak sangat krusial dalam proses pengarusutamaan gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak.

PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Sedangkan PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Terimakasih atas kerjasama yang baik antara Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) kota Yogyakarta dan Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sehingga buku Profil Gender dan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat tersusun. Harapan kami buku ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 28 Desember 2013
Tim Penyusun

PENGANTAR EDITOR

Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan birokrasi pemerintah kota Yogyakarta memerlukan dukungan lintas sektor. Dukungan dapat berupa tiga bentuk. Pertama, kebijakan teknis implementasi UU, Perpres dan Perda yang telah ditetapkan sejak sepuluh tahun yang lalu. Kedua, aplikasi model kepemimpinan berkarakter progresif di semua tingkatan sejak walikota hingga kepala desa/kelurahan. Ketiga, monitoring dan evaluasi terstruktur yang ditunjukkan melalui ketersediaan data berperspektif gender. Indikator ada tidaknya dukungan pertama dan kedua, akan diketahui pada ada tidaknya data. Pengalaman dalam pengumpulan data lapangan dan review yang dilakukan editor untuk buku ini menyimpulkan, masih minimnya ketersediaan data yang akurat, *up to date* dan berperspektif gender.

Dukungan lintas sektor diperlukan karena isu gender berbasis kepada relasi sumberdaya manusia yang menginduk pada semua instansi, bukan semata program kerja sektoral. Praktek buruk yang terjadi pada instansi tertentu di lingkungan Pemkot akan berdampak pada instansi lain secara vertikal dan horizontal, karena intensitas interaksi SDM yang tinggi. Gender adalah isu HAM universal yang memerlukan perhatian semua pihak. Pertanyaannya, apakah semua instansi terkait di lingkungan Pemkot Yogyakarta telah memberi perhatian? melek isu gender? Buku profil gender ini mencoba menguraikannya.

Model kepemimpinan yang progresif jadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan PUG dalam birokrasi. Menghadapi kultur birokrasi yang akut, terjangkit virus *male dominated culture* dan kuatnya feodalisme memerlukan terapi kepemimpinan yang tidak normatif, terpaku kepada teks aturan main yang sudah kadaluarsa atau sekedar mengikuti pola birokrasi lama. PUG memerlukan *role model* kepemimpinan baru, yang *out of the box*. Untuk mengetahuinya dibutuhkan audit kepemimpinan sebagai bagian penting dari monitoring dan evaluasi kinerja oleh walikota. Buku ini dapat menjadi modal awal ke arah itu.

Buku ini lahir dari riset berbasis data sekunder: data statistik yang diperoleh dari semua instansi/SKPD terkait dilingkungan Pemkot Yogyakarta. Kelebihan data statistik adalah pada angka-angka yang terukur, kelemahannya ada pada masa berlaku data yang pendek, satu tahun atau bahkan kurang. Uraian data dalam buku ini cenderung bergerak diantara data lama (sebelum 2012) dan data baru (2012-2013). Sebagai buku pertama yang mengkompilasi data, tentu banyak kandungan informasi yang bisa dipelajari untuk pengambilan keputusan strategis. Tapi, lemahnya *updating* data untuk tahun 2012-2013 menjadi peringatan dini semua instansi agar melakukan pembenahan pada tim database internal. Masih banyak persoalan teknis yang harus diatasi, termasuk membiasakan membuat data pilah gender.

Buku ini disusun mengikuti logika laporan tahunan institusi publik dan disajikan berbasis isu strategis pada setiap pergantian antar bab. Pembaca yang berminat mempelajari seluruh isu publik dapat membuka dari awal hingga akhir, sedangkan pembaca yang hanya memerlukan pendalaman isu tertentu, dapat langsung ke bab terkait. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafis, kemudian diuraikan secara deskriptif. Sudah pasti, kami memerlukan masukan, kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang, terutama agar semakin *user friendly* bagi para pengambil keputusan di Pemkot Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Desember 2013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	iii
PENGANTAR EDITOR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	9
1.3 Hasil Yang Diharapkan	10
1.4 Pelaksana	10
BAB II. LANDASAN TEORI	13
2.1 Landasan Hukum Penyelenggaran Data Gender dan Anak	13
2.2 Konsep dan Pengertian Gender	15
2.3 Gender dan Ketidakadilan	16
2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)	21
2.5 Permasalahan Gender	23
2.6 Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	28
2.7 Strategi dan Prinsip PUHA	28
2.8 Permasalahan Anak	30
2.9 Metode Penelitian	31
BAB III. PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN	37
3.1 Angka Harapan Hidup	37
3.2 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	39
3.3 Cakupan Pertolongan Persalinan	42
3.4 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas	43
3.5 Imunisasi atau Vaksinasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil	45
3.6 Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	46
3.7 Penderita HIV-AIDS	47

3.8	Keluarga Berencana	51
3.9	Usia Perkawinan	56
3.10	Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	59
BAB IV. PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN		65
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	66
4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	69
4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA	70
4.4	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA	72
4.5	Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	75
4.6	Jumlah Peserta Paket A,B dan C	76
4.7	Jumlah Guru (Negeri/Swasta)	78
4.8	Sertifikasi Guru (Negeri/Swasta)	81
4.9	Jumlah Penerima Beasiswa SLTP dan SLTA	82
4.10	Jumlah Siswa Berprestasi	84
BAB V . PROFIL GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN		91
5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	94
5.2	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta	94
5.3	Pekerja di Sektor Formal	96
5.4	Pekerja di Sektor Informal	97
5.5	Data Angkatan Kerja	100
5.6	Keanggotaan Koperasi	102
5.7	Penduduk Kota Yogyakarta Berusia >15 Tahun Yang Bekerja Sebagai Pekerja Keluarga Tidak Dibayar	104
5.8	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial	106
5.9a	Pekerja Menurut Lapangan Usaha	107
5.9b	Pekerja Menurut Status Pekerjaan	109
5.9c	Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan	110

BAB VI. PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	115
6.1 Politik dan Pengambilan Keputusan	115
6.2 Perempuan di Lembaga Eksekutif	115
6.3 Perempuan di Lembaga Legislatif	122
6.4 Perempuan di Lembaga Yudikatif	126
BAB VII. PROFIL GENDER BIDANG SOSIAL BUDAYA	133
7.1 Jumlah Lanjut Usia Terlantar	133
7.2 Jumlah Pengungsi Akibat Konflik dan Bencana	135
7.3 Perceraian	137
BAB VIII. DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	141
8.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	141
8.1.1 Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Korban	143
8.1.2 Kekerasan Menurut Usia	145
8.1.3 Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan	146
8.1.4 Kekerasan Menurut Tempat Kejadian	148
8.1.5 Jenis Pelayanan yang Diberikan	149
8.2 Trafficking (Perdagangan Manusia)	152
8.2.1 Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	153
8.2.2 Korban Perdagangan Orang Menurut Tingkat Pendidikan	155
8.2.3 Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan	157
BAB IX. DATA TUMBUH KEMBANG, KELANGSUNGAN HIDUP, DAN PERLINDUNGAN ANAK	161
9.1 Anak Jalanan	161
9.2 Anak Terlantar	163
9.3 Anak Balita Terlantar	165
9.4 Anak Yang Berumur Dibawah 18 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran	167
9.5 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Ditampung Di Panti Asuhan	169

9.6	Fasilitas kesehatan Yang Melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	169
9.7	Jumlah Tenaga Medis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	170
9.8	Jumlah SLB Negeri Dan Swasta	171
9.9	Jumlah Guru Negeri dan Swasta di SLB	172
9.10	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Kelompok Umur	173
9.11	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Tingkat Pendidikan	174
9.12	Jumlah Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum	175
9.13	Jumlah Lembaga dan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta	177
BAB X. DATA BIDANG KELEMBAGAAN PUG DAN PUHA		181
10.1	Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	182
10.1.1	Bidang Kesehatan	182
10.1.2	Bidang Ekonomi	184
10.1.3	Focal Point Gender	187
10.2	Kelembagaan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)	196
BAB XI. KESIMPULAN		209
BAB XII. REKOMENDASI		225
DAFTAR PUSTAKA		237

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Pemberdayaan Gender	6
Tabel 1.2	Persentase Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas	7
Tabel 3.1	Angka Harapan Hidup	37
Tabel 3.2	Jumlah dan Usia Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas	40
Tabel 3.3	Cakupan Pertolongan Persalinan	42
Tabel 3.4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ke Puskesmas	44
Tabel 3.5	Imunisasi atau Vaksinasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil	45
Tabel 3.6	Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)	47
Tabel 3.7	Penderita HIV/AIDS	49
Tabel 3.9	Usia Perkawinan Pertama	57
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan	67
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	69
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA	71
Tabel 4.4	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP dan SLTA	74
Tabel 4.5	Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	76
Tabel 4.6.1	Jumlah Peserta Paket A, B, dan C	77
Tabel 4.6.2	Jumlah Kelulusan Paket A, B, dan C	78
Tabel 4.6.3	Jumlah Lembaga Kesetaraan dan PAUD	79
Tabel 4.7	Jumlah Guru (Negeri/Swasta)	79
Tabel 4.8.1	Sertifikasi guru (Negeri/Swasta)	81
Tabel 4.8.2	Persentase Sertifikasi Guru (Negeri/Swasta) 5 Tahun Terakhir	82
Tabel 4.9	Jumlah penerima Beasiswa SLTP dan SLTA	83
Tabel 4.10.1	Jumlah Siswa Berprestasi Bidang Akademik	84

Tabel 4.10.2	Jumlah Siswa Berprestasi Bidang Seni	85
Tabel 4.10.3	Jumlah Siswa Berprestasi Bidang Olahraga	86
Tabel 5.1.1	Partisipasi Angkatan Kerja	92
Tabel 5.1.2	Prosentase Angkatan Kerja dan Disparitas Gender	94
Tabel 5.2	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Pekerjaan	95
Tabel 5.3	Jumlah Angkatan Kerja	100
Tabel 5.4	Keanggotaan Koperasi	102
Tabel 5.5	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial	106
Tabel 5.6a	Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha	107
Tabel 5.6b	Jumlah Pekerja Menurut Status Pekerjaan	109
Tabel 5.6c	Jumlah Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan	100
Tabel 6.2.1	Jumlah Kepala Desa Menurut Jenis Kelamin	114
Tabel 6.2.2	Jumlah Pejabat Perempuan Eselon III,IV dan Fungsional Umum	118
Tabel 6.2.3	Tren PNS Perempuan di Semua Golongan Per Kecamatan	121
Tabel 6.3	Persentase Perempuan di Partai	126
Tabel 6.4.1	Jenis Jabatan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin	128
Tabel 6.4.2	Jenis Kepangkatan Berdasarkan Jenis Kelamin	130
Tabel 6.4.3	Pejabat di Kepolisian Berdasarkan Wilayah	130
Tabel 7.1	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	134
Tabel 7.2	Jumlah Pengungsi Akibat Konflik dan Bencana	134
Tabel 7.3	Jumlah Kasus Perceraian Yang Diputus di Pengadilan Negeri	138
Tabel 8.1.2	Kekerasan Berdasarkan Usia	145
Tabel 8.1.3	Jenis Kekerasan	147
Tabel 8.2.1	Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin	154

Tabel 8.2.2	Korban Perdagangan Orang menurut tingkat Pendidikan	155
Tabel 8.2.3	Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan	157
Tabel 9.1	Jumlah Anak Jalanan Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kota Yogyakarta	163
Tabel 9.2	Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta	165
Tabel 9.3.	Jumlah Anak Balita Terlantar Menurut Jenis Kelamin Di Kota Yogyakarta	166
Tabel 9.4.	Prosentase Anak Yang Berumur Di bawah 18 Tahun menurut Kepemilikan Akta Lahir, Jenis Kelamin dan Kecamatan	168
Tabel 9.5	Jumlah panti Asuhan dan Anak Yang Ditampung di Panti	169
Tabel 9.6	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Melayani ABK	170
Tabel 9.7	Jumlah Tenaga Medis ABK di Kota Yogyakarta	171
Tabel 9.8	Jumlah SLB Negeri dan Swasta di Kota Yogyakarta	172
Tabel 9.9	Jumlah Guru Negeri dan Swasta di SLB	173
Tabel 9.10	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2012	174
Tabel 9.11	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Pendidikan	175
Tabel 9.12	Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan hukum Menurut jenis Tindak Pidana yang dilakukan	176
Tabel 9.13	Jumlah lembaga dan Peserta PAUD menurut Kecamatan	177
Tabel 10.1	Kecamatan Sayang Ibu	183

Tabel 10.2	Desa Prima	184
Tabel 10.3	P2WKSS	186
Tabel 10.4	Forum Perlindungan Perempuan	187
Tabel 10.5	Daftar Nama Lembaga Pusat Studi Wanita/Gender	188
Tabel 10.6	Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat Yang Peduli Perempuan dan Anak	190
Tabel 10.7	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender	191
Tabel 10.8	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan Tentang Perlindungan Perempuan	195
Tabel 10.9	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	197
Tabel 10.10	Panti Asuhan Anak Yatim Piatu	207

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Jumlah Akseptor KB	52
Grafik 3.2	Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	60
Grafik 4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan	68
Grafik 4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang pendidikan SD, SLTP, SLTA	72
Grafik 4.3	Jumlah Guru Negeri dan Swasta	81
Grafik 5.1	Jumlah Pekerja di Sektor Formal	96
Grafik 5.2	Jumlah Pekerja di Sektor Informal	97
Grafik 5.3	Penduduk Kota Yogyakarta Berusia >15 Tahun Yang Bekerja Sebagai Pekerja Keluarga Tidak Dibayar	104
Grafik 6.1	Total Perempuan di Semua Level Jabatan Per Kecamatan	118
Grafik 6.2	Jumlah Pejabat Perempuan Eselon III, IV, dan Fungsional Umum	119
Grafik 6.3	Total PNS Perempuan di Semua Golongan Per Kecamatan	120
Grafik 6.4	Tren PNS Perempuan di Semua Golongan Per Kecamatan	121
Grafik 6.5	Perempuan Di Legislatif	122
Grafik 6.6	Perbandingan Jumlah Caleg perempuan dan Laki-laki	123
Grafik 6.7	Persentase Caleg Perempuan Per Kecamatan	124
Grafik 6.8	Jumlah Caleg Laki-laki dan Perempuan pada 2009 dan 2014	125
Grafik 6.9	Jumlah Hakim dan Pejabat Hakim	127
Grafik 6.10	Tren kenaikan dan penurunan jumlah laki-laki dan perempuan	127
Grafik 8.1	Data Kekerasan Menurut Jenis Kelamin	144
Grafik 8.2	Kekerasan Menurut Tempat Kejadian	148
Grafik 8.3	Jenis Pelayanan yang Diberikan	151
Grafik 10.1	Lembaga yang Bergerak Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak	189



BAB I. PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengintegrasian gender dan hak-hak anak dalam pembangunan sangat krusial. Pembangunan yang disokong oleh pembayar pajak harus bersifat inklusif, hasil pembangunan harus dapat diakses, dimanfaatkan, dan dikontrol oleh penerima dan penyokong agenda pembangunan. Pembangunan juga harus mampu meningkatkan kapabilitas sasaran pembangunan dalam setiap lini kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Hasil pembangunan telah membaik, tetapi ketimpangan gender masih terjadi di sejumlah lini. Ketimpangan gender masih menjadi persoalan serius di Indonesia, ini terlihat dari rendahnya capaian GDI tahun 2012. Sebagai gambaran, pada tahun 2012 peringkat Indonesia dalam *Gender-related Development Index* (GDI) menempati urutan 44 negara. Bukan hanya itu, anak-anak sebagai penerus pembangunan di masa depan juga masih belum mendapatkan eksternalitas positif jangka panjang dari pembangunan. Ini dapat dilihat dari hal yang sangat terukur seperti angka akses dan partisipasi sekolah untuk anak perempuan, angka kematian ibu dan bayi, angka pernikahan

dini, angka partisipasi perempuan dalam politik, jumlah kebijakan-kebijakan yang berpihak dan/atau tidak merugikan perempuan dan anak, dan lain sebagainya.

Meskipun ruh kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak anak secara eksplisit ada di dalam Tujuan Pembangunan Milenium, tidak setiap negara berkomitmen secara penuh untuk mewujudkannya. Selain alasan finansial, ketersediaan sumberdaya dan kapabilitas untuk melakukannya masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencapai sasaran milenium pada 2015 mendatang adalah menyusun data yang berbasis gender dan di Indonesia hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 6/2009.

Ketersediaan data gender dan anak memberikan keuntungan pada pemerintah daerah untuk: a) Mengidentifikasi perbedaan kondisi/kemajuan/perubahan keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda, b) Melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat baik perempuan dan laki-laki berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan dampak, c) Menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi semua yang bekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender, d) Menyediakan input untuk melakukan analisis gender, e) Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemashalatan perempuan dan laki-laki di masa depan.

Penyusunan profil gender juga sangat esensial dalam fase evaluasi pembangunan. Pada tahun 2010, Pusat Studi Gender UII pernah melakukan evaluasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul dan hasil evaluasi tersebut tidak seperti yang diharapkan karena tidak cukupnya data terpilah yang mendukung perencanaan dan sasaran program pembangunan. Analisis gender yang dilakukan pun masih sebatas pembedaan untuk laki-laki dan perempuan belum sampai bagaimanakah dampak pembangunan terhadap penerima manfaat.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indonesia adalah 59.20, lebih rendah dibandingkan dengan IPG Yogyakarta, 65.20. Dengan kata lain, IPG Yogyakarta lebih baik dibandingkan rata-rata Indonesia, atau Yogyakarta relatif berdaya gender. Berdasarkan wilayah, tampak Kota Yogyakarta memiliki IPG tertinggi dibandingkan yang lain dan sekitar empat poin lebih tinggi dari IPG Yogyakarta. Perbandingan IPM 5 wilayah pada tahun 1999 dan 2002 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1: Indeks Pemberdayaan Gender

Kabupaten/ Kota	Tahun	
	1999	2002
Kulon Progo	64.50	62.90
Bantul	62.10	61.50
Gunung Kidul	63.50	59.80
Sleman	67.50	67.50
Kota Yogyakarta	69.40	68.80

Sumber : BPS-BAPENAS-UNDP, Indonesia Human Development Report, 2004

Ketimpangan sebagaimana disinyalir pada bagian awal latar belakang ini tampak mewarnai proses pembangunan di Kota Yogyakarta, lihat tabel berikut :

**Tabel 1.2 Persentase Melek Huruf Penduduk
Umur 15 Tahun ke Atas**

Kabupaten/ Kota	Tahun					
	2003		2004		2005	
	L	P	L	P	L	P
Kulon Progo	92.70	78.28	94.02	79.27	94.74	79.72
Bantul	90.33	78.93	91.40	80.15	93.19	81.15
Gunung Kidul	82.08	65.42	82.53	65.14	83.05	66.93
Sleman	94.80	86.91	95.27	84.13	94.94	86.25
Kota Yogyakarta	98.98	95.56	98.52	95.05	98.68	94.11

Sumber: BPS-BAPENAS-UNDP, Indonesia Human Development Report, 2004

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketimpangan laki-laki dan perempuan melek huruf masih ada. Pada 2003 dan 2004 ketimpangan di Kota Yogyakarta pada kisaran 3 tetapi setahun kemudian perbedaan laki-laki dan perempuan menjadi 4. Tren yang relatif sama juga terjadi di kawasan lain. Pembangunan di sektor pendidikan belum sepenuhnya memberi manfaat pada perempuan.

Isu gender, oleh karena itu, perlu direspon untuk mengatasi adanya disparitas partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan. Selain itu, ini juga untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pada keberlanjutan pembangunan suatu wilayah secara

keseluruhan. Dengan memiliki profil gender, pembuat kebijakan dapat memahami perbedaan ekonomi, sosial, dan politik yang ada antara dua jenis kelamin yang memiliki peran gender tidak sama, memastikan bahwa pemahaman tersebut didasarkan pada fakta dan data, dan melakukan pembangunan yang mengejawantahkan situasi spesifik dan analisis gender dalam setiap fase.

Komitmen dan upaya pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus mendorong keadilan dan kesetaraan gender tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh data pilah gender. Penyusunan data pilah gender merupakan salah satu langkah riil untuk mendorong penguatan isu gender dan anak dalam berbagai bidang pembangunan sekaligus sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Kota Yogyakarta. Ketersediaan data menurut jenis kelamin dan kelompok umur, termasuk data dan statistik anak sangat krusial dalam proses pengarusutamaan gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak.

PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Sedangkan PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program,

kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1.2 Tujuan

Penyusunan profil gender dan anak di Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk :

1. Menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dan perlindungan anak yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perancangan program kegiatan di Kota Yogyakarta.
2. Melakukan analisis terhadap indikator-indikator penting untuk menemukan isu-isu prioritas dalam pembangunan di Kota Yogyakarta, khususnya data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, statistik gender dan isu-isu prioritas terkait pembangunan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

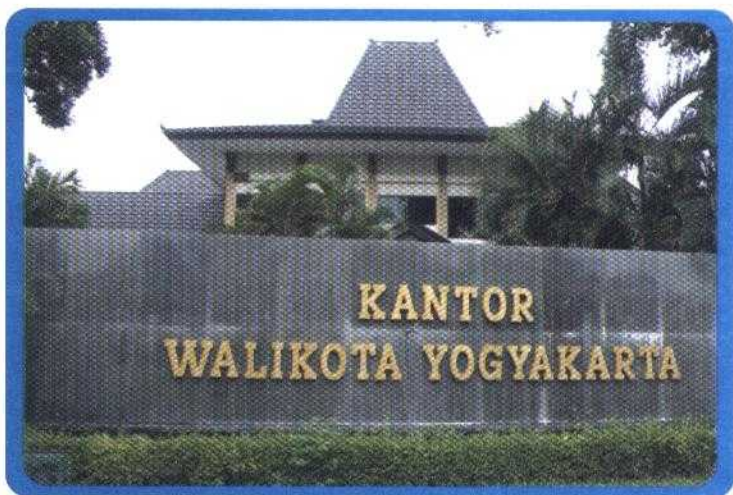
1.3 Hasil Yang diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. 1 (satu) laporan profil gender dan Anak di wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. 200 (Dua ratus) eksemplar “Buku Profil Gender dan Anak Kota Yogyakarta tahun 2012.”
3. 1 (satu) paket rekomendasi kebijakan tertulis untuk pengambil keputusan.

1.4 Pelaksana

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) kota Yogyakarta Bekerjasama dengan Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



BAB II. LANDASAN TEORI

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

Landasan hukum yang menjadi rujukan penyusunan profil gender dan anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia).
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005/2025.
4. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No 6. Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2.2 Konsep dan Pengertian Gender

Pengertian gender dan sex seringkali dipersepsikan sama. Kedua istilah tersebut memang mengacu pada perbedaan jenis kelamin, tetapi istilah sex terkait pada komponen biologis sedangkan gender tidak demikian. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan keterbatasan tertentu berdasarkan fakta biologisnya masing-masing. Perbedaan biologis merupakan kodrat yang tidak bisa dipertukarkan. Sebaliknya, gender merupakan hasil konstruksi secara sosial budaya yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seseorang yang ia pelajari sehingga gender kerap disebut sebagai kodrat budaya (Sadli, 2004).

Sifat-sifat feminin bagi perempuan dan maskulin bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya, melalui apa yang diajarkan orang tua, guru ataupun tokoh masyarakat dimana seseorang tersebut tinggal. Artinya gender seseorang diperoleh melalui suatu proses panjang sebagai hasil belajar sejak anak-anak. Akibatnya, gender juga merupakan hasil interaksi faktor internal dan eksternal (apa yang dia pelajari dari lingkungan termasuk harapan lingkungan karena dia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan). Gender yang berupa sifat dan perilaku khasnya sebagai perempuan dan laki-laki masih diperkuat dengan mitos, *stereotype* dan pembagian kerja secara seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin.

2.3 Gender dan Ketidakadilan

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi soal jika tidak melahirkan ketidakadilan. Sayangnya, perbedaan gender kerap kali meminggirkan jenis kelamin tertentu yang berdampak terhadap munculnya ketidakadilan, yang terjadi di hampir semua masyarakat. Bahkan, tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga dimana perempuan menikmati kesetaraan dan keadilan secara utuh baik dalam bidang hukum, maupun bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik masih terus mengakar dalam budaya masyarakat. Meskipun sesungguhnya ketidaksetaraan merugikan semua orang, namun perempuan dan anak perempuan adalah kelompok yang menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Manifestasi dari ketidakadilan gender tersebut tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran peran kaum perempuan. Di kebanyakan negara berkembang proses peminggiran ini erat kaitannya dengan proses kemiskinan. Sebagai contoh banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan

pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki.

Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin seperti perantaraan dan sabit kini telah digantikan oleh mesin yang dikendalikan oleh laki-laki. Kenyataan ini diperkuat dengan pendapat Raharjo (1995) yang menyatakan bahwa perempuan tidak diberi kesempatan terhadap akses teknik-teknik pertanian modern, karena adanya semacam kepercayaan bahwa perempuan tidak dapat menangani mesin-mesin modern. Hal ini ternyata berimplikasi jauh, yaitu segala hal yang ditangani perempuan menjadi kurang canggih, kurang prestisius dan juga menjadi kurang penting. Beberapa contoh lain dari bentuk-bentuk marginalisasi terhadap perempuan tampak dalam berbagai hal misalnya usaha konveksi yang lebih suka menyerap tenaga perempuan, pembantu rumah tangga lebih didominasi perempuan, dan banyaknya pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti “guru taman kanak-kanak” atau “sekretaris” dan “perawat”.

2. Subordinasi

Subordinasi adalah sebuah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih superior dibanding jenis kelamin lainnya. Meletakkan perempuan ke dalam lapisan kedua ke dalam struktur keluarga, masyarakat dan negara sudah sedemikian lama menyebar. Kenyataan ini masih

diperkuat dan bahkan seringkali mendapat pembenaran baik secara teologis melalui tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki. Fakta ini dapat dilihat dari masih eksisnya nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.

Gambaran berikutnya juga tampak dalam rumah tangga miskin pedesaan, dimana prioritas untuk megenyam pendidikan lebih banyak diberikan pada laki-laki. Perempuan tidak dibekali dengan pendidikan yang memadai karena adanya persepsi bahwa setinggi apapun pendidikan perempuan nantinya akan kembali ke dalam lingkup domestik yang secara sosial telah dikonstruksi untuknya.

3. Pandangan Streotype

Streotype adalah pelabelan atau citra baku negatif yang diberikan masyarakat kepada jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Contohnya pendidikan dan jurusan pendidikan yang dianggap pantas untuk perempuan adalah yang bersifat melayani orang seperti keperawatan, guru, sekertaris dan sebagainya. Pelabelan mengenai standar kepantasan ini tentu

saja paralel dengan berlakunya pandangan bahwa perempuan adalah tokoh yang memiliki peran utama atas pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Peran ini tidak hanya melekat dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara.

Streotype lainnya tampak ketika seorang laki-laki marah maka akan dianggap sebagai suatu bentuk ketegasan, tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung akan dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Perbedaan standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki ini jelas lebih banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Bentuk Streotype lainya adalah label yang disandang perempuan sebagai “ibu rumah tangga” yang ternyata juga menciptakan kerugian tersendiri, sehingga ketika perempuan bekerja, seberat apapun itu, selalu dianggap sebagai kegiatan untuk “membantu suami”, karena laki-laki adalah pencari nakah utama (*breadwinner*).

4. Kekerasan

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai: “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Kata kekerasan sendiri merupakan terjemahan dari kata *violence*, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.

Kekerasan terhadap perempuan bisa dilakukan oleh individu, institusi maupun negara. Dalam rumah tangga, kerap kali perempuan dianggap sebagai pihak yang tidak produktif sehingga harus tunduk kepada laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Sementara dalam wilayah publik (dunia kerja), perempuan senantiasa dianggap sebagai tenaga kerja yang tidak produktif dan tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang berkaitan dengan hak-hak kodrati yang melekat pada diri perempuan seperti terpotongnya waktu bekerja untuk cuti haid, hamil, dan melahirkan. Pada tingkat negara, kekerasan terjadi ketika perempuan sering dipersalahkan publik manakala cara berpakaian dan cara berdandan dianggap “menggoda” laki-laki. Kenyataan ini secara jelas mengindikasikan bahwa ketidakadilan gender menyebabkan perempuan mendapatkan kekerasan berlapis-lapis baik oleh individu, kelompok, maupun negara.

5. Beban Ganda

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender menurut Inpres RI No. 9 Tahun 2000 adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan, pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat.

Kesetaraan dan keadilan gender perlu ditegakkan sebab perempuan lebih banyak dirugikan dengan adanya perbedaan dan pembakuan peran gender dalam masyarakat. Ketimpangan gender yang merugikan perempuan langsung

atau tidak adalah kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketertinggalan perempuan mengakibatkan mereka tidak dapat berperan dan menjadi mitra sejajar laki-laki sehingga hubungan kedua pihak menjadi timpang. Pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengatasi persoalan ini. Dengan melakukan strategi pengarusutamaan gender diharapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan responsif gender karena telah mengakomodasi pemenuhan kebutuhan yang berbeda antar kelompok masyarakat dan antara laki-laki dan perempuan. Secara yuridis, pelaksanaan pengarusutamaan gender bersandar pada ketentuan perundangan antara lain :

1. UU No 7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW.
2. UU No 39/1999 tentang HAM.
3. UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
4. UU No 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009.
6. Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
7. Kepmendagri No 132/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah.

2.5 Permasalahan Gender

Terdapat 12 area kritis persoalan gender yang menjadi landasan untuk menangani permasalahan gender. Area kritis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gender dan Kemiskinan.

Membicarakan kemiskinan sesungguhnya selalu membicarakan perempuan, karena begitu lekatnya kemiskinan dalam kehidupan perempuan. Kemiskinan dan pemiskinan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, tidak hanya faktor sosial budaya dan politik namun juga faktor ketidakadilan sistem ekonomi yang menyebabkan akses dan kesempatan terhadap berbagai sumber daya produktif, seperti modal, kredit, tanah, informasi dan pasar antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak setara.

2. Gender dan Pendidikan.

Posisi subordinat perempuan tercermin dengan jelas dalam bidang pendidikan. Dua persoalan serius dalam area ini adalah masih besarnya jumlah perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta huruf dan rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan. Partisipasi perempuan dalam jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) sudah tergolong tinggi. Akan tetapi, partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA dan Universitas) masih tertinggal dibanding laki-laki. Artinya,

sebagian besar perempuan belum mengenyam pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.

3. Gender dan Kesehatan.

Kematian ibu masih merupakan persoalan serius di negara berkembang termasuk Indonesia dimana Angka Kematian Ibu (AKI) menempati posisi teratas di ASEAN, yakni 307 per 100.000 kelahiran hidup. Faktor pemicu buruknya kesehatan reproduksi antara lain adalah kondisi sosioekonomi dan pendidikan yang rendah, dan budaya yang tidak mendukung (budaya yang tidak adil gender).

4. Kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender adalah segala tindakan kekerasan yang berbasis gender yang ditujukan pada perempuan, yang mengakibatkan atau mungkin akan mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk tindakan mengancam, memaksa atau membatasi kebebasan, baik yang terjadi di ranah publik maupun domestik. Meskipun semenjak tahun 2004 Indonesia telah memiliki UU KDRT namun angka kekerasan terhadap perempuan tidak pernah surut. Kekerasan terhadap perempuan dilatari oleh faktor-faktor berikut : Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan,

anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

5. Perempuan, Politik dan Pengambilan Keputusan.

Ketertinggalan perempuan dalam bidang politik tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Pemilu tahun 2004 yang dinilai paling demokratis ternyata hanya mampu mendudukkan 11% wakil perempuan. Minimnya jumlah perempuan yang duduk dalam posisi sebagai pengambil keputusan menjadikan isu-isu perempuan tidak terangkat ke dalam wilayah publik dan menjadi isu sekunder.

6. Perempuan dan Ekonomi.

Di sektor ekonomi, perempuan lebih banyak terserap dalam bidang kerja informal yang rentan dengan eksploitasi dan kekerasan. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan peluang untuk memasuki bursa kerja di sektor formal menjadi terbatas.

7. Hak Asasi Perempuan.

Pengakuan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia masih membutuhkan perjuangan panjang untuk merealisasikannya. Segala bentuk diskriminasi dan peminggiran terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Sehingga, isu ketidakadilan gender adalah isu hak asasi manusia. Setiap perempuan memiliki hak yang melekat pada dirinya yakni hak dasar, hak

sosial politik, ekonomi, mendapatkan perlindungan hukum, serta hak reproduksi perempuan.

8. Media Dan Gender.

Kedatipun representasi perempuan dalam media menunjukkan peningkatan, namun akses terhadap tingkat pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Ungkapan "*Women still hitting glass ceiling in media*" dengan sempurna menggambarkan betapa tidak mudah bagi perempuan untuk menduduki level manajemen dalam industri media. Minimnya keterwakilan perempuan berimplikasi serius terhadap jaranganya isu perempuan terangkat ke permukaan. Kalaupun ada, media cenderung memberi ruang bagi hal-hal yang bersifat tradisional atau urusan perempuan seperti rumah tangga, mode, problem keluarga yang pada akhirnya mengukuhkan berbagai streotype yang merugikan mereka.

9. Gender dan Lingkungan Hidup.

Perempuan sejauh ini jarang diberikan ruang dan peran dalam pengelolaan lingkungan. Perempuan juga sering tidak dilibatkan dalam sebagian besar kebijakan dan kontrol terhadap sumber daya alam yang menopang kehidupan mereka. Padahal target capaian Millenium *Development Goals* (MDG's) pada tahun 2015, mensyaratkan pentingnya keterlibatan perempuan pada semua tujuan yang akan di capai. Mengikutsertakan perempuan dalam pengelolaan lingkungan adalah agar perempuan memahami betapa

pentingnya lingkungan sehingga perempuan akan menjaga, memelihara lingkungan, dengan demikian perempuan akan mempunyai andil besar untuk menjaga, memelihara lingkungan dengan baik dan juga dapat menjaga kebersihan lingkungan dari lingkup yang paling kecil.

10. Anak Perempuan.

Permasalahan yang dihadapi anak perempuan adalah masih seringnya terjadi pengabaian akan hak mereka, pada umumnya di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi.

11. Perempuan dan Konflik Bersenjata.

Persoalan yang dihadapi perempuan dalam konflik bersenjata antara lain adalah rentannya perlindungan terhadap mereka sehingga mereka rawan kekerasan dan eksploitasi secara seksual.

12. Kelembagaan Nasional untuk Memajukan Perempuan.

Permasalahan yang dihadapi di bidang ini adalah belum optimalnya kapasitas SDM, penyediaan data terpilah, kecukupan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, serta belum cukupnya penggunaan instrumen analisis yang responsif gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan berbagai institusi yang menangani pemberdayaan perempuan dan anak.

2.6 Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA mensyaratkan adanya integrasi keseluruhan Konvensi Hak Anak (KHA) dan isu-isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan nasional. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif anak. PUHA dijadikan batasan dan pijakan dalam menyusun suatu kebijakan serta program pembangunan. Paradigma PUHA adalah menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2.7 Strategi dan Prinsip PUHA

Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah PUHA telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, adalah melalui:

1. Identifikasi dan koordinasi antara lembaga dan aparatur pada semua tingkat pemerintahan.
2. Analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya.
3. Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi.
4. Mengkaji ulang secara komprehensif semua kebijakan publik, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata laksana pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan memperhatikan:
 - a. Dimensi isi hukum (*content of law*), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
 - b. Dimensi tata laksana hukum (*structure of law*), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, lapas, birokrasi pemerintah, partai politik, dan lain-lain, serta aparat pelaksanaannya, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain.
 - c. Dimensi kultur hukum (*culture of law*), meliputi persepsi, pemahaman, dan sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan masyarakat luas

terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum tersebut.

2.8 Permasalahan Anak

Terdapat beberapa persoalan krusial terkait dengan perlindungan anak terutama di dalam ranah hukum, pendidikan, kesehatan, HIV/AIDS, perlindungan, dan partisipasi.

- 1. Anak dan Hukum.** Masih adanya peraturan perundang-undangan yang belum ramah terhadap anak dan adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, menjadi persoalan sendiri dalam penanganan perlindungan anak. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pengaturan jangka waktu pembebasan biaya akta kelahiran.
- 2. Anak dan Pendidikan.** Permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan antara lain belum maksimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), terutama bagi keluarga miskin, masyarakat terpencil dan masyarakat adat terpencil (suku terasing), serta masih rendahnya akses dan cakupan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di pedesaan.
- 3. Anak dan Kesehatan.** Tingginya angka kematian bayi dan balita, anak penderita gizi buruk, anak penderita HIV/AIDS, serta korban merokok dan NAPZA pada anak

dan remaja merupakan persoalan serius dalam penanganan perlindungan anak.

- 4. Anak dan Perlindungan.** Tindak kekerasan dan perlakuan tidak ramah terhadap anak yang terjadi baik di rumah, sekolah, masyarakat termasuk di media merupakan gambaran riil persoalan yang dihadapi dalam konteks perlindungan anak. Selain itu, kasus perdagangan anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang kian marak juga menyisakan persoalan tersendiri. Bahkan secara lebih ekstrim, perlindungan anak juga kerap dibenturkan dengan masalah masih banyaknya anak yang dipaksa orangtuanya untuk bekerja.

2.9 Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori yakni :

- a. *Data terpilah menurut jenis kelamin:* Data ini terdiri dari data umum yang meliputi jumlah penduduk, jumlah kepala rumah tangga, jumlah penduduk menurut kelompok umur, IPM, IPG dan IDG. Penyajian data secara lebih spesifik mencakup bidang kesehatan, pendidikan, bidang SDA dan Lingkungan Hidup, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, dan kekerasan.

- b. *Data Anak* : Data ini meliputi kekerasan terhadap anak, jumlah anak jalanan, anak terlantar, kepemilikan akta kelahiran anak, jumlah panti asuhan dan anak di panti asuhan, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, kelangsungan hidup anak, dan tumbuh kembang anak
- c. *Data kelembagaan*: data ini terdiri dari kelembagaan pengarusutamaan gender (di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, PUG, perlindungan perempuan dan Anak, pengarusutamaan hak anak, kelembagaan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak).

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen, registrasi, pencatatan, hasil survey maupun penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber, antara lain : BPS, SKPD, dan lain sebagainya. Penelitian dan instansi lain yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dalam penanganan dan penyediaan data yang ada hubungannya dengan gender dan anak selama periode 2008-2012.

3. Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua pendekatan yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu:

- a. Studi Pustaka (*desk study*), antara lain berupa :

- 1) Pengumpulan data yang terkait dengan gender, anak dan perempuan dari SKPD terkait, serta data dari organisasi non pemerintah.
 - 2) Penyebaran format matrik data untuk diisi oleh dinas/SKPD yang terkait dengan bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, hukum, dan sosial budaya.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD) : FGD dilakukan dengan SKPD/dinas terkait untuk melakukan cross-check data, diskusi, presentasi dan curah gagasan sebagai upaya melakukan analisis kevalidan data, temuan masalah, dan strategi program.

4. Metode Analisis

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Selain itu juga dilakukan analisis pengukuran disparitas gender dengan menggunakan cara : "Menghitung *selisih antara kinerja pembangunan pada perempuan dikurangi laki-laki*". Hasil dari selisih tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kriteria :

- a. Jika disparitas gendernya = 0, artinya tidak terjadi kesenjangan gender.
- b. Jika disparitas gendernya < 0, berarti terjadi kesenjangan gender, dimana perempuan berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan laki-laki.

- c. Jika disparitas gendernya >0 , berarti terjadi kesenjangan gender, dimana laki-laki berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan perempuan.



BAB III. PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN

BAB III

PROFIL GENDER

BIDANG KESEHATAN

3.1. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator derajat kesehatan suatu bangsa adalah Angka harapan hidup (*Life Expetancy*). *Life Expetancy* juga sekaligus merupakan salah satu penilaian tingkat kesehatan suatu negara yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) disebut juga lama hidup manusia didunia. Berikut ini adalah Angka Harapan Hidup penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2008 dan 2009.

Tabel 3.1 : Angka Harapan Hidup

No	Tahun	Jenis Kelamin		Disparitas Gender
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2008	71.43	75.22	3,79
2.	2009	71.51	75.28	3,77

Sumber : BPPM, 2011 diolah kembali

Pada tahun 2008, angka harapan hidup penduduk laki-laki di Kota Yogyakarta adalah 71,43 tahun sedangkan perempuan 75,22. Di tahun berikutnya, usia harapan hidup

rata-rata laki-laki di Kota Yogyakarta sedikit meningkat namun tidak signifikan, menjadi 71,51 sementara perempuan menyetujui angka 75,28 tahun. Angka ini lebih tinggi dari usia harapan hidup nasional 70 tahun.

Dalam rentang waktu tersebut terdapat disparitas gender yang menunjukkan ketertinggalan salah satu jenis kelamin. Pada tahun 2008 disparitas gender AHH sebesar 3,79 dan bertanda positif, artinya laki-laki dalam kondisi tertinggal dibanding perempuan atau dengan kata lain usia harapan hidup perempuan lebih panjang 3,79 tahun dibanding laki-laki.

Tahun 2009 memberikan gambaran yang sama, dimana angka disparitas gender sebesar 3,77 dan bertanda positif yang menunjukkan pada tahun tersebut usia harapan hidup perempuan lebih lama di banding laki-laki. Penelitian ini belum berhasil menyajikan data terbaru sehingga tidak bisa mengamati tren atau pola perkembangan AHH dari tahun ke tahun.

Perbedaan AHH antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh perbedaan faktor resiko kesehatan, infrastruktur dan layanan kesehatan, pola hidup serta tingkat sumber daya kesehatan yang dapat diakses oleh keduanya. Pola hidup beresiko seperti merokok, kegemaran begadang, mengkonsumsi alkohol yang biasanya dilakukan oleh laki-laki

diduga berkorelasi terhadap capaian AHH yang tidak setinggi perempuan.

Relatif tingginya AHH perempuan di Kota Yogyakarta harus terus dipertahankan. Sebab, kenaikan angka harapan hidup bermakna pada peningkatan derajat kesehatan perempuan yang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kesadaran, pengetahuan, infrastruktur, layanan dan kebijakan di bidang kesehatan. Tingginya AHH juga berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi kelompok lansia perempuan. Angka Harapan Hidup yang tinggi harus diantisipasi dengan layanan kesehatan yang memadai sehingga selain harapan hidup, kualitas hidup perempuan juga perlu ditingkatkan.

3.2 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

Salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan perempuan di suatu negara adalah dengan melihat jumlah Angka Kematian Ibu (AKI). Indonesia menargetkan tiga perempat (3/4) resiko jumlah kematian ibu berkurang di tahun 2015. Untuk memenuhi capaian Millennium Development Goals (MDG's).

Pada tahun 2012, terdapat 7 kasus kematian ibu dari 4.658 jumlah kelahiran hidup di kota Yogyakarta (Tabel 3.2).

**Tabel 3.2. Jumlah dan usia Kematian Ibu Hamil,
Melahirkan dan Nifas**

NO	KECAMATAN (1)	Usia Kematian Ibu			Jumlah (5)
		(2) < 20	(3) 20-35	(4) > 35	
1	Tegalrejo	-	1	-	1
2	Jetis	-	1	1	2
3	Gondokusuman	-	-	-	-
4	Danurejan	-	-	-	-
5	Gedongtengen	-	-	-	-
6	Ngampilan	-	2	-	2
7	Wirobrajan	-	-	1	1
8	Mantrijeron	-	-	-	-
9	Kraton	-	-	1	1
10	Gondomanan	-	-	-	-
11	Pakualaman	-	-	-	-
12	Mergangsan	-	-	-	-
13	Umbulharjo	-	-	-	-
14	Kotagede	-	-	-	-
	Jumlah 2012	-	4	3	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2013

Tujuh kasus kematian ibu di Kota Yogyakarta tahun 2012 terjadi di kecamatan Jetis, Kotagede, Kraton, Tegalrejo dan Wirobrajan masing-masing satu kasus sedangkan dua kasus terjadi di Ngampilan. Empat kasus kematian ibu terjadi pada rentang usia 20-34 tahun dan tiga kasus lainnya menimpa ibu yang berusia di atas 35 tahun. Jumlah kematian ibu tersebut di golongan ke dalam tiga kategori yakni : kematian ibu hamil, kematian ibu melahirkan dan kematian

ibu pada masa nifas. Jika mengacu pada tiga kategori tersebut, tercatat jumlah kematian ibu yang terjadi pada masa kehamilan adalah tiga kasus, pada fase persalinan satu kasus sedangkan pada masa nifas sebanyak tiga kejadian.

Terbatasnya ketersediaan data di tahun-tahun sebelumnya, menyebabkan tren pergerakan jumlah kematian ibu selama kurun waktu lima tahun terakhir tidak dapat disajikan. Selain itu, penelusuran mengenai penyebab kematian ibu juga belum bisa terlacak sehingga langkah-langkah antisipasi termasuk perumusan program terkait penurunan kematian ibu juga tidak bisa dilakukan.

Secara umum, kematian ibu berkorelasi dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil. Meskipun di hampir setiap budaya, ibu adalah sebuah peran yang sangat dihormati, namun perhatian terhadap kesehatan perempuan masih sangat kurang, terutama bagi perempuan hamil. Kehamilan merupakan kelebihan dan keunikan namun sekaligus merupakan beban kesehatan bagi perempuan karena faktor ketidaksetaraan kondisi sosial antara laki-laki dan perempuan. Kehamilan yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama antara perempuan dan laki-laki, seringkali karena alasan biologis dan sosial hanya dibebankan kepada perempuan saja.

Disamping itu, kematian ibu juga dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat sosioekonomi, pendidikan, peran dan

kedudukan perempuan yang kesemuanya berpengaruh pada munculnya dua keadaan yang tidak menguntungkan, yaitu : “Tiga Terlambat” yakni (terlambat mengenali bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat pelayanan fasilitas kesehatan) dan “Empat Terlalu” yakni (Terlalu Muda untuk menikah, terlalu tua untuk hamil, terlalu sering untuk hamil, dan terlalu banyak untuk melahirkan).

3.3 Cakupan Pertolongan Persalinan

Tabel 3.3. Cakupan Pertolongan Persalinan

No	Kecamatan	Ibu Bersalin		
		Jumlah	Ditolong Nakes	%
1	Tegalrejo	451	451	100.0
2	Jetis	393	393	100.0
3	Gondokusuman	332	332	100.0
4	Danurejan	195	103	100.0
5	Gedongtengen	232	232	100.0
6	Ngampilan	154	154	100.0
7	Wirobrajan	330	330	100.0
8	Mantrijeron	529	529	100.0
9	Kraton	184	184	100.0
10	Gondomanan	168	168	100.0
11	Pakualaman	101	101	100.0
12	Mergangsan	326	326	100.0
13	Umbulharjo	855	855	100.0
14	Kotagede	410	410	100.0
Jumlah		4,660	4,660	100.00

Sumber : Dinkes Pemerintah Kota Yogyakarta, 2012

Pada tahun 2012, total jumlah persalinan di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 4.660 kelahiran yang semuanya di bantu oleh tenaga kesehatan. Angka tersebut bermakna dua hal. Pertama, 100% kelahiran sepenuhnya ditangani oleh tenaga profesional. Kedua, angka tersebut jauh melampaui target Kementerian Kesehatan RI tahun 2010 dimana minimal 90% persalinan harus dibantu oleh tenaga kesehatan. Tentu saja ini adalah capaian istimewa yang perlu terus dipertahankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

Sayang sekali, data persalinan di tahun-tahun sebelumnya tidak berhasil diperoleh sehingga sulit untuk dilakukan analisis dan perbandingan perkembangan selama beberapa tahun terakhir.

3.4. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

Kunjungan Ibu hamil untuk yang pertama kali (K-1) pada tahun 2012 mencapai 100% atau sebanyak 5.102. Prosentase 100% ini merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Kota. Data tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran ibu hamil untuk memanfaatkan layanan kesehatan sudah cukup tinggi. Hal ini juga bermakna bahwa pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau di semua desa bagi perempuan dan anak, khususnya ibu hamil sudah berjalan baik.

**Tabel 3.4 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ke
Puskesmas**

No	Kecamatan	Ibu Hamil				
		Jumlah	K1	%	K4	%
1.	Tegalrejo	510	510	100.0	507	99.41
2.	Jetis	461	461	100.0	414	89.80
3.	Gondokusuman	342	342	100.0	206	60.23
4.	Danurejan	201	201	100.0	116	57.71
5.	Gedongtengen	200	200	100.0	195	97.50
6.	Ngampilan	171	171	100.0	171	100.00
7.	Wirobrajan	362	362	100.0	346	95.58
8.	Mantrijeron	590	590	100.0	560	94.92
9.	Kraton	202	202	100.0	173	85.64
10.	Gondomanan	192	192	100.0	178	92.71
11.	Pakualaman	121	121	100.0	108	89.26
12.	Mergangsan	383	383	100.0	329	85.90
13.	Umbulharjo	935	935	100.0	609	65.13
14.	Kotagede	432	432	100.0	237	54.86
Jumlah (Kab/Kota)		5,102	5,102	100.0	4,149	81.32

Sumber : Dinkes Kota Yogyakarta, 2012

Sedangkan untuk kunjungan K4 pada tahun 2012 mencapai 4,149 jiwa (81.32%). Capaian K4 ini masih di bawah target standar nasional sebesar 95%. Dukungan para medis, bidan dan dokter di setiap kecamatan/desa akan sangat efektif untuk meningkatkan angka kunjungan ibu hamil di posyandu dan puskesmas secara berkala terutama untuk tiga kecamatan dengan pencapaian K4 terendah yakni Danurejan (57.710%), Kotagede (54.86 %) dan Umbulharjo (65.13 %).

3.5 Imunisasi atau Vaksinasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil

Tabel 3.5 berikut ini memperlihatkan bahwa total serapan Imunisasi/Vaksin Tetanus Toxoid (TT) mulai dari TT₁ sampai dengan TT₅ di tahun 2012 masih jauh dari target. Dari sebanyak 5.105 ibu hamil, hanya sekitar 3.502 yang tercatat mendapat vaksin TT₁-TT₅. Hal ini menunjukkan bahwa tidak lebih dari 67% ibu hamil yang telah terlindungi dari penyakit tetanus toxoid, walaupun tingkat perlindungannya sangat variatif tergantung status TTnya, karena TT₅ memberikan perlindungan selama 25 tahun (*long end*). Angka tersebut dapat dimaknai bahwa informasi mengenai pentingnya imunisasi TT₁ sampai dengan TT₅ belum sepenuhnya diperoleh oleh ibu hamil sejak di awal dan sebelum kehamilan. Tercatat ada empat kecamatan yang tingkat serapannya kurang dari 50% yakni, Jetis (48%), Mergangsan (49%), Tegarejo (49%) dan Wirobrajan (42%).

Tabel 3.5. Imunisasi atau Vaksinasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Vaksinasi Tetanus Toksoid Pada Ibu Hamil						
			TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5	TT1-TT5	
			Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tegalrejo	510	108	72	43	14	15	252	0,49412
2	Jetis	461	129	69	20	2	2	222	0,48156
3	Gondokusuman	342	181	91	32	7	4	315	0,92105

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Vaksinasi Tetanus Toksoid Pada Ibu Hamil						
			TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5	TT1-TT5	
			Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Danurejan	201	98	39	23	6	3	169	0,8408
5	Gedongtengen	200	118	46	37	12	7	220	1,1
6	Ngampilan	171	79	35	13	6	2	135	0,78947
7	Wirobrajan	362	73	43	17	10	8	151	0,41713
8	Mantrijeron	590	157	118	44	10	5	334	0,5661
9	Kraton	202	112	48	21	3	5	189	0,93564
10	Gondomanan	192	86	63	9	1	0	159	0,82813
11	Pakualaman	121	32	20	18	11	11	92	0,76033
12	Mergangsan	383	122	52	12	1	0	187	0,48825
13	Umbulharjo	935	239	211	120	66	29	665	0,71123
14	Kotagede	432	201	117	63	14	8	403	0,93287
Jumlah (Kab/Kota)		5105	1739	1029	478	170	107	3502	0,68599

Sumber: Dinkes Kota Yogyakarta, 2013

3.6 Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Sepanjang tahun 2012, prosentase capaian ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (fe 1 dan fe 3) belum dapat dikatakan optimal, karena hanya berada di angka 77,9% dan 72%. Data pada tabel 3.6 memperlihatkan bahwa Kecamatan Mantrijeron berhasil memperoleh capaian pemberian tablet Fe 1 dan Fe 3 tertinggi yakni masing-masing sebesar 95%. Sedangkan kecamatan dengan capaian Fe1 dan Fe 3 terendah adalah Kecamatan Gondomanan (51,04 % & 41,667).

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Vaksinasi Tetanus Toksoid Pada Ibu Hamil						
			TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5	TT1-TT5	%
			Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Danurejan	201	98	39	23	6	3	169	0,8408
5	Gedongtengen	200	118	46	37	12	7	220	1,1
6	Ngampilan	171	79	35	13	6	2	135	0,78947
7	Wirobrajan	362	73	43	17	10	8	151	0,41713
8	Mantrijeron	590	157	118	44	10	5	334	0,5661
9	Kraton	202	112	48	21	3	5	189	0,93564
10	Gondomanan	192	86	63	9	1	0	159	0,82813
11	Pakualaman	121	32	20	18	11	11	92	0,76033
12	Mergangsan	383	122	52	12	1	0	187	0,48825
13	Umbulharjo	935	239	211	120	66	29	665	0,71123
14	Kotagede	432	201	117	63	14	8	403	0,93287
Jumlah (Kab/Kota)		5105	1739	1029	478	170	107	3502	0,68599

Sumber: Dinkes Kota Yogyakarta, 2013

3.6 Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Sepanjang tahun 2012, prosentase capaian ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (fe 1 dan fe 3) belum dapat dikatakan optimal, karena hanya berada di angka 77,9% dan 72%. Data pada tabel 3.6 memperlihatkan bahwa Kecamatan Mantrijeron berhasil memperoleh capaian pemberian tablet Fe 1 dan Fe 3 tertinggi yakni masing-masing sebesar 95%. Sedangkan kecamatan dengan capaian Fe1 dan Fe 3 terendah adalah Kecamatan Gondomanan (51,04 % & 41,667).

Tabel 3.6. Ibu Hamil Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	Fe1 (30 Tablet)		Fe3 (90 Tablet)	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tegalrejo	510	333	65,29	250	49,02
2.	Jetis	461	360	78,09	298	64,64
3.	Gondokusuman	342	240	70,18	220	64,33
4.	Danurejan	283	169	59,72	167	59,01
5.	Gedongtengen	200	169	84,50	111	55,50
6.	Ngampilan	171	134	78,36	155	90,64
7.	Wirobrajan	362	267	73,76	260	71,82
8.	Mantrijeron	590	563	95,42	563	95,42
9.	Kraton	202	167	82,67	130	64,36
10.	Gondomanan	192	98	51,04	80	41,67
11.	Pakualaman	121	110	90,91	106	87,60
12.	Mergangsan	383	355	92,69	334	87,21
13.	Umbulharjo	935	746	79,79	747	79,89
14.	Kotagede	432	328	75,93	307	71,06
JUMLAH		5184	4.039	77,91	3.734	72,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2013

Kurang optimalnya serapan tablet Fe bagi ibu hamil di Kota Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian khusus oleh dinas terkait terutama Dinas Kesehatan, sebagai bentukantisipasi pencegahan kematian Ibu yang diakibatkan oleh anemia. Penelitian Chi, dkk menyebutkan bahwa 15-20% kematian ibu secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan anemia. Lebih lanjut, anemia pada ibu hamil juga berhubungan dengan tingkat kesakitan ibu, dan anemia karena defisiensi zat besi merupakan penyebab utama

anemia pada ibu hamil dibandingkan dengan defisiensi zat besi yang lain. Anemia defisiensi sejatinya merupakan problema kesehatan yang dialami oleh wanita seluruh dunia utamanya di negara-negara berkembang. Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa 40% kematian ibu di negara berkembang berhubungan dengan anemia pada kehamilan dan kebanyakan anemia pada masa kehamilan disebabkan oleh defisiensi zat besi dan pendarahan akut dan terkadang keduanya saling berinteraksi.

3.7 Penderita HIV-AIDS

Sepanjang tahun 2012, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta yang terdeteksi mengidap HIV sebanyak 36 orang, terdiri dari 27 laki-laki dan 9 orang perempuan. Sedangkan jumlah penduduk yang dinyatakan positif AIDS adalah 31 orang, dimana 22 penderita berjenis kelamin laki-laki dan 9 sisanya perempuan. Dari jumlah tersebut, penderita AIDS yang kemudian dinyatakan meninggal sebanyak 9 orang, 8 diantaranya adalah laki-laki dan 1 orang perempuan. Temuan yang penting untuk diwaspadai adalah tingginya jumlah penderita penyakit seksual menular, angkanya mencapai 459 orang.

Kendati jumlah perempuan penderita HIV/AIDS di Kota Yogyakarta relatif lebih sedikit dibanding laki-laki, namun bukan berarti perempuan berada dalam status aman. Sebab, tren global menunjukkan bahwa perempuan penderita

HIV/AIDS diprediksi akan mengalami peningkatan, modulus utamanya melalui hubungan heteroseksual dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril saat menggunakan NAPZA. Berbagai riset juga mendokumentasikan bahwa infeksi HIV pada perempuan atau remaja putri tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman akan cara-cara pencegahan HIV. Seringkali infeksi HIV terjadi karena mereka tidak memiliki kekuatan sosial dan ekonomi, sehingga tidak mempunyai posisi tawar untuk melindungi diri sendiri. Situasi demikian menyebabkan perempuan dan remaja putri lebih rentan tertular HIV. Dugaan ini diperkuat oleh hasil studi UNAIDS (2004) yang menyebutkan bahwa kelompok ini berisiko 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan remaja pria. UNAIDS juga menemukan bahwa kasus baru HIV/AIDS di Negara berkembang 67% diantaranya adalah kelompok usia muda (15-24 tahun) dimana 64% adalah perempuan dan remaja putri.

Tabel 3.7. Penderita HIV AIDS

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Baru									Jumlah Kematian Akibat Aids			
		HIV			AIDS			Infeksi Menular Seksual Lainnya			L	P	L+P	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Tegalrejo			0			0			0				0
2	Jetis			0			0			0				0
3	Gondokusuman			0			0			0				0

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Baru									Jumlah Kematian Akibat Aids		
		HIV			AIDS			Infeksi Menular Seksual Lainnya					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Danurejan			0			0			0			0
5	Gedongtengen			0			0			0			0
6	Ngampilan			0			0			0			0
7	Wirobrajan			0			0			0			0
8	Mantrijeron			0			0			0			0
9	Kraton			0			0			0			0
10	Gondomanan			0			0			0			0
11	Pakualaman			0			0			0			0
12	Mergangsan			0			0			0			0
13	Umbulharjo			0			0			0			0
14.	Kotagede												
JUMLAH		27	9	36	22	9	31			459	8	1	

Sumber: Dinkes Kota Yogyakarta, 2012

Selama ini masih terdapat stigma dalam masyarakat yang menganggap bahwa HIV/AIDS hanya dialami oleh perempuan penjaja seks komersial atau perempuan penjaja seks komersial adalah sumber penularan HIV. Kenyataannya, perempuan baik-baik yang tidak melakukan perilaku seksual berisiko juga didapati terkena virus ini dari pasangan tetapnya (suaminya). Kerentanan perempuan terhadap HIV sesungguhnya lebih banyak disebabkan oleh ketimpangan gender dimana perempuan tidak mampu mengontrol perilaku seksual suaminya atau menyuntik narkoba dari

suaminya dan kurangnya akses untuk mendapatkan pelayanan pengobatan HIV/AIDS.

Dampak yang harus dipikul oleh perempuan dan remaja putri juga lebih berat dibanding laki-laki dalam kasus ini, karena perempuan dihampir semua budaya bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan domestik merawat keluarga yang sakit, dan pada saat suaminya jatuh sakit dan meninggal karena AIDS mereka terpaksa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa AIDS telah secara signifikan meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh perempuan. Infeksi virus HIV juga mengakibatkan peningkatan beban keluarga, kemiskinan serta penderitaan bagi perempuan karena kehilangan pekerjaan dan mahalny biaya pengobatan.

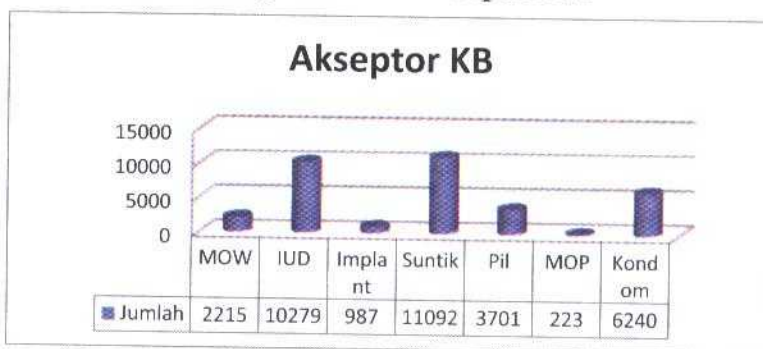
Menghadapi persoalan tersebut, pilihan strategis yang dapat dilakukan adalah memberdayakan kaum perempuan dalam penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Hal ini bisa ditempuh dengan peningkatan pengetahuan, pemahaman, peran serta, baik secara individu maupun melalui organisasi perempuan dalam bentuk kegiatan penyuluhan, motivasi dan bimbingan serta penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

3.8 Keluarga Berencana

Jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 mencapai 34.737 peserta,

dimana 77% diantaranya adalah peserta perempuan dan sisanya sebesar 23% merupakan akseptor laki-laki.

Grafik 3.1 Jumlah Akseptor KB



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2012

Dominasi perempuan nampak jelas dari jenis kontrasepsi yang menjadi pilihan yakni MOW, IUD, implant, suntik dan pil). Mayoritas perempuan merasa nyaman menggunakan metode suntik, ini terlihat dari tingginya penggunaan metode tersebut jika dibanding dengan jenis lain yang mencapai 39,2% (11.092). Pilihan jenis kontrasepsi berikutnya adalah IUD, sebesar 10.279 atau 36,4% perempuan mengaku menggunakannya. Pil dan MOW menjadi pilihan berikutnya masing-masing dengan prosentase 13,1% dan 7,8%. Alat kontrasepsi yang paling sedikit diminati oleh perempuan adalah jenis implant, hanya sekitar 987 orang atau 3,5%.

Angka partisipasi laki-laki di Kota Yogyakarta secara langsung dalam Keluarga Berencana masih terhitung rendah, secara total berada dalam kisaran angka 6463 akseptor. Mayoritas akseptor laki-laki yaitu sebanyak 96,5% memilih untuk menggunakan kondom dan sisanya sebesar 3,5% tercatat memilih metode MOP.

Minimnya partisipasi laki-laki dalam program KB selaras dengan hasil FGD yang dilakukan oleh tim peneliti dengan SKPD terkait yang menghasilkan temuan antara lain : *Pertama*, fenomena rendahnya partisipasi laki-laki dipengaruhi oleh faktor kekhawatiran dari pihak istri. Istri tidak membolehkan suami untuk ber-KB karena khawatir suami akan terlibat perselingkuhan dan sulit untuk di deteksi. *Kedua*, Pasangan Usia Subur (PUS) namun belum terlayani sebagian besar adalah Wanita Usia Subur (WUS) yang berusia 35 tahun ke atas. *Ketiga*, Penyebab terbanyak PUS tidak ber KBB adalah kurangnya pengetahuan tentang efek samping KB.

Disamping itu, rendahnya partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi tidak bisa dilepaskan dengan pandangan tradisional bahwa KB adalah urusan perempuan. Justifikasi yang sering digunakan adalah perempuan yang hamil dan melahirkan, maka sudah wajar apabila mereka menjadi obyek dan target sasaran pengendalian pertumbuhan penduduk. Dalam banyak kasus perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk

memutuskan metode kontrasepsi yang diinginkan, antara lain karena ketergantungan yang tinggi terhadap suami, kurangnya informasi dan terbatasnya ketersediaan alat serta obat di tempat pelayanan.

Rendahnya penggunaan kontrasepsi di kalangan laki-laki diperparah oleh kesan selama ini bahwa program KB hanya diperuntukkan bagi perempuan sehingga laki-laki cenderung bersifat pasif. Hal ini juga tampak dari kecenderungan pengguna tenaga perempuan sebagai petugas dan promotor untuk kesuksesan program KB, padahal praktek KB merupakan permasalahan keluarga, dimana permasalahan keluarga adalah permasalahan sosial yang berarti juga merupakan permasalahan bersama antara laki-laki dan perempuan.

Disamping itu kurangnya partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi adalah karena keterbatasan metode untuk pengaturan fertilitas yang dapat dipilih pria. Secara biologis pengendalian fertilitas untuk laki-laki lebih sulit dibanding laki-laki karena laki-laki-laki selalu dalam kondisi subur dengan jumlah sperma yang dihasilkan sangat banyak. Masalah lain untuk mengembangkan metode kontrasepsi baru bagi laki-laki adalah kebutuhan dana yang sangat besar, sehingga menimbulkan hambatan dalam pengembangannya (Ekarini, 2008).

Eksluksi pria dari program KB menurut Rob (1999) menjadi faktor penentu keterbatasan program KB yang dapat

dicapai. Penggunaan metode kontrasepsi modern bagi pria di Indonesia kurang dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Rendahnya keterlibatan pria dalam penggunaan metode kontrasepsi mantap (vasektomi) diakibatkan oleh adanya kekhawatiran para suami setelah vasektomi mereka akan kehilangan kejantanannya. Persepsi dan pandangan yang negatif bahwa vasektomi itu sama dengan pegebirian, semakin membuat pria enggan untuk menjalani vasektomi.

Untuk meningkatkan kebersertaan laki-laki dalam program KB, maka pemahaman mengenai aspek gender menjadi sangat penting. Terutama dalam merancang program dan kegiatan yang selalu memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara seimbang (responsif gender) sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa diabaikan kebutuhannya, baik dalam informasi maupun pelayanan.

Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang responsif gender tersebut meliputi: 1) Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan mengubah perilaku dalam praktek KB dan kesehatan reproduksi yang memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki secara seimbang. 2) Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, yaitu pelayanan Komunikasi interpersonal (KIP)/Konseling dan pelayanan medis berkaitan dengan KB dan kesehatan reproduksi. Dengan pelayanan yang responsif gender ini

perempuan dan laki-laki dapat mengakses informasi dan pelayanan, berpartisipasi dalam KB dan kesehatan reproduksi, memperoleh manfaat yang sama, adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan tentang KB dan kesehatan reproduksi.

3.9 Usia Perkawinan

Riset ini belum berhasil memperoleh data terbaru terkait data pernikahan di bawah umur di Kota Yogyakarta, termasuk sebaran kasusnya sehingga sulit untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan rawan. Namun sebagai gambaran, tahun 2010 dan 2011 ditemukan 55 kasus perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2010 terdapat 47 kasus, sementara pada tahun 2011 pernikahan usia dini turun dalam jumlah cukup banyak, yakni hanya 8 kasus atau turun sebesar 83% (Tabel 3.9).

Hasil FGD yang dilakukan oleh tim peneliti dengan beberapa SKPD terkait mengungkapkan fakta bahwa pernikahan usia muda di Kota Yogyakarta lebih dikarenakan faktor Kehamilan yang Tidak Dikehendaki (KTD). Pasangan usia muda tersebut terpaksa melakukan pernikahan karena pihak perempuan terlanjur hamil terlebih dahulu.

Tabel 3.9. Usia Perkawinan Pertama

Tahun	Usia < 19 Th	Usia < 16 Th	Jumlah
	L	P	
Tahun 2011	6	2	8
Tahun 2010	22	25	47
Total	28	27	55

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta,
2011

Batasan seorang perempuan boleh melaksanakan pernikahan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah pada usia 16 tahun. UU ini agaknya berseberangan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengartikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Revisi UU perkawinan dengan mengedepankan berbagai aspek untuk melindungi hak-hak perempuan sangat di perlukan dalam konteks ini, sebab dari sisi medis dan kesiapan fisik, perempuan siap menikah pada usia 20 tahun atau lebih. Hal ini selaras dengan seruan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang juga turut mendorong revisi UU pernikahan, dimana usia pernikahan minimal untuk perempuan 20 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki sebagai prasarat untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan terencana. Kampanye pada generasi muda agar menyelesaikan pendidikan dan berpenghasilan cukup sebelum menikah sebenarnya sangatlah rasional.

Penundaan usia pernikahan diharapkan mampu menyehatkan alat reproduksi agar bisa menyehatkan ibu saat bersalin dan bayi yang dilahirkan. Usia terlalu muda akan memberikan masa reproduksi kian panjang dan berpeluang bagi seorang perempuan melahirkan berulang-ulang, sementara setiap kali proses persalinan terjadi, seorang perempuan akan menghadapi risiko kematian. Kian sering melahirkan, kian sering pula menghadapi risiko kematian akibat melahirkan, mengingat angka kematian ibu akibat melahirkan di Indonesia tergolong masih tinggi, sebagian besar sumbangan dari kehamilah usia muda.

Pernikahan usia muda sesungguhnya merupakan salah satu gambaran ketidakberdayaan perempuan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kesenjangan gender yang nampak dalam hal ini adalah dampak buruk pernikahan usia muda lebih dirasakan oleh perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu berupa tidak adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mengembangkan potensi diri, dan menikmati masa remaja dengan baik. Fenomena pernikahan di bawah umur kerap kali sulit ditekan karena dibenturkan dengan persoalan agama dan tradisi. Selain itu terdapat pula faktor-faktor lain seperti : 1) Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, 2) Pengaruh informasi/pergaulan bebas, 3) Anggapan yang salah dari sebagian masyarakat tentang perempuan yang menikah pada usia matang sebagai 'tidak

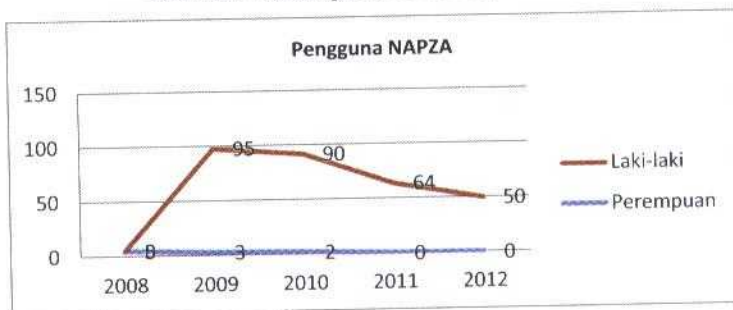
laku' atau 'perawan tua', 4) Kebanggaan orangtua segera menimang cucu dari anak perempuannya yang dapat segera menikah, 5) Pandangan dan dorongan untuk menikahkan anak gadis secepatnya dengan maksud mengurangi beban ekonomi keluarga (faktor kemiskinan).

Melihat fenomena pernikahan dini masih ditemukan, maka diperlukan program-program yang terkait dengan pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana. Misalnya melalui promosi dan pendidikan reproduksi bagi remaja, hukum perkawinan, pendidikan agama dan lain-lain di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, khususnya bagi remaja penting untuk terus di giatkan.

3.10 Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, catatan pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif, terutama pengguna laki-laki. Sebaliknya perempuan pengguna NAPZA justru turun dari tahun ke tahun.

Grafik 3.2 Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)



Sumber: Badan Narkotika Berdasar Hasil Ungkapan Polres Kota Yogyakarta, 2012

Pada tahun 2008, tidak ada laporan laki-laki yang teridentifikasi sebagai pengguna NAPZA, namun setahun kemudian angka tersebut melonjak menjadi 95 orang sebelum akhirnya turun menjadi 90 orang di tahun 2010. Dua tahun berikutnya jumlah pemakai terus turun menjadi 64 orang tahun 2011 dan 50 orang tahun 2012.

Sebaliknya, perempuan yang tercatat sebagai pemakai NAPZA tergolong rendah selama lima tahun terakhir. Bahkan terjadi tren yang menurun, jika pada tahun 2008, hanya 3 orang perempuan yang diketahui sebagai pengguna, empat tahun selanjutnya berangsur-angsur menurun bahkan tahun 2012 tidak ditemukan data perempuan sebagai pecandu zat terlarang tersebut.

Namun, data-data di atas belum tentu mewakili kondisi riil yang terjadi di masyarakat karena hanya berasal dari satu sumber yakni dari ungkapan pihak kepolisian saja. Boleh jadi, data pemakai baik perempuan maupun laki-laki lebih besar dari angka yang dilaporkan mengingat jaringan pemakai biasanya terorganisir dengan rapi dan tidak mudah dideteksi oleh masyarakat awam.

Artinya, pemerintah Kota Yogyakarta perlu untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan penggunaan narkoba dan berbagai zat terlarang lainnya. Ini cukup beralasan sebab, Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini mengkategorikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba dimana peredaran narkoba dan obat berbahaya sudah sangat mengkhawatirkan. Penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI pada 2011, menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 2,2% atau setara dengan 4,2 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia berusia 10 tahun hingga 59 tahun. Diprediksi angka prevalensi akan meningkat menjadi 2,8% (5,1 juta orang) pada 2015. Tren penyalahgunaan narkoba saat ini didominasi oleh ganja, sabu-sabu, pil ekstasi, heroin, kokain, dan obat-obatan daftar G. Sebagian besar penyalahgunanya ialah remaja berpendidikan tinggi.



BAB IV. PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN

BAB IV

PROFIL GENDER

BIDANG PENDIDIKAN

Kegelisahan Kartini seabad lalu dilatari oleh keadaan bangsanya yang tertindas bangsa lain. Untuk itu ia "bermimpi" tentang emansipasi bangsa, persamaan hak antara bangsa yang satu dengan yang lain, tanpa ada yang tertindas dan menindas, tanpa ada yang membodohi dan dibodohi; yang menurutnya hanya mungkin terjadi jika kita memperbaiki kualitas bangsa.

Tiga jurus yang ditawarkan Kartini untuk memperbaiki kualitas bangsa, meliputi: (1) pendidikan bagi bangsa, (2) memperjuangkan persamaan hak bagi semua orang termasuk di dalamnya persamaan hak antara laki-laki dan wanita (emansipasi wanita), (3) perlu membangun bangsa. Lebih dari seabad sepeninggal Kartini, masalah besar yang dihadapi bangsa ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang salah satunya diukur dari indeks pendidikan yakni angka melek huruf dan rata-rata lama pendidikan penduduk. Di sektor ini, perempuan tertinggal dibanding laki-laki.

Posisi subordinat perempuan di bidang pendidikan tercermin dalam dua persoalan serius, yaitu masih besarnya jumlah perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta huruf dan rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah partisipasi perempuan.

Sektor yang paling strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender adalah sektor pendidikan. Alasannya sederhana, dalam dunia modern sekarang ini, hal menonjol yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah pada kemampuan intelektualnya. Kesetaraan gender tidak bisa benar-benar terwujud jika kesetaraan gender dalam bidang pendidikan belum terealisasikan. Perjuangan kesetaraan gender harus dimulai dari sektor pendidikan. Dengan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan maka mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses lapangan pekerjaan dan berbagai bidang kehidupan.

4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK sepanjang tahun 2008-2012 dan APK perkecamatan berdasar level pendidikan tersaji dalam tabel 4.1. berikut ini:

**Tabel 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan**

KECAMATAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan									
No	(1)	(2)		(3)		(4)		APK SMP Termasuk Paket B		APK SMA Termasuk Paket C	
		APK PAUD		APK TK		APK SD Termasuk Paket A		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tegalrejo			27,81	25,11	152,21	138,19	62,03	73,47	118,97	122,34
2	Jetis			30,13	28,9	244,71	226,9	217,74	193,36	673,37	262,89
3	Gondokusuman			73,4	59,29	673,7	568,48	530,25	534,44	585,22	652,41
4	Danurejan			14,74	15,18	91,96	90,99	146,9	157,57	15,05	28,19
5	Gedongtengen			34,08	25,91	128,38	100,22	200,75	187,08	13,74	119,37
6	Ngampilan			29,93	28,49	208,51	166	176,08	289,03	108,15	217,18
7	Wirobrajan			45,85	43,63	231,2	205	288,23	106,78	320,28	218,45
8	Mantrijeron			66,09	62,74	100,72	84,26	86,11	62,33	57,14	68,1
9	Kraton			16,11	15,14	90,83	89,95	74,96	67,61	6,47	0,66
10	Gondomanan			59,43	54,36	377,8	346,74	249,52	300,86	264,76	377,72
11	Pakualaman			20,43	22,31	72,88	64,43	56,62	40,92	0	0
12	Mergangsan			11,54	13,98	56,12	48,56	34,26	22,46	29,15	13,34
13	Umbulharjo			60,02	64,02	303,79	274,59	262,08	254,42	419,25	527,78
14	Kotagede			23,94	22,16	114,63	93,29	72,87	62,77	50,63	56,67
	2012			513,5	481,22	2847,44	2497,6	2458,4	2353,1	2662,18	2665,1
	2011			857,26	895,27	1973,69	1864,7	1779,11	1701,41	1428,51	1190,49
	2010			957,56	854,76	2128,68	1825,87	2023,8	1875,58	1661,63	1509,4

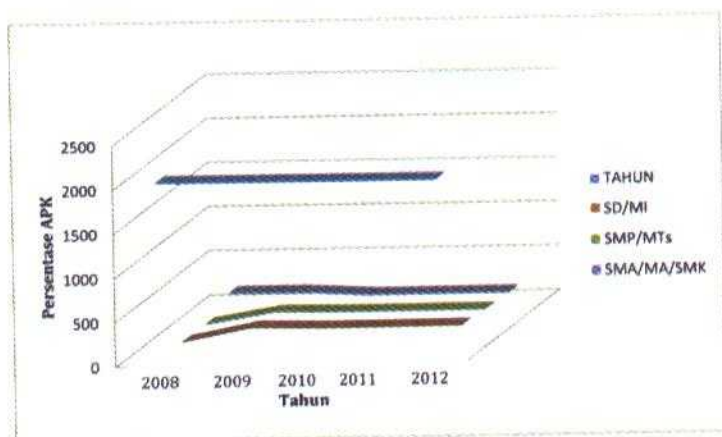
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Secara umum tren APM disetiap tingkat pendidikan memperlihatkan kecenderungan yang terus membaik dari periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2012, di tingkat TK meningkat 118,455, SD/MI/Paket A meningkat 3425,84, SLTP/MTS/Paket B meningkat 3071,24 dan Tingkat

SLTA/SMK/Paket C mengalami peningkatan signifikan 4017,78 dibanding tahun 2011. Nilai disparitas gender bersifat negatif sepanjang 3 tahun terakhir, maknanya laki-laki berada pada kondisi yang lebih baik dibanding perempuan dalam konteks APK.

Berdasarkan grafik 4.1, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) disemua kelompok cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Namun berdasarkan data informasi pendidikan dalam angka, jika diamati secara rinci sebenarnya pada tingkat SD/MI pada tahun 2012 mengalami penurunan 4% dibanding tahun 2011.

Grafik 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun 2012 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta menunjukkan, partisipasi perempuan lebih rendah dari laki-laki kecuali pada tingkat SMA atau pada umur 16-18 tahun angka APS perempuan lebih tinggi 1.275 dibanding laki-laki. Sebaliknya partisipasi pada tingkat SMK jumlah perempuan lebih rendah 1.507. Namun pada tingkat SD sampai SMP secara keseluruhan APS perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Pada tingkat SD atau pada umur (7-12) tahun angka APS perempuan lebih rendah 1.483 sedangkan MI (kelompok perempuan lebih rendah 24). Pada usia 13-15 tahun kategori SMP perempuan lebih rendah 159 dan kategori MTs lebih rendah 65 dibanding laki-laki.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

KECAMATAN		Angka Partisipasi Sekolah (APS)											
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)			
	Siswa SD 7-12	Siswa MI 7-12		Siswa SMP 13-15		Siswa MTs 13-15		Siswa SMA 16-18		Siswa SMK 16-18			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Tegalrejo	1842	1734			363	437			806	816	14	0
2	Jetis	1911	1855			885	794			332	379	2712	923
3	Gondokusuman	3777	3496			1638	1819			1158	2235	611	152
4	Danurejan	823	805			827	829					89	144
5	Gedongtengen	699	616			498	530	41	30	25	34	10	443
6	Ngampilan	865	781			445	375	0	375	81	79		
7	Wirobrajan	1369	1308			418	334	410	0	819	864	8	8
8	Mantrijeron	1059	942			458	311	9	1	300	388	108	160

KECAMATAN		Angka Partisipasi Sekolah (APS)											
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Siswa SD 7-12		Siswa MI 7-12		Siswa SMP 13-15		Siswa MTs 13-15		Siswa SMA 16-18		Siswa SMK 16-18	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
9	Kraton	877	912			395	381			1	0	40	0
10	Gondomanan	1136	1110			373	503			500	541	28	242
11	Pakualaman	456	408			194	138						
12	Mergangsan	1424	1332			285	235	89	66	166	72	381	176
13	Umbulharjo	2987	2710	126	111	1082	1051	195	223	672	727	2193	2439
14	Kotagede	1684	1417	49	40	560	525	39	23			0	0
	Jumlah 2012	20.909	19.426	175	151	8.421	8.262	783	718	4.860	6.135	6.194	4.687

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA

Berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Yogyakarta selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dicermati bahwa tingkat partisipasi murni perempuan mulai mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun pada jenjang SD dan SLTP, partisipasi murni perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Pada tahun 2012 APM perempuan pada tingkat SD termasuk Paket A lebih rendah 6,73% dibanding laki-laki, tingkat SMP termasuk paket B, APM perempuan lebih rendah 2,49% dibandingkan laki-laki. Kenaikan partisipasi murni perempuan lebih tinggi 0,41% pada tingkat SMA. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, APM perempuan tahun

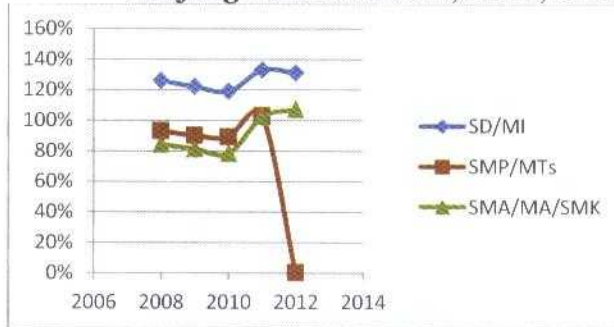
2012 pada tingkat SD mengalami penurunan 0,87% dibanding APM laki-laki. Sedangkan APM perempuan tingkat SMP meningkat signifikan 4,67%.

Tabel 4. 3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA

KECAMATAN		Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan					
No	(1)	(2)		(3)		(4)	
		APK SD Termasuk Paket A		APK SMP Termasuk Paket B		APK SMA Termasuk Paket C	
		L	P	L	P	L	P
1	Tegalrejo	137,51	126,58	45,31	53,33	77,49	75,4
2	Jetis	215,1	199,2	166,55	142,55	433,71	176,98
3	Gondokusuman	595,36	500,23	431,68	435,16	394,07	490,3
4	Danurejan	84,38	84,58	141,76	145,62	11,55	19,15
5	Gedongtengen	118,55	91,05	152,83	138,39	11,38	90,93
6	Ngampilan	182,92	145,18	157,34	233,09	77,63	141,18
7	Wirobrajan	211,86	184,41	214,23	78,73	228,99	155,62
8	Mantrijeron	89,86	75,52	66,25	41,82	43,82	55,61
9	Kraton	78,64	78,8	59,22	55,04	4,65	0
10	Gondomanan	324,16	298,13	177,95	225,87	190,72	266,2
11	Pakualaman	65,16	56,41	46,35	31,9	0	0
12	Mergangsan	49,45	43,32	21,72	16,37	24,05	10,21
13	Umbulharjo	258,6	232,54	177,36	175,59	301,26	330,36
14	Kotagede	101,93	80,33	58,9	50,51	34,02	36,71
	2012	2513,48	2196,28	1917,45	1823,97	1833,34	1848,65
	2011	1726,33	1627,99	1268,14	1180,38	911,67	715,08
	2010	1847,3	1576,88	1457,04	1344,69	1183,65	1031,09

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Grafik 4. 2. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

4.4. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA

Angka putus sekolah (APS) merupakan kejadian dimana kondisi anak usia sekolah tidak mampu meneruskan pendidikan yang tersedia berdasarkan usianya. Sesuai data pada Tabel 4.5, Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD dan SLTP di Kota Yogyakarta tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010. Namun pada tingkat SLTA justru mengalami kenaikan signifikan sebesar 319 siswa putus sekolah. Pada tingkat SD Angka Putus Sekolah laki-laki sebesar 10 orang, lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 5 orang. Begitu juga pada tingkat SMP Angka Putus Sekolah laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan dengan perbandingan 6 : 5. Kondisi ini juga terjadi pada tingkat SLTA, APS perempuan lebih rendah 126 orang dibanding APS laki-laki.

Selama lima tahun terakhir terlihat bahwa Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta, rata-rata lebih tinggi pada kelompok laki-laki dibandingkan dengan perempuan pada hampir seluruh tingkat pendidikan. Kondisi yang perlu diperhatikan adalah naiknya tingkat Angka Putus Sekolah baik laki-laki dan perempuan pada tingkat SMA dan SMK yang sangat signifikan.

Terdapat gejala yang menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikannya maka angka putus sekolah selama lima tahun terakhir semakin besar. Pada jenjang SMA meningkat 52% dan pada jenjang SMK meningkat 86% angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan kondisi tiga tahun terakhir. Kenaikan tersebut bersumber dari naiknya Angka Putus Sekolah laki-laki dan perempuan tingkat SMA/SMK di 8 Kecamatan di Kota Yogyakarta. Secara berurutan Kecamatan Umbulharjo, APS laki-laki mencapai (160) kasus dibanding perempuan (81 kasus), Kecamatan Jetis APS Laki-laki (73 kasus) dan perempuan (6 kasus), Kecamatan Gondokusuman APS laki-laki (23 kasus) dan Perempuan (12 kasus) serta Kecamatan Mergangsan APS laki-laki lebih tinggi 1 kasus dibanding perempuan. Sedangkan APS perempuan lebih tinggi (20 kasus) di Kecamatan Mantrijeron. Pada Kecamatan Tegalrejo APS perempuan juga lebih tinggi (2 kasus) dibanding laki-laki. Pada ke-enam kecamatan tersebut tentunya diperlukan program spesifik seperti pemberian beasiswa kepada siswa miskin berprestasi dan peningkatan anggaran pendidikan (dana BOS) secara lebih terfokus pada pengurangan kesenjangan kebutuhan pendidikan dan peningkatan *life skill* siswa.

Tabel 4.4. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA

KECAMATAN		PUTUS SEKOLAH 2010-2012									
No		SD		MI		SD + MI		SMP		MTS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Jetis	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0
3	Gondokusuman	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
4	Danurejan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ngampilan	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
7	Wirobrajan	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0
8	Mantrijeron	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
9	Kraton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gondomanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pakualaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mergangsan	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
13	Umbulharjo	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0
14	Kotagede	3	0	0	0	3	0	0	0	0	1
	2011	10	5	0	0	10	5	6	4	0	1
	2010	8	10	0	0	8	10	10	7	0	0
	2009	10	3	0	0	10	3	18	5	2	0

KECAMATAN		PUTUS SEKOLAH 2010-2012									
No		SMP + MTS		SMA		SMK		MA		SMA + SMK + MA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tegalrejo	1	0	2	4	0	0	0	0	2	4
2	Jetis	0	0	1	0	72	6	0	0	73	6
3	Gondokusuman	3	2	22	12	1	0	0	0	23	12
4	Danurejan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ngampilan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
8	Mantrijeron	0	0	0	4	0	16		0	0	20
9	Kraton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gondomanan	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
11	Pakualaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mergangsan	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1
13	Umbulharjo	0	2	0	1	160	80	0	0	160	81
14	Kotagede	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	6	5	28	22	234	104	0	0	262	126
	2010	10	7	11	13	43	2	0	0	54	15
	2009	20	5	6	6	30	17	0	1	36	24

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

4.5. Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pada tahun 2012, data pilah penduduk menurut jenis pendidikan yang ditamatkan belum tersedia. Namun demikian secara umum dapat diamati bahwa penduduk yang tidak/belum tamat SD meningkat 8.582 dibanding tahun 2011 (45.670), sedangkan penduduk yang tamat SD/MI (turun 18.119), tamat SLTP/MTs (turun 8.575), Tamat SLTA

(SMU, SMA, MA) (turun 26.042), Tamat Akademi (D1/D2) (turun 1.550), Tamat DIII/Sarjana Muda (turun 214). Penurunan tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kelulusan pada jenjang Tamat Sarjana yang mencapai 6.524. Jumlah penduduk yang lulus pendidikan sarjana pada tahun 2012 merupakan capaian tertinggi selama 3 tahun terakhir.

Tabel 4.5. Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

TAHUN		Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan								
No	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak/ belum tamat SD	Tamat SD/MI	Tamat SLTP/ MTs	Tamat SLTA (SMU, SMA, MA)	Tamat Akademi (D1/D2)	Tamat DIII/ Sarjana Muda	Tamat Sarjana	Tidak Terjawab
				L + P	L + P	L + P	L + P	L + P	L + P	L + P
1	2012	0	54.252	52.076	58.410	149.660	3.886	19.004	51.338	0
2	2011	0	45.670	70.195	66.985	175.702	5.436	19.218	44.814	0
3	2010	0	45.670	70.195	66.985	175.702	5.436	19.218	44.814	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

4.6. Jumlah Peserta Paket A,B dan C

Pada tahun 2012, jumlah peserta paket A, B, C pada tiap jenjang pendidikan cukup tinggi. Jumlah peserta paket A sebanyak 51 orang, Paket B 288 orang dan paket C sebanyak 536 orang. Apabila dibandingkan peserta laki-laki dan perempuan terlihat gap yang cukup besar, hal tersebut terbukti dengan jumlah peserta perempuan yang selalu lebih rendah dalam semua jenjang paket A, B maupun C. Pada

paket A peserta perempuan lebih rendah 49,02%, Paket B lebih rendah 52,78% dan Paket C lebih rendah 29,85% dibanding jumlah laki-laki.

Tabel 4.6.1 Jumlah Peserta Paket A,B, dan C

KECAMATAN		Jumlah Peserta Paket A,B, dan C								
No	(1)	(2)			(3)			(4)		
		Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Tegalrejo	10	1	11	22	5	27	76	31	107
2	Jetis	2	3	5	17	4	21	44	21	65
3	Gondokusuman	10	5	15	40	9	49	24	20	44
4	Danurejan			0	10	5	15	51	24	75
5	Gedongtengen			0	15	2	17	15	10	25
6	Ngampilan			0	13	8	21	30	8	38
7	Wirobrajan			0			0			0
8	Mantrijeron			0	19	6	25			0
9	Kraton			0			0	15	18	33
10	Gondomanan			0	15	10	25	22	18	40
11	Pakualaman			0	18	8	26			0
12	Mergangsan			0			0	43	14	57
13	Umbulharjo	16	4	20	31	9	40	28	24	52
14	Kotagede			0	20	2	22			0
	Jumlah 2012	38	13	51	220	68	288	348	188	536

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Data kelulusan peserta kejar Paket A, B, dan C pada tahun 2012 nampak pada tabel di bawah ini. Untuk kejar paket A berjumlah 44 orang, paket B 254 orang dan paket C 484 orang. Jumlah kelulusan peserta perempuan di bawah laki-laki. Ini mengindikasikan dua hal. Pertama, partisipasi

perempuan dalam program tersebut memang rendah. Kedua, terdapat kemungkinan bahwa perempuan yang menjadi warga belajar berhenti di tengah jalan. Kecamatan yang memiliki lulusan kejar paket terbanyak adalah Kecamatan Tegalarjo (144 peserta).

Tabel 4.6.2 Jumlah Kelulusan Paket A,B, dan C

KECAMATAN		Jumlah Keulusan Paket A,B, dan C								
	(1)	(2)			(3)			(4)		
		Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Tegalarjo	9	1	10	20	4	24	81	29	110
2	Jetis	2	3	5	17	4	21	45	22	67
3	Gondokusuman	8	4	12	35	7	42	20	19	39
4	Danurejan			0	10	5	15	42	22	64
5	Gedongtengen			0	15	2	17	15	10	25
6	Ngampilan			0	10	5	15	26	6	32
7	Wirobrajan			0			0			0
8	Mantrijeron			0	18	5	23			0
9	Kraton			0			0	13	7	20
10	Gondomanan			0	9	4	13	22	7	29
11	Pakualaman			0	18	8	26			0
12	Mergangsan			0			0	39	12	51
13	Umbulharjo	15	2	17	27	6	33	25	22	47
14	Kotagede			0	20	5	25			0
	Jumlah 2012	34	10	44	199	55	254	328	156	484

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Tabel 4.6.3. Jumlah Lembaga Kesetaraan dan PAUD

Tahun	Lembaga Kesetaraan			PAUD		
	Paket A	Paket B	Paket C	TPA	KB	SPS
2012	77	623	1.034	1.114	2.146	15.195
2011	41	168	430	826	1.424	21.623
2010	37	498	561	723	1.209	20.716
2009	37	498	561	723	1.209	20.716
2008	36	272	135	690	1.097	19.098

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

4.7 Jumlah Guru (Negeri/Swasta)

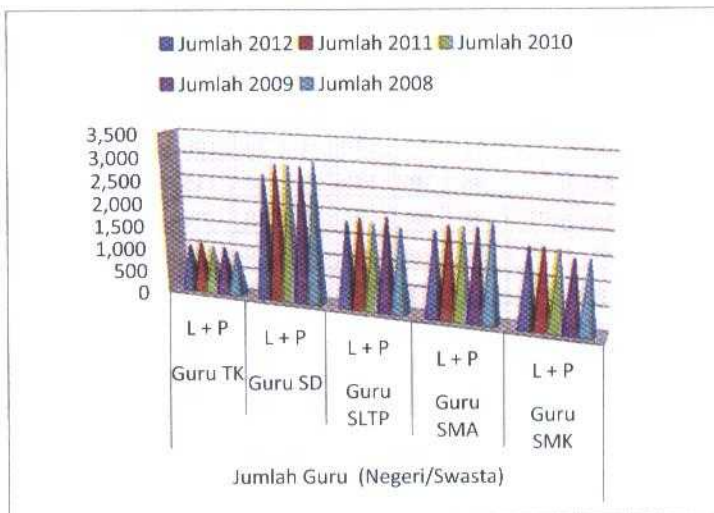
Tabel 4.7 Jumlah Guru (Negeri/Swasta)

KECAMATAN		Jumlah Guru (Negeri/Swasta)								
No	(1)	(3)			(4)			(5)		
		Guru SD			Guru SLTP			Guru SLTA		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Tegalrejo	77	151	228	42	64	106	100	119	219
2	Jetis	83	217	300	71	90	161	324	260	584
3	Gondokusuman	152	280	432	139	233	372	264	290	554
4	Danurejan	33	72	105	48	86	134	20	17	37
5	Gedongtengen	31	63	94	44	66	110	50	58	108
6	Ngampilan	41	69	110	38	70	108	75	106	181
7	Wirobrajan	48	102	150	79	36	115	125	73	198
8	Mantrijeron	41	94	135	31	48	79	69	99	168
9	Kraton	56	96	152	29	39	68	9	6	15
10	Gondomanan	36	76	112	15	26	41	68	95	163
11	Pakualaman	12	43	55	15	11	26			0
12	Mergangsan	63	107	170	32	58	90	58	85	143
13	Umbulharjo	128	300	428	124	178	302	371	491	862
14	Kotagede	60	159	219	67	55	122	88	79	167
	Jumlah 2012	861	1829	2690	774	1060	1834	1621	1778	3399
	Jumlah 2011									

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Tabel guru pada tahun 2012 menunjukkan jumlah guru SLTA lebih tinggi dibanding jumlah guru SD dan SLTP. Penyebabnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas guru sekolah merupakan guru mata pelajaran sehingga jumlah guru cenderung lebih banyak. Jumlah total guru SD berjumlah 2.690 orang, guru SLTP 1.834 orang dan guru SLTA 3.399 orang. Secara garis besar ketersediaan sumberdaya guru di Kota Yogyakarta paling banyak adalah guru perempuan. Jumlah guru perempuan di Kota Yogyakarta pada tingkat SMP dan SLTA lebih besar dibanding guru laki-laki seperti tergambar dalam grafik di bawah ini :

Grafik 4.3. Jumlah Guru Negeri dan Swasta



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

4.8. Sertifikasi Guru (Negeri/Swasta)

Tabel 4.8.1 Sertifikasi Guru (Negeri/Swasta)

Tahun	Jumlah Guru (Negeri/Swasta) Yang Memperoleh Sertifikasi				
				(2)	(3)
(1)	Guru TK	Guru SD	Guru SLTP	Guru SMA	Guru SMK
	L + P	L + P	L + P	L + P	L + P
Jumlah 2012	507	1.618	1.047	1.033	985
Jumlah 2011	387	1.475	971	978	916
Jumlah 2010	296	1.278	877	897	821
Jumlah 2009	162	909	735	770	644
Jumlah 2008	88	440	384	454	311

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Ketersediaan tenaga didik atau guru yang berkualitas baik di sekolah negeri maupun swasta akan sangat memperlancar proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Guru merupakan ujung tombak dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Selama 5 tahun terakhir jumlah guru yang tersertifikasi di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Namun tidak terdapat data pilah gender terkait penerima sertifikasi guru sepanjang periode tersebut.

**Tabel 4.8.2. Persentase Sertifikasi Guru
(Negeri/Swasta) 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Jumlah Guru (Negeri/Swasta) Yang Memperoleh Sertifikasi			
		Guru SD	Guru SLTP	Guru SMA	Guru SMK
		L + P	L + P	L + P	L + P
1	Jumlah 2012	0,013	0,030	0,050	
2	Jumlah 2011	0,019	0,030	0,040	
3	Jumlah 2010	0,020	0,050	0,070	
4	Jumlah 2009	0,020	0,010	0,090	
5	Jumlah 2008	0,070	0,330	0,450	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

4.9. Jumlah Penerima Beasiswa SLTP dan SLTA

Ketersediaan beasiswa baik itu beasiswa prestasi maupun beasiswa bagi siswa kurang mampu akan sangat membantu siswa dalam meringankan beban biaya pendidikan dan menjamin keberlangsungan pendidikan siswa sampai jenjang pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka biaya pendidikanpun semakin mahal dan harus diimbangi dengan peningkatan kuota beasiswa yang diberikan. Tahun 2012 total beasiswa yang diberikan bagi siswa SLTP dan SLTA di Kota Yogyakarta mencapai 452 beasiswa, dengan rincian 179 untuk tingkat SLTP dan 273 untuk tingkat SLTA. Baik pada tingkat SLTP maupun SLTA jumlah beasiswa yang diberikan lebih banyak untuk siswa perempuan.

Tabel 4.9. Jumlah Penerima Beasiswa SLTP dan SLTA

KECAMATAN		Jumlah Penerima Beasiswa SLTP dan SLTA						L + P
	(1)	(2)			(3)			
		SLTP			SLTA			
		L	P	L + P	L	P	L + P	
1	Tegalrejo	8	8	16	5	20	25	41
2	Jetis	6	6	12	7	15	22	34
3	Gondokusuman	6	12	18	13	12	25	43
4	Danurejan	7	5	12	4	12	16	28
5	Gedongtengen	2	6	8	9	5	14	22
6	Ngampilan	7	1	8	8	7	15	23
7	Wirobrajan	6	6	12	4	15	19	31
8	Mantrijeron	5	7	12	9	12	21	33
9	Kraton	6	6	12	3	12	15	27
10	Gondomanan	3	6	9	3	8	11	20
11	Pakualaman	4	4	8	5	8	13	21
12	Mergangsan	5	7	12	8	10	18	30
13	Umbulharjo	12	16	28	14	30	44	72
14	Kotagede	6	6	12	7	8	15	27
	Jumlah 2012	83	96	179	99	174	273	452
	Jumlah 2011							

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Jumlah perempuan penerima beasiswa di jenjang SLTP dan SLTA lebih banyak dibanding siswa laki-laki, yang menunjukkan langkah afirmatif pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus mendorong program pendidikan untuk semua (education for all), mengingat di sektor ini perempuan masih relatif tertinggal dibanding laki-laki.

4.10. Jumlah Siswa Berprestasi

Prestasi akademik yang diperoleh seorang siswa seringkali identik dengan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah atau suatu daerah meskipun hal tersebut sebenarnya tidak mutlak untuk menjamin keberhasilan siswa dimasa yang akan datang. Namun demikian hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator dalam penilaian dibidang pendidikan.

Tabel 4.10.1. Jumlah Siswa Berprestasi Bidang Akademik

KECAMATAN		Jumlah Siswa Berprestasi								
No	(1)	(2)			(3)			(4)		
		SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Tegalrejo			0	0	0	0			
2	Jetis	1		1	2	1	3			
3	Gondokusuman	2	1	3	3	1	4			
4	Danurejan	1	1	2	1		1			
5	Gedongtengen			0			0			
6	Ngampilan			0			0			
7	Wirobrajan			0			0			
8	Mantrijeron			0			0			
9	Kraton			0			0			
10	Gondomanan			0	1		1			
11	Pakualaman			0			0			
12	Mergangsan			0	1		1			
13	Umbulharjo			0	1	1	2			
14	Kotagede			0			0			
	Jumlah 2012	4	2	6	9	3	12	12	12	24

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Tahun 2012, prestasi siswa Kota Yogyakarta dibidang pendidikan selalu meningkat dalam tiap jenjang pendidikan. Jumlah prestasi yang dapat diraih siswa SD sebanyak 6 prestasi, yang lebih didominasi oleh siswa laki-laki (4 prestasi oleh siswa laki-laki dan 2 prestasi oleh siswa perempuan). Pada jenjang SLTP justru menunjukkan kondisi yang berbeda dibanding tingkat SD. Dari 12 prestasi yang diperoleh siswa 9 prestasi didapat siswa perempuan dan sisanya 3 prestasi diperoleh siswa laki-laki. Kondisi seimbang perolehan prestasi siswa laki-laki dan perempuan terjadi pada tingkat SLTA dengan total 24 prestasi. Siswa di Kecamatan Gondokusuman paling banyak memperoleh prestasi (7 prestasi, selanjutnya Kecamatan Jetis (4 prestasi), Kecamatan Danurejan (3 prestasi), Kecamatan Umbulharjo (2 prestasi), Kecamatan Gondomanan dan Mergangsan masing-masing 1 prestasi dan lainnya tidak mendapat prestasi.

Tabel 4.10.2 Jumlah Siswa Berprestasi Bidang Seni

Tahun	Jumlah Siswa Berprestasi Bidang seni								
	(2)			(3)			(4)		
(1)	SD			SLTP			SLTA		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Jumlah 2012	1	1	2	6	20	26	15	15	30

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Peningkatan prestasi siswa di bidang seni di Kota Yogyakarta harus ditingkatkan lagi baik melalui peningkatan ekstrakurikuler bidang seni di sekolah maupun meningkatkan event kompetisi di bidang seni khususnya pada tingkat sekolah dasar. Berdasarkan data Dinas pendidikan Kota Yogyakarta, pada tahun 2012 prestasi bidang seni tingkat SD sangat minim, hanya 2 prestasi yang dapat diukir siswa Kota Yogyakarta. Sedangkan pada tingkat SLTP dan SLTA jumlahnya melampaui tingkat SD. Pada tingkat SLTP berjumlah 26 prestasi yang 70% dari prestasi tersebut diperoleh siswa perempuan. Sedangkan pada tingkat SLTA jumlah siswa laki-laki dan perempuan memiliki persentase prestasi yang sama masing-masing 50% dari total 30 prestasi yang dapat diraih siswa.

Tabel 4.10.3 Jumlah Siswa Berprestasi Bidang Olah Raga

Tahun	Jumlah Siswa Berprestasi Bidang olah Raga								
	(2)			(3)			(4)		
(1)	SD			SLTP			SLTA		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Jumlah 2012	99	64	163	49	65	114	33	33	66

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012

Menurut data tahun 2012 dapat diamati bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan justru prestasi olahraganya mengalami penurunan. Secara keseluruhan pada tingkat SD jumlah siswa yang berprestasi di bidang olahraga

adalah 163 siswa, pada tingkat SLTP berjumlah 114 siswa dan pada tingkat SLTA 66 siswa. Prestasi olahraga tertinggi pada tingkat SD yang didominasi oleh siswa laki-laki sejumlah 99 siswa sedangkan pada tingkat SLTP didominasi siswa perempuan (65 siswa). Pada tingkat SLTA, siswa laki-laki dan perempuan yang berprestasi dibidang olahraga jumlahnya seimbang.



BAB V. PROFIL GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN

BAB V

PROFIL GENDER

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan. Hal ini dikarenakan, ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan bagi penduduknya. Ketenagakerjaan Undang-undang mengatur pemerataan dan sikap non-diskriminasi bagi laki-laki dan perempuan. Namun, tidak dipungkiri, dalam realitasnya, permasalahan mengenai ketenagakerjaan masih umum dijumpai dalam kehidupan. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tenaga kerja perempuan dan laki-laki meliputi beberapa hal berikut : pendidikan, jam kerja, dan upah (Fatimaningsih, 2008).

Pendidikan berkaitan erat dengan kualitas dan keterampilan dari pekerja yang diharapkan mampu menghasilkan produktivitas terhadap kinerja dan karya, sedangkan jam kerja berkaitan dengan frekuensi kerja berdasarkan jumlah jam yang telah disepakati bersama dan masalah upah sebagai bentuk timbal balik terhadap usaha dan jasa yang telah diberikan oleh pekerja. Disisi lain, ketenagakerjaan bagi perempuan seringkali menemui

ketimpangan, permasalahan tersebut mengacu pada minimnya keterlibatan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diterima oleh perempuan.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 5.1.1 Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Kota Yogyakarta Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2008			2009		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	SD						
2	SLTP	82,63	61,76	70,00	70,32	68,77	69,39
3	SMTA	67,66	55,57	61,98	71,93	56,80	64,58
4	Diploma I/II/III/Akademi/Universitas	71,86	54,50	63,56	67,98	53,36	61,04
5	TPAK	88,94	83,18	86,05	88,37	78,14	83,42
Jumlah		74,89	60,32	67,50	73,64	61,88	67,68

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2010			2011			2012		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	SD									
2	SLTP	73,42	63,28	67,87	75,71	66,13	70,77	76,05	68,03	71,54
3	SMTA	69,26	53,84	61,36	71,83	50,22	60,87	65,83	48,69	56,35
4	Diploma I/II/III/Akademi/Universitas	72,17	53,26	62,73	75,57	54,82	65,12	78,25	57,80	68,96
5	TPAK	89,00	75,14	82,05	90,25	75,71	83,47	85,58	66,11	75,54
Jumlah		74,54	58,89	66,38	78,08	59,20	68,26	76,88	57,88	66,97

Sumber : Sakernas, Agustus 2008-2012

Salah satu instrumen penting untuk mengukur kemajuan perempuan di sektor ekonomi adalah melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan gambaran jumlah angkatan kerja dalam periode waktu tertentu yang melibatkan penduduk usia produktif. Pada tabel 5.1 diatas, secara umum dapat diamati TPAK perempuan setiap tahunnya lebih rendah dibanding laki-laki, dihampir semua jenjang pendidikan. Tertinggalnya partisipasi perempuan mengindikasikan akses dan kontrol perempuan terhadap lapangan pekerjaan tidak sama dengan laki-laki. Situasi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai factor diantaranya faktor budaya, produk peraturan yang kurang berpihak pada perempuan serta sebab yang bersifat struktural yang pada akhirnya bermuara pada tingginya angka disparitas gender.

Disparitas gender dalam bidang ketenagakerjaan, juga terjadi di Kota Yogyakarta, sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1.2 Prosentase Angkatan Kerja & Disparitas Gender

% Angkatan Kerja	Th 2008	Th 2009	Th 2010	Th 2011	Th 2012
Laki-laki	88,94	88,18	89	90,27	85,58
Perempuan	83,18	78,14	75,14	75,71	66,11
Disparitas Gender	-5,76	-10,04	-13,85	-14,56	-19,47

Sumber : Dinsosnakertrans,2012

Diparitas gender menunjukkan angka negatif di sepanjang tahun 2008-2012. Ini menandakan posisi perempuan tertinggal jika dibanding laki-laki dalam hal angkatan kerja. Peningkatan TPAK bagi kaum perempuan dapat dilakukan dengan semakin memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan mengakses pendidikan. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan berpengaruh kuat dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.

5.2 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta

Berdasarkan data wajib lapor UU No 7 Tahun 1981 berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dapat dicermati perkembangan jumlah tenaga kerja di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 5.2. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Tenaga Kerja			
		WNI		WNA	
		L	P	L	P
1	Pertanian, Peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan	63	29	0	0
2	Pertambangan dan penggalian	117	50	0	0
3	Industri pengolahan	4218	2507	96	26
4	Listrik, gas dan air	15	2	0	0
5	Bangunan	872	108	0	0
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan Hotel	11867	6257	17	11
7	Angkutan, pergudangan dan Komunikasi	907	226	1	0
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, tanah dan jasa	4680	2768	0	0
9	Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan	4176	4981	33	11
10	Lain-lain	0	0	0	0
	Jumlah 2012	26915	16928	147	48

Sumber : Dinsosnakertrans, 2012

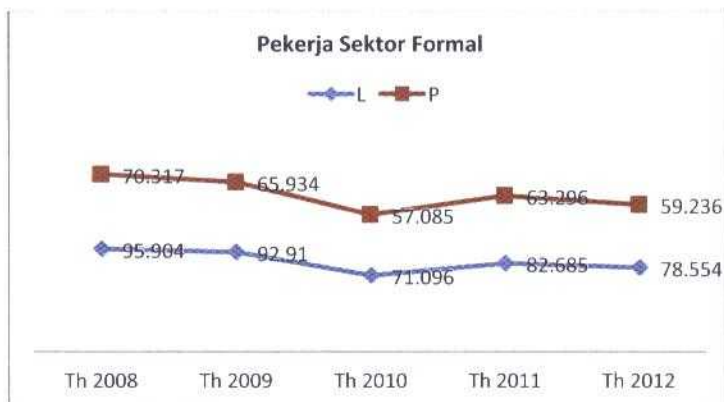
Data pilah mengenai sebaran tenaga kerja dalam berbagai sektor di Kota Yogyakarta terangkum dalam tabel di atas. Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) terbagi ke dalam beberapa bidang, diantaranya sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan serta perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan,

angkutan pergudangan, keuangan jasa asuransi dan jasa kemasyarakatan.

Dari bermacam kategori pekerjaan tersebut, usaha di sektor informal yang meliputi perdagangan besar, eceran, rumah makan serta hotel merupakan sektor paling banyak diterjuni oleh penduduk Kota Yogyakarta. Tercatat sebanyak 11.867 penduduk laki-laki terkonsentrasi di bidang ini, sementara penduduk perempuan sebanyak 6.257. Tabel 5.2 di atas juga memperlihatkan bahwa distribusi pekerja di sektor listrik, gas dan air paling rendah diantara bidang-bidang kerja yang lain. Pada tahun 2012, tidak lebih dari 15 penduduk laki-laki dan 2 penduduk perempuan bekerja di area tersebut.

5.3 Pekerja di Sektor Formal

Grafik 5.1. Jumlah Pekerja di Sektor Formal



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2008-2012

Pergerakan jumlah tenaga kerja di sektor formal selama lima tahun cenderung menurun. Pada tahun 2008, partisipasi pekerja perempuan sebanyak 70.317 orang, selang lima tahun kemudian turun menjadi 59.236, atau sebanyak 15,75%. Fenomena serupa juga terjadi pada tenaga kerja laki-laki, di tahun 2008 sebanyak 95.904 laki-laki memasuki dunia kerja formal, angka tersebut kemudian turun menjadi 78.554 orang di tahun 2012, atau penurunan sebesar 18,09%. Dalam periode lima tahun tersebut, jumlah penurunan tenaga kerja laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

5.4 Pekerja di Sektor Informal

Grafik 5.2. Jumlah Pekerja di Sektor Informal



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2008-2012

Tren sepanjang tahun 2008-2012 menunjukkan pergerakan yang berbanding terbalik antara pekerja laki-laki dan perempuan. Prosentase pekerja perempuan di bidang informal mengalami penurunan sebanyak 11,69% sedangkan laki-laki justru mengalami kenaikan 3,3%.

Namun, grafik di atas juga menggambarkan bahwa jumlah pekerja perempuan yang terserap di sektor informal lebih banyak di banding laki-laki setiap tahunnya. Sektor informal seperti Usaha Kecil dan Mikro merupakan area yang paling banyak diminati oleh kaum perempuan karena dipandang mampu menjadi penyangga (*buffer*) bagi ekonomi rumah tangga. Sulitnya menembus bursa kerja di sektor formal menjadi faktor pendorong masuknya kaum perempuan ke dalam usaha informal sebagai lahan alternatif untuk dapat mempertahankan hidup.

Kegiatan ekonomi ini banyak diminati perempuan karena jenis produk yang dihasilkan relatif sederhana dan tidak memerlukan suatu keahlian khusus. Angka keterlibatan perempuan dalam industri ini, boleh jadi lebih besar dari data yang terhimpun, mengingat usaha-usaha yang dijalankan perempuan biasanya bersifat informal serta tidak berbadan hukum sehingga kurang terpublikasikan secara luas. Minimnya publikasi terhadap usaha yang digeluti perempuan berdampak terhadap sulitnya langkah untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan riil yang mereka hadapi

sehingga menyulitkan upaya untuk menangani secara tepat permasalahan-permasalahan yang ada.

Secara karakteristik, persoalan yang dihadapi oleh perempuan pengusaha mikro berbeda dengan laki-laki pengusaha mikro. Firdaus (2005) menyebutkan bahwa perempuan pengusaha mikro dalam menjalankan usahanya harus berhadapan dengan dua persoalan mendasar yaitu problem teknis usaha dan problem struktural. Dalam problem teknis usaha, perempuan pengusaha mikro mengalami hambatan yang tidak berbeda dengan laki-laki pengusaha mikro, seperti kekurangan modal, keterbatasan kontrol teknologi tepat guna, terbatasnya jaringan pasar, keterampilan manajemen, keterampilan teknis produksi dan kemampuan pengembangan desain.

Sedangkan pada problem struktural perempuan harus menghadapi dua persoalan sekaligus. *Pertama* adalah problem yang menyangkut kebijakan pemerintah seperti peraturan yang tidak adil mengenai sertifikasi kelayakan produk baik di pusat maupun daerah, peraturan kelembagaan seperti perbankan yang memberi layanan kredit dan ketidaksetaraan relasi dalam rantai produksi maupun perdagangan. *Kedua* adalah persoalan yang berkaitan dengan "tubuh perempuan", yaitu perempuan sulit untuk pengembangan usahanya akibat adanya ketimpangan relasi gender. Ketidaksetaraan relasi tersebut memunculkan

perbedaan jenis sumber daya yang boleh dan tidak boleh diakses oleh perempuan.

5.5 Data Angkatan Kerja

Tabel 5.3. Jumlah Angkatan Kerja

No	Kecamatan	Jumlah Angkatan Kerja Tingkat Angkatan Kerja/AK Kota Yogyakarta			
		Penganggur		Bekerja	
		L	P	L	P
1	Tegalrejo	849	1059	8681	6872
2	Jetis	491	646	5099	4414
3	Gondokusuman	834	1267	10319	10192
4	Danurejan	615	650	4697	3760
5	GedongTengen	478	594	3635	3064
6	Ngampilan	350	364	2867	2548
7	Wirobrajan	518	573	5869	5255
8	Mantrijeron	959	989	6132	5397
9	Kraton	439	459	4341	4143
10	Gondomanan	257	211	3783	2416
11	Pakualaman	260	268	1861	1740
12	Mergangsan	400	580	6068	4945
13	Umbulharjo	915	869	11054	10187
14	Kotagede	599	724	5258	4592
	Jumlah 2012	7964	9253	79664	69525
	Jumlah 2011	18241		195445	
	Jumlah 2010	179882		21653	
	Jumlah 2009	208223		31222	
	Jumlah 2008	218911		37253	

Sumber : Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

Secara umum, gambaran penangguran yang terjadi di Kota Yogyakarta dapat diamati pada tabel 5.5. Dalam rentang waktu lima tahun, jumlah pengangguran menunjukkan penurunan. Pada tahun 2008, jumlah pengangguran sebanyak 21.891 jiwa dan turun menjadi 17.217 di tahun 2012, atau mengalami penurunan 9,2%. Tentu ini merupakan gejala baik, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir. Data pilah pengangguran di tahun 2012 menunjukan bahwa secara total angka pengangguran di kalangan perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Penduduk laki-laki yang tercatat belum memiliki pekerjaan tetap, paling banyak ditemukan di Kecamatan Mantrijeron, sebanyak 959 orang dan terendah di Kecamatan Gondomanan sebanyak 257 orang. Sementara itu pengangguran perempuan tertinggi berada di Kecamatan Gondokusuman sebanyak 1267 orang dan terendah di Kecamatan Gondomanan yakni 211 orang.

Untuk mengatasi angka pengangguran di Kota Yogyakarta, terutama di kecamatan-kecamatan rawan diperlukan berbagai program stimulus baik untuk laki-laki maupun perempuan seperti: program pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, serta program peningkatan akses dan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja.

5.6 Keanggotaan Koperasi

Tabel 5.4. Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan Koperasi Th 2012		
Jenis Koperasi	Jenis Kelamin	
	L	P
ABRI	2115	1355
Angkutan	131	52
Konpen, Konpikra	678	776
KUD	865	759
Kopkar (S &D)	2256	1128
KSU	3183	3083
Kopkar BUMN	874	147
KPN	8460	5493
Kopkar Swasta	642	926
Kapotren, Koppas	513	917
PKL, Ternak	917	606
Kopwan	0	1958
Total	20.634	17.200

Sumber : Desperindagkop Kota Yogyakarta, 2013

Dari berbagai macam koperasi, tampak bahwa jumlah partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi masih lebih rendah ketimbang laki-laki. Tercatat, di tahun 2012 penduduk laki-laki di Kota Yogyakarta yang menjadi anggota koperasi sebanyak 20.634 orang, sedangkan perempuan sebanyak 17.200 orang. Di hampir semua jenis koperasi anggota laki-laki lebih banyak di banding perempuan kecuali pada Kopwan, dimana 100% anggotanya adalah perempuan. Partisipasi perempuan dalam koperasi di Kota Yogyakarta masih perlu untuk terus di dorong, karena koperasi

merupakan lembaga keuangan mikro yang paling ideal untuk memberdayakan perempuan, terutama perempuan miskin baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan.

Untuk memberdayakan perempuan, paling tidak ada lima dimensi yang harus dipenuhi yakni : kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol. Apapun bentuk dan upaya pemberdayaan, kelima hal diatas menjadi pilar utama yang tidak bisa ditinggalkan. Jika menilik lima prinsip pemberdayaan tersebut, maka pengembangan lembaga keuangan mikro dengan prinsip koperasi sebagai wadah sekaligus pintu masuk pemberdayaan perempuan miskin adalah pilihan strategis yang paling memungkinkan. Sebab, koperasi memiliki karakteristik serta prinsip ekonomi dan sosial yang memungkinkan kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat tercakup secara utuh. Yang jauh lebih penting adalah, melalui koperasi, perempuan dapat berkiprah tanpa harus banyak terhambat oleh ideologi patriaki yang kurang menguntungkan mereka. Sebab, dalam koperasi tidak mengenal diskriminasi gender, sosial, politik, ekonomi, adat, budaya, hukum dan agama.

5.7 Penduduk Kota Yogyakarta Berusia >15 Tahun Yang Bekerja Sebagai Pekerja Keluarga Tidak Dibayar

Grafik 5.3 Penduduk Kota Yogyakarta Berusia >15 Tahun Yang Bekerja Sebagai Pekerja Keluarga Tidak Dibayar



Sumber : BPS Sakernas 2008-2012

Angka *Unpaid worker* dikalangan perempuan jauh melampaui laki-laki. Secara total jumlah tenaga kerja perempuan yang tidak dibayar dalam rentang waktu 2008-2012 adalah 63.791 orang, sementara laki-laki 28.890 orang atau kurang dari separuh jumlah perempuan. Besarnya angka *unpaid worker* pada perempuan dipengaruhi faktor sosial, budaya dan ekonomi yang tidak sederhana. Konstruksi peran gender perempuan sebagai pekerja domestik turut memberi andil terhadap fenomena tersebut.

Kultur patriarkhis di Indonesia tidak hanya memilah laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin tetapi

juga peran dari masing-masing jenis kelamin. Peran gender laki-laki adalah di ruang publik dengan jenis pekerjaan produktif dan berbayar, sedangkan peran gender perempuan adalah pada wilayah domestik dengan pekerjaan reproduktif yang tidak berbayar. Pekerjaan reproduktif seperti memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak dan pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya dianggap tidak memiliki nilai ekonomis sehingga tidak mendapat upah.

Pekerja dalam keluarga juga termasuk kategori yang rentan terhadap persoalan ini. Menurut International Labour Organization (2013 : 23), pekerja keluarga dengan status tidak dibayar dikategorikan sebagai pekerja rentan. Artinya pekerja pada jenis pekerjaan ini tidak dapat menikmati fasilitas, kesempatan kerja serta regulasi ekonomi, rentan terhadap fluktuasi harga serta memiliki kesempatan dan akses yang sangat terbatas terhadap jual-beli.

5.8. Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial

Tabel 5.5. Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial

No	Tahun	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial		
		Tenaga Profesional, Teknisi dan Yang Sejenis	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	Total Perempuan dari Tenaga Profesional, Teknisi dan Yang Sejenis serta Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan
		P	P	
1	2012	5635	2208	7843
2	2011	8601	4407	13008
3	2010	8763	572	9335
4	2009	9338	1980	11318
5	2008	11661	1494	13155

Sumber : BPS,Sakernas 2009-2012

Perempuan pekerja profesional dan manajerial di Kota Yogyakarta dapat ditunjukkan pada tabel 5.9 diatas. Pekerjaan profesional dan manajerial yang digeluti oleh perempuan meliputi : tenaga profesional, teknisi, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan. Dari tabel 5.9 diperoleh gambaran bahwa jumlah perempuan yang bekerja di ranah profesional dan teknisi lebih tinggi bila dibandingkan perempuan yang bekerja sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan. Jumlah tertinggi tenaga perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional terjadi pada tahun 2008. Meski demikian, sejak 2009 hingga tahun 2012, jumlah perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional dan teknisi semakin menurun jumlahnya yakni sebesar 5.635. Sedangkan pada tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan,

angkanya mengalami pergerakan secara fluktuatif karena memang tidak mudah bagi perempuan untuk dapat menembus level pengambil keputusan (leader) dalam pekerjaan yang di gelutinya.

Selama ini, *leadership* sering dilekatkan sebagai atribut laki-laki. Sehingga tidak mengherankan jika pemegang kendali tertinggi pada berbagai pekerjaan adalah laki-laki. Meskipun representasi perempuan sebagai tenaga profesional cukup tinggi, namun akses terhadap tingkat pengambilan keputusan masih terbatas. Ungkapan “*Women still hitting glass ceiling*” merupakan gambaran betapa tidak mudah bagi perempuan untuk menduduki puncak karir dalam pekerjaannya.

5.9a Pekerja Menurut Lapangan Usaha

Tabel 5.6a Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	2008			2009		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	2071	953	3024	1908	729	2637
2	Industri Pengolahan	16340	9620	25960	14991	7618	22609
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	50884	56046	106930	54115	57408	111523
4	Jasa Kemasyarakatan	12433	8673	21106	8607	7903	16510
5	Lainnya	44742	31573	76315	47034	36663	83697
JUMLAH TOTAL		126470	106865	233335	126655	110321	236976

No	Lapangan Usaha	2010			2011			2012		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	827	0	827	693	369	1062	756	0	756
2	Industri Pengolahan	14563	8093	22602	15784	6411	22195	15010	8120	23130
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	39249	46492	85741	39962	48391	88353	43650	52035	95685
4	Jasa Kemasyarakatan	10601	10053	20654	27752	29345	57097	28146	25312	53458
5	Lainnya	36324	24991	61315	27370	6316	33686	22567	6044	28611
JUMLAH TOTAL		101564	89575	191139	111561	90832	202393	110129	91511	201640

Sumber : Sakernas Agustus 2008-2012

Pekerja menurut lapangan usaha, dibagi menjadi empat sector. Pertama meliputi : pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan hingga perikanan. Kedua, meliputi industri pengolahan. Ketiga meliputi sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel dan Keempat adalah jasa kemasyarakatan. Dalam periode 2008-2013, sektor pertama, kedua dan keempat jumlah pekerja laki-laki dominan dibanding perempuan. Sedangkan untuk sektor ketiga, yakni perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel pekerja perempuan lebih banyak di banding laki-laki sepanjang 5 tahun terakhir.

5.9b Pekerja Menurut Status Pekerjaan

Tabel 5.6.b Jumlah Pekerja Menurut Status Pekerjaan

NO	Tahun	Pekerja Menurut Lapangan Status Pekerjaan								
		Berusaha Sendiri			Berusaha dibantu (Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak dibayar)			Berusaha Dibantu (Buruh Tidak Tetap/Buruh dibayar)		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Jumlah 2012	20667	18961	39628	9177	9539	18716	4139	4420	8559
2	Jumlah 2011	20627	20321	40948	11066	11431	22497	5484	3243	8727
3	Jumlah 2010	24231	19733	43964	9157	8701	17858	9379	3637	13016
4	Jumlah 2009	27084	26139	53223	15075	11450	26525	12377	3230	15607
5	Jumlah 2008	26390	23424	49814	11873	12606	24479	12801	4422	17223

NO	Tahun	Pekerja Menurut Lapangan Status Pekerjaan											
		Buruh/Karyawan			Pekerja Bebas di Pertanian			Pekerja Bebas Di non Pertanian			Pekerja tak di bayar		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Jumlah 2012	64205	45277	109482	0	0	0	5775	1938	7713	6166	11376	17542
2	Jumlah 2011	64674	48622	113296	0	0	0	4593	369	4962	5171	6846	12017
3	Jumlah 2010	48645	43295	91940	168	0	168	2192	196	2388	7792	14013	21805
4	Jumlah 2009	65254	51503	116757	163	0	163	2567	1127	3694	4135	16872	21007
5	Jumlah 2008	68475	51574	120049	0	0	0	1305	155	1460	5626	14684	20310

Sumber : BPS, Sakernas 2009-2012

Status pekerjaan diklasifikasi ke dalam tujuh kelompok yakni : berusaha sendiri, buruh tidak tetap, buruh tetap, buruh atau karyawan, pekerja bebas non-pertanian hingga pekerja yang tidak dibayar. Jika diamati dari tahun ke tahun, jumlah laki-laki dengan status pekerjaan berusaha sendiri, buruh tidak tetap, buruh tetap, pekerjaan bebas non-pertanian dan karyawan lebih tinggi dibanding perempuan. Namun, pada pekerjaan yang tidak dibayar jumlah pekerja perempuan jauh melampaui laki-laki dalam tahun yang sama.

5.9c Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 5.6.c Jumlah Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan

No	Tahun	Tenaga Profesional, Teknisi, dan Yang Sejenis			Tenaga Kepemimpinan, Ketata Laksanaan			Tenaga Tata Usaha dan Yang Sejenis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2012	7751	5635	13386	4108	2208	6316	12718	10458	23176
2	2011	10088	8601	18689	5118	4407	9525	997	5789	15766
3	2010	13200	8763	21963	2829	572	3401	11169	11687	22856
4	2009	11995	9338	21333	9110	1980	11090	12313	14781	27094
5	2008	11783	11661	23444	3330	1494	4824	12442	11624	24066

No	Tahun	Tenaga Usaha Penjualan			Tenaga Usaha Jasa			Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan			Tenaga Produksi, Operator, alat-alat angkutan dan pekerja Kasar		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2012	31710	41886	73596	16466	18955	35421	756	0	756	36300	12369	8669
2	2011	30503	40026	70529	12308	22266	34574	693	369	1062	42579	9374	1953
3	2010	31581	37745	69326	11880	14822	26702	827	0	827	29521	15986	5507
4	2009	42934	48375	91309	17496	21963	39459	1908	729	2637	30631	13155	3786
5	2008	43035	46140	89175	18399	20389	38788	1662	953	2615	35199	14604	9803

Sumber : BPS, Sakernas 2009-2012

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pekerja laki-laki cenderung lebih banyak terserap sebagai tenaga profesional, teknisi, tenaga abdi, tenaga kepemimpinan, penjabat, tenaga usaha jasa, kebun, ternak, ikan, hutan, dan perburuan, tenaga produksi operasional, angkutan dan pekerja kasar. Sementara perempuan banyak terserap sebagai tenaga tata usaha, usaha penjualan dan jasa.



BAB VI. PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAB VI

PROFIL GENDER

BIDANG POLITIK DAN

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

6.1 Politik dan Pengambilan Keputusan

Pembangunan berkelanjutan mengedepankan peningkatan kapabilitas setiap warga negara secara individual. Untuk dapat melakukan itu, dinamika politik dan pengambilan keputusan harus memberikan ruang yang cukup untuk perempuan dan laki-laki berelasi kuasa secara seimbang guna menghasilkan kebijakan publik yang efisien, efektif, dan ekuitabel. Bagian ini akan mendeskripsikan perbandingan antara perempuan dan laki-laki di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

6.2 Perempuan di Lembaga Eksekutif.

Di dalam kajian distribusi dan pembagian kekuasaan, eksekutif dapat diartikan sebagai bagian yang menjalankan fungsi administratif dan manajerial pada sebuah sistem pemerintahan dan politik. Di dalam profil gender ini, eksekutif ditilik berdasarkan ketersediaan data untuk pejabat

publik dan pegawai negeri di Kota Yogyakarta di dalam kerangka waktu tahun 2008 sampai dengan 2012.

Selama periode tersebut, tidak ada perempuan yang memegang jabatan sebagai walikota, atau wakilnya. Pada tingkat di bawahnya, hanya Camat Pakualaman yang berkelamin perempuan dari 14 Kecamatan yang ada. Pada level kelurahan lebih bervariasi meskipun perbandingan lurah laki-laki dan perempuan belum seimbang. Kraton, Kotagede, dan Umbulharjo masing-masing memiliki 2 lurah perempuan, 5 Kecamatan belum memiliki perempuan sebagai lurah, dan sisanya mempunyai. Pada 2012, jumlah lurah perempuan bertambah 1 dari 11 orang pada tahun 2010 dan 2011. Perbandingan Lurah perempuan dan laki-laki sekitar 1:3 atau sekitar 26% dari 45 Lurah pada 2012 adalah perempuan, 2% lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Dengan demikian, sejak 2010 telah terjadi peningkatan 9% jumlah lurah di Kota Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2.1 Jumlah Lurah Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jumlah Lurah Menurut Jenis Kelamin		
		L	P	L + P
1	Tegalrejo	3	1	4
2	Jetis	3	0	3
3	Gondokusuman	5	0	5
4	Danurejan	3	0	3
5	Gedongtengen	1	1	2
6	Ngampilan	1	1	2

No	Kecamatan	Jumlah Lurah Menurut Jenis Kelamin		
		L	P	L + P
7	Wirobrajan	2	1	3
8	Mantrijeron	3	0	3
9	Kraton	1	2	3
10	Gondomanan	2	0	2
11	Pakualaman	1	1	2
12	Mergangsan	2	1	3
13	Umbulharjo	5	2	7
14	Kotagede	1	2	3
	Jumlah 2012	33	12	45
	Jumlah 2011	34	11	45
	Jumlah 2010	34	11	45

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, 2013

Sementara itu, selama 2008 – 2012 tidak ada Pejabat Eselon I, II, dan Fungsional tertentu di 14 Kecamatan. Grafik berikut menunjukkan bahwa di Danurejan dan Umbulharjo terdapat lebih banyak perempuan yang menjabat sebagai Eselon III, IV, dan fungsional umum dibandingkan dengan kecamatan lainnya, Ngampilan dan Gondomanan adalah sebaliknya, dan rata-rata setiap kecamatan memiliki 14 perempuan yang tersebar pada beragam jabatan.

Grafik 6.1 Total Perempuan di Semua Level Jabatan Per Kecamatan



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2013

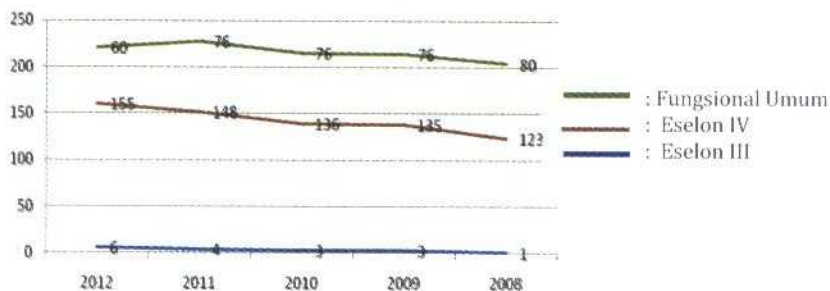
Untuk melihat tren jumlah perempuan sebagai Pejabat Eselon III, IV, dan Fungsional Umum selama 2008-2012, tabel dan grafik di bawah ini dapat dicermati.

Tabel 6.2.2 Jumlah Pejabat Perempuan Eselon III, IV, dan Fungsional Umum

Hierarki	Tahun					Rasio Tren				
	2012	2011	2010	2009	2008	2012	2011	2010	2009	2008
Eselon III	6	4	3	3	1	500%	300%	200%	200%	0%
Eselon IV	155	148	136	135	123	26%	10%	11%	10%	0%
Fungsi Umum	60	76	76	76	80	-25%	-5%	-5%	-5%	0%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2013

Grafik 6.2 Jumlah Pejabat Perempuan Eselon III, IV, dan Fungsional Umum

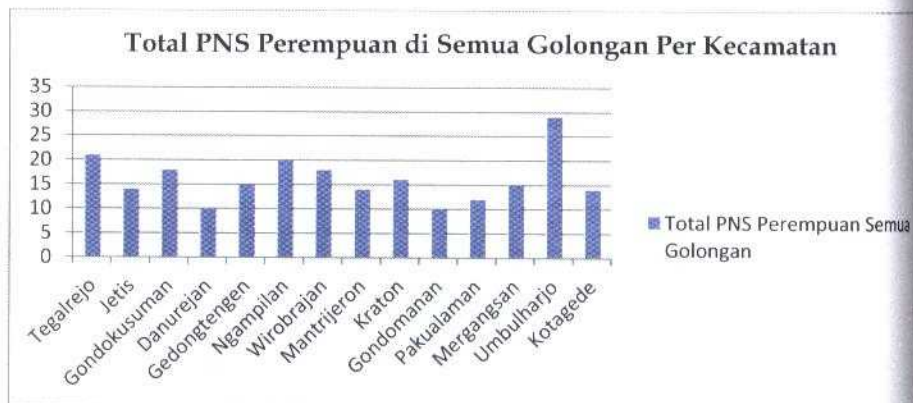


Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2013

Tampak pada tabel dan divisualisasikan di dalam grafik. Jumlah perempuan pada jenjang Eselon III selama 5 tahun terakhir meningkat menjadi 5 kali lipat dan pada Eselon IV peningkatan tampak stabil. Peningkatan terbesar terjadi antara 2011 dan 2012 dari 10% ke 26%. Sementara itu, pada fungsional umum jumlah perempuan menurun. Selama 5 tahun terakhir, jumlahnya menyusut sekitar 25% setelah selama 2010 dan 2009 tidak terjadi perubahan jumlah.

Diamati dari jumlah PNS perempuan, pada grafik berikut tampak bahwa Umbulharjo adalah kecamatan dengan PNS perempuan tertinggi dan Danurejan bersama dengan Gondomanan adalah yang terendah. Rata-rata setiap kecamatan memiliki 16 orang PNS perempuan yang tersebar pada Golongan I, II, III, dan IV sebagaimana terlihat pada tabel selanjutnya.

Grafik 6.3 Total PNS Perempuan di Semua Golongan Per Kecamatan



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2013

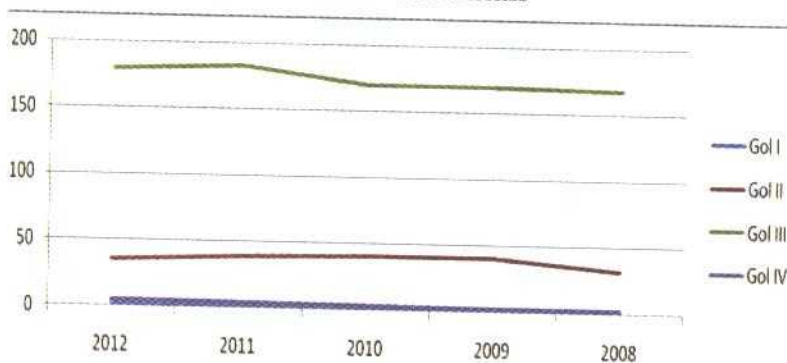
Tabel dan grafik menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir semua golongan meningkat kecuali Golongan 1. Peningkatan terbesar terjadi pada Golongan IV sebanyak 150% atau dari 2 orang pada 2008 menjadi 5 orang pada 2012. Golongan II dan III masing-masing lebih tinggi sebesar 9% dan 7% daripada 2008. Meski demikian, peningkatan di 2012 lebih rendah sebesar 13% dibandingkan 2011. Pada tahun yang sama, peningkatan pada Golongan III juga lebih rendah sebesar 2% setelah 7% lebih tinggi daripada 2010.

Tabel 6.2.3. Tren PNS Perempuan di Semua Golongan Per Kecamatan

Golongan	Rasio Tren									
	2012	2011	2010	2009	2008	2012	2011	2010	2009	2008
Gol I	2	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%	0%
Gol II	35	39	40	40	32	9%	22%	25%	25%	0%
Gol III	179	183	170	170	168	7%	9%	1%	1%	0%
Gol IV	5	4	3	2	2	150%	100%	50%	0%	0%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2013

Grafik 6.4 Tren PNS Perempuan di Semua Golongan Per Kecamatan



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2013

6.3 Perempuan di Lembaga Legislatif

Meskipun tindakan afirmatif telah dilakukan untuk menambah angka perempuan di lembaga legislatif, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa di setiap komisi DPRD Kota Yogyakarta laki-laki secara jelas menempati jumlah mayoritas selama 5 tahun terakhir.

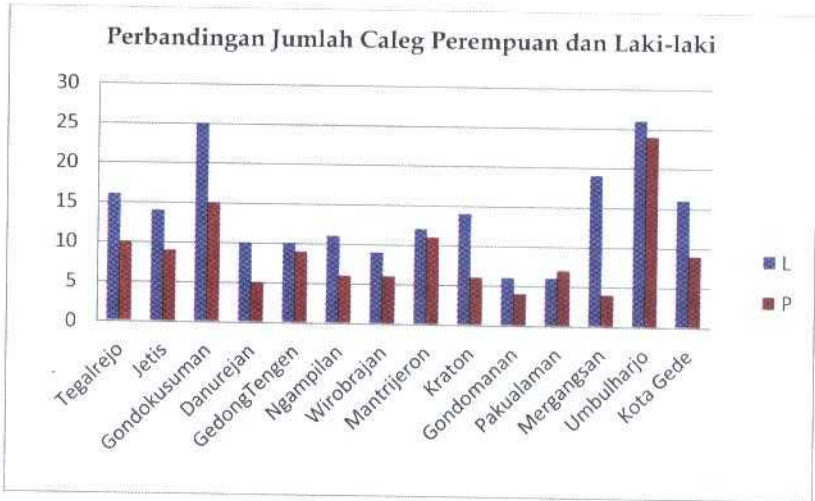
Grafik 6.5 Perempuan Di Legislatif



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2013

Komisi B secara konsisten dalam waktu tersebut memiliki 2 perempuan. Komisi C relatif sama dan pada 2013 Komisi D memiliki 3 orang perempuan dan 2 perempuan pada 4 tahun lainnya. Kondisi ini bisa jadi berkaitan dengan ketersediaan Calon Legislatif (Caleg) seperti tampak pada grafik berikutnya yang mendeskripsikan perbandingan Caleg laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan.

Grafik 6.6 Perbandingan Jumlah Caleg perempuan dan Laki-laki

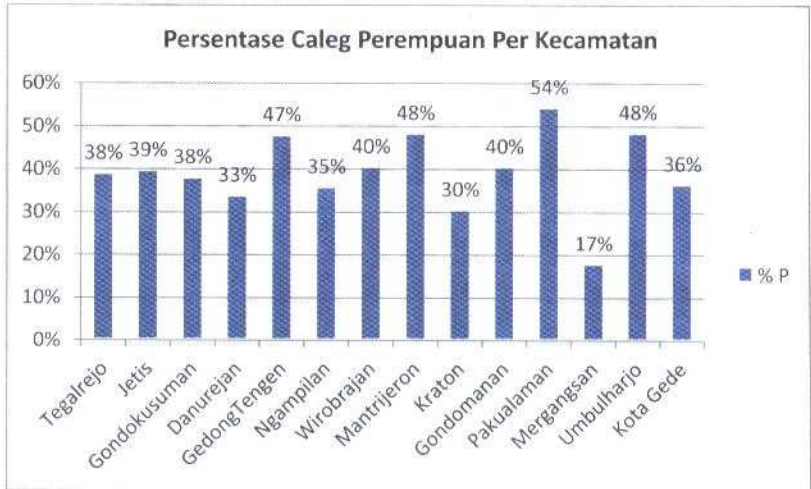


Sumber: KPU Kota Yogyakarta, 2013

Tampak bahwa jumlah total Caleg bervariasi di setiap kecamatan dan umumnya jumlah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Gondokusuman dan Umbulharjo memiliki total relatif sama dan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Meski demikian, perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan di Gondokusuman lebih besar dibandingkan Umbulharjo. Gondomanan dan Pakualaman berada pada sisi yang berseberangan. Keduanya memiliki jumlah terbawah yang hampir sama tetapi perbedaan dua jenis kelamin tidak terlalu besar. Pakualaman menunjukkan jumlah Caleg perempuan lebih tinggi

dibandingkan laki-laki sementara itu kesenjangan besar tampak pada kecamatan Margangsari. Untuk mengelaborasi hal ini, grafik berikutnya dapat dilihat.

Grafik 6.7 Persentase Caleg Perempuan Per Kecamatan



Sumber: KPU Kota Yogyakarta, 2013

Sebagaimana tampak pada grafik sebelumnya, persentase Caleg perempuan di Pakualaman adalah tertinggi atau 54% disusul dengan Mantriweron dan Umbulharjo dengan 48%, dan Gedongtengen 1% di bawah keduanya. Tujuh kecamatan memiliki persentase di atas atau sama dengan 30% dan Mergangsari adalah satu-satunya kecamatan dengan angka di bawah itu (17%). Secara umum, di dalam dua periode terakhir Pemilu DPRD, jumlah Caleg perempuan

lebih sedikit dibanding laki-laki meskipun jumlah total Caleg selama dua periode tersebut menurun hingga mendekati 40% pada 2014. Jika dibandingkan, persentase Caleg perempuan pada 2009 lebih tinggi sebesar 34% daripada 2014 dan berbeda dengan Caleg laki-laki pada 2014 yang mengalami penurunan sebesar 41%. Pada tabel berikutnya tampak tidak ada perempuan di legislatif yang berasal dari Partai Demokrat dan PAN, PDIP 9%, PKS 20%, Partai Golkar 20%, dan masing-masing 50% untuk PPP dan Partai Gerindra.

Grafik 6.8 Jumlah Caleg Laki-laki dan Perempuan pada 2009 dan 2014



Sumber: KPU Kota Yogyakarta, 2013

Tabel 6.3 Persentase Perempuan di partai

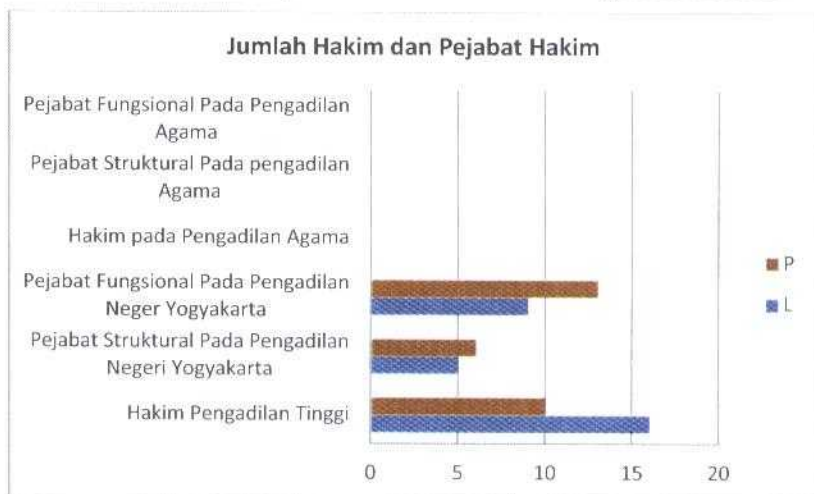
Partai	L	P	Total	% Perempuan
PDIP	10	1	11	9%
DEMOKRAT	10	0	10	0%
PAN	5	0	5	0%
PKS	4	1	5	20%
GOLKAR	3	2	5	40%
PPP	1	1	2	50%
GERINDRA	1	1	2	50%

Sumber: KPU Kota Yogyakarta, 2013

6.4 Perempuan di Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif di dalam profil ini merujuk pada data yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Poltabes Yogyakarta. Menurut data Kejari Kota Yogyakarta hanya terdapat 1 perempuan berjabatan struktural dan 10 orang fungsional. Dengan kata lain, 45% dari total jaksa adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Selanjutnya, jumlah hakim dan pejabat hakim akan diilustrasikan pada grafik di bawah ini.

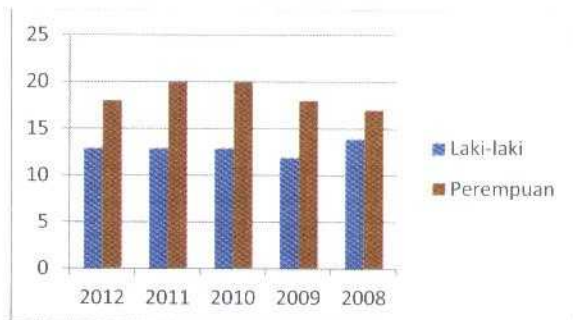
Grafik 6.9 Jumlah Hakim dan Pejabat Hakim



Sumber: Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, 2013

Tampak bahwa laki-laki mendominasi lembaga yudikatif di setiap kategori yang ada di dalam grafik.

Grafik 6.10 Tren kenaikan dan penurunan jumlah laki-laki dan perempuan



Sumber: Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, 2013

Jumlah hakim laki-laki di Pengadilan Negeri 60% lebih tinggi daripada perempuan dan ini relatif terbalik dengan jumlah perempuan sebagai pejabat fungsional di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dilihat dari jenis jabatan, tampak pada tabel di bawah ini tidak ada perempuan yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua atau kedua jenis jabatan tersebut selama lima tahun terakhir dipegang oleh laki-laki. Pada posisi anggota, jumlah laki-laki dan perempuan dapat dibandingkan dimana pada 2012 jumlah keduanya persis sama 11 orang. Pada 2011 dan 2010 jumlah perempuan sebesar 12 atau lebih tinggi 30% dan 50% pada masing-masing tahun. Kesenjangan lebar terjadi pada 2008 dimana perbandingannya adalah 5:1 kemudian menjadi 5:4 pada tahun berikutnya. Selama 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah perempuan hingga 11 kali lipat atau dari 1 orang pada 2008 menjadi 11 orang pada 2012.

Tabel 6.4.1 Jenis Jabatan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jenis Jabatan Hakim					
	Ketua		Wakil Ketua		Anggota	
	L	P	L	P	L	P
2012	1	0	1	0	11	11
2011	1	0	1	0	9	12
2010	1	0	1	0	6	12
2009	1	0	1	0	5	4
2008	1	0	1	0	5	1

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, 2013

Selain di lembaga peradilan, lembaga kepolisian juga akan dielaborasi untuk melihat profil kesetaraan gender di yudikatif. Tabel di bawah ini menggambarkan jenis kepangkatan selama tahun 2011 – 2013 dan tampak bahwa persentase perempuan dengan jenis kepangkatan komisaris polisi menurun dari 17% pada 2011 menjadi 9%. Tahun 2013 meningkat menjadi 13%. Kepangkatan ajun komisaris polisi bergerak dari 15%, 28%, dan 22% pada masing-masing tahun. Inspektur satu dan dua cenderung terjadi penurunan meskipun persentase sama terjadi pada 2011 dan 2012 untuk inspektur satu polisi.

Berdasarkan kewilayahan (lihat Tabel berikutnya), laki-laki cenderung lebih besar jumlahnya dibandingkan perempuan baik di wilayah Poltabes maupun Polsek. Selama 2011 – 2013, persentase perempuan di Poltabes bergerak dari 15%, naik 5% kemudian menurun 2%. Pada tahun 2012, persentase perempuan atas laki-laki di Poltabes lebih tinggi 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, di Polsek pada 2009, 2012, dan 2013 persentase perempuan sama, yaitu 21%. Peningkatan dari 21% ke 29% terjadi pada tahun 2010, kemudian menurun sebesar 15% setahun setelahnya dan meningkat kembali sebesar 7% pada 2012.

Tabel 6.4.2 Jenis Kepangkatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kepangkatan	2011	2012	2013
Perwira Tinggi (Pati)	0%	0%	0%
Brigadir Jendral Polisi	0%	0%	0%
Perwira Menengah (Pamen)			
A. Komisararis Besar Polisi	0%	0%	0%
B. Ajun Komisararis Besar Polisi	0%	0%	0%
C. Komisararis Polisi	17%	9%	13%
Perwira Pertama (Pama)			
A.Ajun Komisararis Polisi	15%	28%	22%
B. Inspektur Satu P olisi	15%	7%	7%
C. Inspektur Dua Polisi	11%	6%	3%
Bintara	3%	3%	2%
Jumlah	1700	1633	1562

Sumber: Poltabes Yogyakarta, 2013

Tabel 6.4.3 Pejabat di Kepolisian Berdasarkan Wilayah

Tahun	Pejabat di Kepolisian berdasarkan wilayah							
	Malporesta				Kapolsek			
	L	P	L + P	% P	L	P	L + P	% P
2013	57	12	69	17%	11	3	14	21%
2012	12	3	15	20%	11	3	14	21%
2011	11	2	13	15%	12	2	14	14%
2010	0	0	0	0%	10	4	14	29%
2009	0	0	0	0%	11	3	14	21%

Sumber: Poltabes Yogyakarta, 2013



BAB VII. PROFIL GENDER BIDANG SOSIAL BUDAYA

BAB VII

PROFIL GENDER

BIDANG SOSIAL BUDAYA

Bidang hukum dan sosial budaya mencakup bahasan mengenai lima aspek penting, yakni : 1). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan LAPAS; 2). Penghuni Rumah Tahanan RUTAN; 3). Penduduk Lanjut Usia LANSIA menurut pendidikan yang ditamatkan, menurut aktivitas yang dilakukan, Angka Kesakitan Lansia/Morbiditas; 4). Penyandang Cacat PENCA menurut pendidikan yang ditamatkan, menurut aktivitas yang dilakukan; 5). Pengungsi Akibat Konflik/Bencana. Namun, karena keterbatasan data, bab ini hanya akan menguraikan profil penduduk usia lanjut, pengungsi akibat bencana dan data perceraian.

7.1 Jumlah Lanjut Usia Terlantar

Pada tahun 2012 total angka lansia terlantar di Kota Yogyakarta sebesar 2.303 dengan rincian 661 lansia laki-laki dan 1.642 lansia perempuan. Jumlah ini meningkat tajam jika dibanding tahun 2008, yang hanya berjumlah 1.628 jiwa, artinya terjadi peningkatan sebesar 41,46% dalam periode lima tahun. Jika dirinci berdasar jenis kelamin, banyaknya lansia perempuan dua kali lipat di banding lansia laki-laki (2010-2012). Kecamatan Tegalrejo merupakan daerah dengan penduduk lansia terlantar paling banyak di banding kecamatan lain, dimana terdapat 232

lansia terdiri dari 165 perempuan dan 67 laki-laki. Kecamatan dengan lansia terlantar paling sedikit adalah Umbulharjo, yaitu 24 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 20 perempuan.

Pemberdayaan lansia dapat dilakukan misalnya melalui program “Paguyuban Lansia” dimana Lansia mendapatkan ketrampilan untuk menunjang hidupnya. Lansia produktif perlu diberi bantuan modal sesuai keahliannya dengan syarat syarat khusus dan mudah. Sedangkan Lansia yang tidak produktif perlu diberikan jaminan hidup layak.

Tabel 7.1. Jumlah Lanjut Usia Terlantar Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar		Total
		Jenis Kelamin		
		L	P	
1	Tegalrejo	67	165	232
2	Jetis	57	125	182
3	Gondokusuman	53	120	173
4	Danurejan	49	87	136
5	Gedongtengen	47	166	213
6	Ngampilan	29	92	121
7	Wirobrajan	63	151	214
8	Mantrijeron	69	147	216

No	Kecamatan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar		
		Jenis Kelamin		Total
		L	P	
9	Kraton	42	75	117
10	Gondomanan	17	62	79
11	Pakualaman	16	35	51
12	Mergangsan	9	18	27
13	Umbulharjo	4	20	24
14	Kotagede	42	91	133
	Jumlah 2012	661	1.642	2.303
	Jumlah 2011	564	1.354	1.918
	Jumlah 2010	485	1.460	1.945
	Jumlah 2009			1.546
	Jumlah 2008			1.628

Sumber data: Dinas Sosial DIY & Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2012

7.2 Jumlah Pengungsi Akibat Konflik dan Bencana

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pusat pendidikan di Indonesia cenderung aman dari ancaman bencana dibanding kabupaten atau kota lain di Provinsi Yogyakarta. Tercatat data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Yogyakarta belum menemukan data pengungsi akibat konflik maupun bencana. Ancaman bencana di Kota Yogyakarta yang paling terasa

adalah banjir lahar dingin akibat erupsi Merapi dan puting beliung namun demikian ancaman yang ditimbulkan tidak menyebabkan warga harus mengungsi ke daerah lain.

Tetap diperlukan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman bencana dalam bentuk lain, semisal gempa bumi dan lainnya. Pelibatan masyarakat dalam pemetaan kebencanaan (*participatory mapping*), pendidikan mitigasi bencana dan penyediaan *early warning system* diperlukan supaya masyarakat benar-benar memahami kondisi daerahnya, mengetahui ancaman dan upaya pengurangan resiko.

Tabel 7.2 Jumlah Pengungsi Akibat Konflik dan Bencana

No	Keterangan	Pengungsi Konflik dan Bencana					
		Usia 0-17 Th			Usia > 18 Tahun		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0
2	Jetis	0	0	0	0	0	0
3	Gondokusuman	0	0	0	0	0	0
4	Danurejan	0	0	0	0	0	0
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	0	0	0	0
8	Mantrijeron	0	0	0	0	0	0
9	Kraton	0	0	0	0	0	0

No	Keterangan	Pengungsi Konflik dan Bencana					
		Usia 0-17 Th			Usia > 18 Tahun		
		L	P	L + P	L	P	L + P
10	Gondomanan	0	0	0	0	0	0
11	Pakualaman	0	0	0	0	0	0
12	Mergangsan	0	0	0	0	0	0
13	Umbulharjo	0	0	0	0	0	0
14	Kotagede	0	0	0	0	0	0
	Jumlah 2012	0	0	0	0	0	0

Sumber : BNPB Kota Yogyakarta, 2012

7.3 Perceraian

Total kasus perceraian di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2008 s/d 2012 sebanyak 254 kejadian, terjadi kenaikan sebesar 84,4% dalam kurun waktu tersebut. Dari tabel 7.4 dapat diamati bahwa jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2012, yakni sebanyak 88 kasus, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2009 yakni sebanyak 35 kasus. Tingginya kasus perceraian yang terjadi disebabkan banyak faktor, diantaranya : pernikahan dini, faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT dll. Dalam kurun waktu 5 tahun, kecamatan yang mengalami tingkat perceraian tertinggi adalah Jetis dan Umbulharjo. Sedangkan kecamatan yang memiliki tingkat perceraian rendah ialah Kraton.

**Tabel 7.3 Data Perceraian Di Pengadilan Negeri
Yogyakarta**

No	Kecamatan	2008		2009		2010		2011		2012	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Mantrijeron		4		3		3		2	1	2
2	Kraton	2		1			1	1	2	3	2
3	Mergangsan	2	4	1	3		2		3		5
4	Ngampilan		3		2		1	1		1	2
5	Pakualaman		1		1	1		2	2	1	3
6	Gondokusuman	1	2	1	1	1		3	4	5	6
7	Wirobrajan					2	1		1	2	1
8	Gondomanan					1	1	1	4	1	5
9	Tegalrejo	1		1			3	4	2	4	3
10	Jetis	3	6	2	4	2	2	3	5	4	9
11	Danurejan		1		1	1		3	1	3	4
12	Umbulharjo	2	6	1	6	5	5	4	2	5	4
13	Kotagede	1	1	1	1	1		2		4	
14	GedongTengen	2	3	1	4	3		2	1	2	1
	Jumlah	14	31	9	26	17	19	26	29	36	47
	Jumlah L+P	45		37		36		55		83	
Sumber : Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, 2013											



BAB VIII. DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

BAB VIII

DATA KASUS KESERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Perlindungan hukum sangat penting bagi perempuan dalam relasi mereka di dalam dan di luar rumah. Secara khusus, bab ini mengulas kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di Kota Yogya dilengkapi data-data mengenai perdagangan manusia.

8.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Meski sudah hampir 10 tahun UU KDRT (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) diberlakukan di Indonesia, pemahaman masyarakat mengenai isu ini masih relatif minim. Isu kekerasan masih dipandang sebagai persoalan privat dan tidak terjangkau hukum. Padahal kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan tindakan kejahatan. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga.

Dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang KDRT, kekerasan didefinisikan sebagai bentuk tindak kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya. Kekerasan

sendiri dibedakan menjadi empat bagian yakni : kekerasan fisik yang melibatkan anggota tubuh untuk menyiksa tubuh korban, kekerasan seksual seperti pelecehan seksual melalui eksploitasi seks terhadap perempuan, kekerasan psikis yang melibatkan aspek psikologis pada korban hingga kekerasan ekonomi yang tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

Dalam banyak kasus, perempuan merupakan korban yang sangat rentan mengalami KDRT meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi korban. Berbagai temuan menunjukkan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama dilaporkan sebagai pelaku dan juga korban kekerasan domestik, tetapi persentase lelaki sebagai pelaku jumlahnya 7-8 kali lipat dari jumlah perempuan yang dilaporkan melakukan kekerasan domestik. Selain itu, kekerasan yang dilakukan perempuan kepada pasangan lelakinya biasanya dimotivasi upaya pembelaan diri karena mereka telah ditekan. Jadi, lebih merupakan "pukulan balik" kepada pasangan lelakinya adan karena ekspresi emosi/kemarahan. Sementara, kekerasan oleh lelaki umumnya dimotivasi dominasi, maskulinitas, dan ekspresi kekuasaan terhadap istri atau pasangan perempuan.

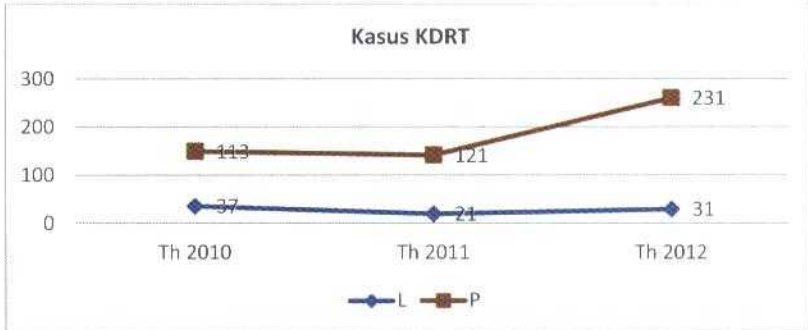
Perbedaan lain adalah dampaknya, sama-sama mengalami kekerasan domestik, perempuan menderita lebih banyak konsekuensi negatif, mulai dari kesehatan mental, fisik, fungsi reproduksi, hingga kehidupan sosial, dan pekerjaan. Perempuan juga berisiko lebih tinggi untuk

terbunuh, mengalami teror, dan ketakutan berkepanjangan, walaupun mereka telah berpisah atau bercerai dari suami atau pasangan lelaki yang menganiayanya. Pola semacam ini hampir tidak dijumpai pada lelaki yang melaporkan diri menjadi korban kekerasan domestik. Kenyataan tersebut cukup memberikan bukti bahwa membicarakan problem kekerasan tidaklah sederhana. Sehingga UU KDRT tidak dapat dimaknasi sebagai bentuk pemanjaan terhadap perempuan atau mendiskriminasi lelaki, tetapi memang ada situasi kultural dan struktural yang rumit di banyak tempat yang menjadikan nilai kemanusiaan lelaki dan perempuan menjadi tidak setara.

8.1.1 Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Korban

Angka KDRT di Kota Yogyakarta dalam tiga terakhir terhitung cukup tinggi, yakni 557 kasus. Dari total angka tersebut jumlah perempuan yang dilaporkan menjadi korban sebanyak 465 orang dan sisanya 89 orang adalah laki-laki. Perbandingan jumlah korban KDRT perempuan dan laki-laki adalah 5 : 1, artinya kekerasan yang dialami oleh perempuan lima kali lipat lebih banyak dari yang dialami laki-laki. Grafik berikut ini menjelaskan perkembangan data kekerasan dari tahun 2010-2012 berdasar jenis kelamin korban yang dihimpun dari berbagai sumber.

**Grafik 8.1 Data Kekerasan Menurut
Jenis Kelamin**



Sumber : JPkkBGT, UPTD PJKP Dinkes Kota Yogyakarta, LK3 Sekar Melati, PKBI, BP4, KPMP Kota Yogyakarta, RS Panti Rapih, RS Jogja, 2013

Tahun 2010 jumlah perempuan yang menjadi korban KDRT sebanyak 113 orang. Di tahun yang sama terdapat 37 orang laki-laki yang melaporkan diri sebagai korban KDRT. Pada tahun berikutnya, laporan KDRT dengan korban perempuan naik menjadi 121 kasus, sebaliknya laki-laki yang menjadi korban justru turun 16 kasus menjadi 21. Di tahun 2012, korban perempuan maupun laki-laki mengalami peningkatan. Terhitung, 231 kasus kekerasan dialami oleh perempuan, atau naik 91% dibanding tahun sebelumnya sedangkan kasus kekerasan yang dialami oleh laki-laki naik 45% menjadi 31 kejadian.

Paparan data di atas, boleh jadi tidak mewakili data riil yang terjadi di masyarakat. Dalam banyak kasus, kekerasan dalam ranah rumah tangga terutama yang dialami perempuan atau istri seringkali tidak sampai ke permukaan atau dilaporkan ke pihak berwenang. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*). Kedua, tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Ketiga, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan (Hasbianto, 1996).

8.1.2 Kekerasan Menurut Usia

Kelompok usia paling rentan mengalami insiden kekerasan adalah 25 tahun ke atas sebagai terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 8.1.2 Kekerasan Berdasar Usia

No	Tahun	Usia			Total
		0-17	18-24	25+	
1	Tahun 2012	55	28	182	265
2	Tahun 2011	27	13	102	142
3	Tahun 2010	11	15	124	407
	Jumlah	93	56	408	557

Sumber : JPkkBGT, UPTD PJKP Dinkes Kota Yogyakarta, LK3 Sekar Melati, PKBI, BP4, KPMP Kota Yogyakarta, RS Panti Rapih, RS Jogja, 2013

Selama tiga tahun terakhir, mayoritas korban kekerasan berusia lebih dari 25 tahun, angkanya mencapai 408 atau 73% dari total korban. Selanjutnya, korban KDRT tertinggi kedua berada dalam interval usia 0-17 tahun dengan jumlah korban 93 orang (17%). Korban KDRT dengan kelompok usia 18-25 tahun tercatat paling sedikit jika dibanding kelompok usia lain, yakni 10% (56 kasus).

8.1.3 Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan

Dari enam kategori kasus kekerasan domestik, jenis kekerasan psikis paling banyak dialami oleh kebanyakan korban. Dalam periode 2010-2012, korban kekerasan psikis mencapai 312 orang atau 56% dari total kasus. Kekerasan psikologis menurut UU KDRT mencakup tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan, isolasi sosial, penguntitan, dan atau kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis dan mengakibatkan penderitaan fisik. Bentuk kekerasan ini sangat sulit untuk dideteksi sebab tidak meninggalkan bekas yang kasat mata seperti pada kekerasan fisik. Akan tetapi, dampak dari kekerasan ini justru sulit untuk disembuhkan karena menyerang kondisi psikologi korban.

Bentuk kekerasan selanjutnya yang kerap dialami korban adalah kekerasan fisik. Sebanyak 226 korban melaporkan tindak penganiayaan yang mereka derita.

Kekerasan dalam bentuk ini mencakup penamparan, pemukulan, menendang, menyundut dengan rokok, atau melukai dengan senjata. Kekerasan seksual juga cukup banyak dialami oleh perempuan di Kota Yogyakarta. Antara tahun 2010-2012, perempuan yang mengalami kekerasan seksual sebanyak 154 orang. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

Tabel 8.1.3 Jenis Kekerasan

No	Tahun	Bentuk Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Penelantaran	Lainnya
1	2012	118	162	126	6	68	0
2	2011	62	61	18	0	36	3
3	2010	46	89	10	0	65	0
		226	312	154	6	169	3

Sumber : JPKKBGT, UPTD PJKP Dinkes Kota Yogyakarta, LK3 Sekar Melati, PKBI, BP4, KPMP Kota Yogyakarta, RS Panti Rapih, RS Jogja, 2013

Kekerasan ekonomi dalam bentuk penelantaran juga cukup banyak terjadi, paling tidak terdapat 167 kasus kekerasan ekonomi yang dilaporkan korban sepanjang tiga tahun terakhir. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan: kerugian ekonomi; ketergantungan secara ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah; terjadinya

eksploitasi di dalam atau di luar rumah; terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah.

8.1.4 Tempat Kejadian

Rumah merupakan tempat yang diharapkan dapat memberikan rasa aman. Akan tetapi data tahun 2010 sampai dengan 2012 menunjukkan sebanyak 70% (440) kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah terjadi karena posisi subordinat perempuan berlangsung secara turun-temurun yang kemudian dinyatakan sebagai kebenaran. Sehingga, terjadi relasi timpang yang sistemik dan berbasis pada kekuasaan. Insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah merupakan kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol secara kuantitatif, jika dibanding lokasi kejadian lain seperti di lingkungan kerja dan tempat lain.

Grafik 8.2 Kekerasan Menurut Tempat Kejadian



Sumber : JP KKBGT, UPTD PJKP Dinkes Kota Yogyakarta, LK3 Sekar Melati, PKBI, BP4, KPMP Kota Yogyakarta, RS Panti Rapih, RS Jogja, 2013

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah berlangsung sebagai bagian dari suatu pola hubungan personal yang kompleks antara suami dan istri, orang tua dan anak, majikan dan pekerja serta antar dua orang yang sedang berpacaran. Data tentang kekerasan jenis ini umumnya lebih sering tercatat melalui lembaga-lembaga perempuan yang memberikan layanan dan pendampingan bagi para perempuan korban. Data di atas sesungguhnya juga memberi indikasi tentang siapa pelaku dan siapa korban serta relasi di antara mereka. Pekerja rumah tangga (PRT) mempunyai kerentanan tersendiri terhadap tindak kekerasan. Sebab kelompok ini mengalami dominasi ganda, sebagai perempuan dan sebagai pekerja. Kerja domestik belum diakui secara resmi dalam hukum nasional sebagai jenis pekerjaan yang sah dan dibutuhkan oleh masyarakat.

8.1.5 Jenis Pelayanan Yang Diberikan

Pendataan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menangani kasus-kasus ini untuk kepentingan lembaga masing-masing, dan menggunakan cara pendataan yang khas pada masing-masing lembaga. Perbedaan yang tajam ditemukan antara sistem pendataan pihak kepolisian, organisasi perempuan dan rumah sakit. Pihak kepolisian menggunakan acuan yang berasal dari KUHAP dan KUHP,

sedangkan organisasi perempuan mendata sesuai dengan kebutuhan untuk berperan sebagai pendamping bagi korban kekerasan. Sementara itu, pihak rumah sakit memfokuskan pencatatan pada kondisi fisik tubuh korban untuk kepentingan pengobatan.

Perbedaan cara pendataan, yang disebabkan oleh kepentingan dan acuan kerangka pemikiran yang berbeda, menimbulkan kesulitan dalam merangkum data menjadi suatu gambaran utuh. Misalnya, kepolisian dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya mencatat kasus KTP yang ditanganinya berdasarkan kategori: 'penganiayaan biasa' dan 'penganiayaan ringan', atau 'perbuatan tidak menyenangkan' dan 'merusak kesucilaan di depan umum'. Sistem kategorisasi semacam ini tidak memberikan informasi tentang jenis kelamin korban ataupun tentang hubungan antara korban dan pelaku. Di pihak lain, bagi organisasi-organisasi perempuan yang memberikan pelayanan dan pendampingan bagi korban, sistem kategorisasi yang dibuat menggambarkan secara langsung siapa korban dan hubungannya dengan pelaku, misalnya: 'kekerasan terhadap istri', 'kekerasan terhadap anak', 'kekerasan dalam pacaran'.

Perbedaan metode dan kepentingan lembaga mempengaruhi jenis layanan yang diberikan kepada korban. Grafik berikut ini merangkum empat jenis dukungan yang diberikan pada korban terkait dengan peran dan fungsi lembaga itu sendiri.

Grafik 8.3 Jenis Pelayanan Yang Diberikan



Sumber : JPKKBGT, UPTD PJKP Dinkes Kota Yogyakarta, LK3 Sekar Melati, PKBI, BP4, KPMP Kota Yogyakarta, RS Panti Rapih, RS Jogja, 2013.

Berturut turut selama tiga tahun terakhir jenis pelayanan yang paling banyak diberikan adalah konseling. Tahun 2012, 180 korban mendapatkan layanan konseling, 50 lainnya memperoleh layanan kesehatan dan sisanya sebanyak 57 korban mendapat dukungan layanan dari penegak hukum. Gambaran yang hampir serupa terjadi pada tahun 2010 dimana dominasi layanan dalam bentuk konseling dan kesehatan disusul kemudian bantuan pendampingan hukum. Gambaran tahun 2011 sedikit berbeda, dua layanan yang paling diberikan adalah dalam bentuk konseling dan bantuan hukum, namun layanan kesehatan hanya satu kasus ditambah dua kasus rehabilitasi.

8.2 Trafficking (Perdagangan Manusia)

Pasal 1 angka 1 UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) menyebutkan bahwa : “*Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi*”.

Sebelum lahirnya UU ini pengertian *trafficking* yang paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk “Mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut **Protokol Trafficking**)”. Dalam protokol ini pengertian *trafficking* ialah: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan

dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dapat meliputi, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, pengambilan organ-organ tubuh.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai modus *trafficking*. Faktor kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan telah mendorong kaum perempuan bahkan anak-anak untuk mencari pekerjaan di kota bahkan sampai ke luar negeri. Kurangnya pendidikan dan terbatasnya informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.

8.2.1 Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin

Selama dua tahun terakhir, ditemukan 24 kasus trafficking di Kota Yogyakarta. Tabel berikut ini merinci korban perdagangan orang menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 8.2.1 Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin

Tindak Pidana Kasus Perdagangan Orang					
No	Kecamatan	2		3	
		Menurut Kelompok Umur			
		Anak (0-18)		> 18 Tahun (Dewasa)	
		L	P	L	P
1	Mantrijeron				4
2	Kraton				
3	Mergangsan				1
4	Ngampilan				
5	Pakualaman				
6	Gondokusuman				
7	Wirobrajan				1
8	Gondomanan				
9	Tegalrejo				
10	Jetis				
11	Danurejan				9
12	Umbulharjo				
13	Kotagede				
14	GedongTengen				
	Jumlah 2012				15
	Jumlah 2011				9

Sumber : Lapas , Kanwil Hukum dan HAM DIY, 2013

Data diatas memperlihatkan bahwa perempuan merupakan kelompok paling rentan korban perdagangan manusia. Dari 24 kasus yang ditemukan, semuanya adalah perempuan yang berusia diatas 18 tahun. Di tahun 2011 perempuan yang menjadi korban trafficking adalah 9 orang.

Angka tersebut turun 33% menjadi 6 kasus di tahun 2012. Kecamatan Danurejan adalah wilayah paling rawan jika dibanding kecamatan lain karena paling banyak ditemukan kasus *trafficking* di kecamatan ini, yakni 9 kasus. Selain itu, ditemukan juga kasus serupa di Kecamatan Kraton sebanyak 4 korban, sedangkan di dua kecamatan lain yakni Mergangsan dan Wirobrajan masing-masing satu kasus. Tidak terdapat laporan korban di kecamatan lain selain ke empat kecamatan tersebut.

8.2.2 Korban Perdagangan Orang Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 8.2.2 Korban Perdagangan Orang Menurut Tingkat Pendidikan

KECAMATAN		Tindak Pidana Kasus Perdagangan Orang									
No	1	2		3		4		5		6	
		Menurut Tingkat Pendidikan									
		Tidak Sekolah		SD/MI		SLTP/Mts		SLTA (SMU, SMA, MA)		Akademi/PT	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Mantrijeron								4		
2	Kraton										
3	Mergangsan						1				
4	Ngampilan										
5	Pakualaman										
6	Gondokusuman										
7	Wirobrajan						1				
8	Gondomanan										
9	Tegalrejo										

KECAMATAN		Tindak Pidana Kasus Perdagangan Orang									
No	1	2		3		4		5		6	
		Menurut Tingkat Pendidikan									
		Tidak Sekolah		SD/MI		SLTP/Mts		SLTA (SMU, SMA, MA)		Akademi/PT	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
10	Jetis										
11	Danurejan				2		2		5		
12	Umbulharjo										
13	Kotagede										
14	GedongTengen										
	Jumlah 2012						4		9		
	Jumlah 2011				2		2		5		

Sumber : Lapas, Kanwil Hukum dan HAM, 2013

Tabel di atas mendeskripsikan bahwa tingkat pendidikan tertinggi dari korban *trafficking* adalah SMU (Sekolah Menengah Umum). Di Tahun 2011, dua korban *trafficking* merupakan lulusan SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan korban lain sebanyak lima orang berpendidikan akhir SMU. Setahun berikutnya jumlah korban dengan pendidikan terakhir SD adalah dua orang, SMP berjumlah empat orang dan SMU sembilan orang dimana sebagian besar kasus terjadi di Kecamatan Danurejan.

8.2.3 Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan

Di tahun 2011, catatan korban *trafficking* yang berstatus belum menikah sebanyak 3 orang dan 6 orang lainnya berstatus telah bercerai dari pasangan atau suami. Sedangkan pada tahun 2012, total korban yang melapor berjumlah 15 orang dimana 7 orang korban belum pernah menikah dan 8 orang telah bercerai atau janda.

Tabel 8.2.3 Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan

	KECAMATAN	Tindak Pidana Kasus Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan					
		Belum Kawin		Kawin		Ceraai	
		L	P	L	P	L	P
1	Mantrijeron		4				
2	Kraton						
3	Mergangsan						1
4	Ngampilan						
5	Pakualaman						
6	Gondokusuman						
7	Wirobrajan						1
8	Gondomanan						
9	Tegalrejo						
10	Jetis						
11	Danurejan		3				6
12	Umbulharjo						
13	Kotagede						
14	GedongTengen						
	Jumlah 2012		7				8
	Jumlah 2011		3				6

Sumber : Lapas, Kanwil Hukum dan HAM, 2013

Diperlukan upaya serius untuk meminimalisir jumlah KDRT korban trafficking di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, kerjasama antar lembaga terkait yakni pemerintah, NGO, masyarakat dan institusi akademik juga penting.



**BAB IX. DATA TUMBUH KEMBANG,
KELANGSUNGAN HIDUP,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

BAB IX

DATA TUMBUH KEMBANG, KELANGSUNGAN HIDUP, DAN PERLINDUNGAN ANAK

9.1 Anak Jalanan

Saat ini, kondisi anak jalanan memang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah di berbagai daerah. Hal ini karena kondisi anak jalanan menjadi masalah sosial yang kerap kali luput oleh perlindungan hukum. Meskipun beberapa data menunjukkan bahwa anak jalanan sering dikaitkan dengan tindak kejahatan dan kriminalitas.

Untuk itu, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang, maka anak jalanan membutuhkan perhatian yang layak guna menjamin kebutuhan hidupnya. Menurut Chusniyati (2008) permasalahan anak jalanan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: permasalahan ekonomi yang berkaitan erat dengan kemiskinan, kondisi lingkungan yang justru mengarahkan anak pada kondisi yang tidak kondusif secara mentalitas, kondisi orang tua yang tidak responsif dalam memberikan perhatian pada anak, bahkan tidak dipungkiri, adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak.

Sepanjang tiga tahun terakhir, jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta menunjukkan gejala penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2012, angka penurunan anak jalanan laki-laki mencapai 45,9% dibandingkan tahun 2011. Sedangkan untuk anak jalanan perempuan, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2011, namun pada tahun 2012, jumlah tersebut turun sebanyak 47 orang dari tahun 2011.

Twikromo (1999 :247) menandakan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan anak jalanan, diantaranya adalah pendekatan preventif serta pendekatan represif. Pendekatan preventif merupakan upaya mengajak anak jalanan untuk diarahkan pada lingkungan formal, seperti pelatihan, training, peningkatan *softskill*. Sedangkan pendekatan represif merupakan bentuk kebijakan dan program yang telah terorganisir oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran anak jalanan di masyarakat.

Penurunan angka anak jalanan di Yogyakarta adalah hal yang positif. Penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan yang lebih responsif dalam menangani permasalahan anak jalanan. Meski demikian, penurunan jumlah anak jalanan bukan justru melenakan, tetapi semakin menuntut perhatian khusus kepada semua elemen masyarakat agar terus ikut serta dalam menangani permasalahan anak jalanan.

Tabel 9.1 Jumlah Anak Jalanan Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Tegalrejo	8	10	18
2	Jetis	10	7	17
3	Gondokusuman	3	0	3
4	Danurejan	1	0	1
5	Gedongtengen	2	0	2
6	Ngampilan	8	8	16
7	Wirobrajan	0	0	0
8	Mantrijeron	1	0	1
9	Kraton	0	0	0
10	Gondomanan	0	1	1
11	Pakualaman	-	-	0
12	Mergangsan	2	0	2
13	Umbulharjo	9	1	10
14	Kotagede	1	0	1
	Jumlah 2012	45	27	72
	Jumlah 2011	102	74	126
	Jumlah 2010	105	37	235

Sumber Data: Dinsos DIY & Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2013

9.2 Anak Terlantar

Pada pasal 1 ayat 7 undang-undang No 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, telah didefinisikan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak

dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak terlantar dan anak jalanan merupakan permasalahan yang saling terkait satu dengan lainnya. Tidak jauh berbeda dengan kondisi anak jalanan, anak terlantar merupakan efek domino yang disebabkan oleh berbagai faktor. Pada umumnya, anak yang diterlantarkan akan menjadi anak jalanan yang menempati sisi jalanan kota.

Berdasarkan data pilah yang ada, jumlah anak terlantar yang ada di Kota Yogyakarta menyebar hampir di seluruh kecamatan di Yogyakarta. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2008 s/d 2012) jumlah anak terlantar di Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Hal ini dapat diamati pada tabel 9.2 dimana jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan 2009 sebanyak 1.654 orang hingga kemudian berangsur menurun menjadi 467 orang di tahun 2012. Pada tahun 2011, jumlah anak terlantar tertinggi terjadi di Kecamatan Kotagede yakni sebanyak 97 orang. Sedangkan jumlah terendah terjadi di Kecamatan Umbulharjo yang menunjukkan angka 0. Dalam kurun waktu 2 tahun (2010-2012) jumlah anak terlantar di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan, Angka penurunan hampir mencapai 50 %, terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan.

Tabel 9.2 Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin Di Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Tegalrejo	46	29	75
2	Jetis	11	6	17
3	Gondokusuman	15	15	30
4	Danurejan	17	7	24
5	Gedongtengen	38	20	58
6	Ngampilan	20	7	27
7	Wirobrajan	12	11	23
8	Mantrijeron	53	33	86
9	Kraton	9	3	12
10	Gondomanan	1	5	6
11	Pakualaman	2	3	5
12	Mergangsan	3	4	7
13	Umbulharjo	0	0	0
14	Kotagede	49	48	97
	Jumlah 2012	276	191	467
	Jumlah 2011	347	253	600
	Jumlah 2010	477	339	859
	Jumlah 2009			1.654
	Jumlah 2008			1.654

Sumber Data: Dinas Sosial DIY & Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2013

9.3 Anak Balita Terlantar

Angka penurunan juga terjadi pada anak balita terlantar. Dalam kurun waktu 2 tahun (2010-2011), anak balita terlantar mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini tampak pada tabel berikut :

Tabel 9.3. Jumlah Anak Balita Terlantar Menurut Jenis Kelamin

Di Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Tegalrejo	0	0	0
2	Jetis	0	0	0
3	Gondokusuman	0	0	0
4	Danurejan	1	0	1
5	Gedongtengen	0	1	1
6	Ngampilan	2	1	3
7	Wirobrajan	0	0	0
8	Mantrijeron	0	1	1
9	Kraton	0	1	1
10	Gondomanan	1	0	1
11	Pakualaman	0	0	0
12	Mergangsan	2	3	5
13	Umbulharjo	0	0	0
14	Kotagede	0	0	0
	Jumlah 2012	6	7	13
	Jumlah 2011	27	29	56
	Jumlah 2010	33	29	62
	Jumlah 2009			197
	Jumlah 2008			197

Sumber Data : Dinas Sosial DIY & Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2013

Pada tahun 2012, jumlah anak balita laki-laki yang terlantar hanya 6 orang, jumlah ini turun hingga 1.98 % dari tahun 2010 yang menunjukkan angka hingga 33 orang. Hal serupa juga terjadi pada anak balita perempuan yang

terlantar. Angka pada tabel menunjukkan bahwa penurunan jumlah anak balita terlantar dengan jenis kelamin perempuan pada tahun 2011 sebesar 2.03%. Penurunan angka balita terlantar menunjukkan bahwa upaya perumusan kebijakan yang menyangkut kesejahteraan anak, perlu semakin diperkuat serta melibatkan seluruh komponen masyarakat.

9.4 Anak Yang Berumur di Bawah 18 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Lahir

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Pasal 27, dijelaskan bahwa akta kelahiran merupakan bentuk dari identitas anak yang perlu dipenuhi oleh orang tua. Hal ini karena, keberadaan akta kelahiran merupakan salah satu kunci bagi anak dalam mengakses pendidikan, dan juga sarana kesehatan. Berdasarkan tabel mengenai persentase kepemilikan akta kelahiran oleh anak di Kota Yogyakarta menunjukkan gambaran perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak jauh lebih besar jumlahnya, bila dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki akta kelahiran.

**Tabel 9.4 Prosentase Anak Yang Berumur di Bawah
18 Tahun Menurut Kepemilikan Akta
Lahir, Jenis Kelamin dan Kecamatan Di
Kota Yogyakarta Tahun 2012**

No	Tahun	Jumlah anak Usia < 18 Tahun		Memiliki Akta Lahir			Tidak Memiliki Akta Lahir		
		L	P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Jumlah 2012	60,972	58,512	57,924	55,578	113,502	3,048	2,048	5,096
2	Jumlah 2011			57,924	55,587	113,511	3,048	2,925	5,973

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012, jumlah anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 113.502 anak. Sedangkan yang tidak memiliki akta kelahiran sebanyak 5.096 anak. Meskipun dalam rentang waktu 2011 hingga 2012 terjadi penurunan jumlah kepemilikan akta kelahiran, namun hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah dan orang tua diharapkan memiliki keseriusan dalam kepemilikan akta kelahiran bagi anak. Kesadaran orang tua diharapkan terus dibina agar selaras dengan kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya sesuai dengan pasal 28 (yang menyatakan bahwa pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah).

9.5 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Ditampung di Panti Asuhan

Panti Asuhan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menampung anak ketika institusi keluarga tidak dapat diwujudkan. Berdasarkan tabel, jumlah panti asuhan pada tahun 2012 sebanyak 13 tempat. Jumlah keseluruhan anak yang ditampung dari ketiga belas panti asuhan tersebut sebanyak 554 orang, dengan rincian 319 anak laki-laki dan 235 anak perempuan.

Tabel 9.5 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Ditampung di Panti Asuhan Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Anak yang Ditampung di Panti Asuhan		
			L	P	L+P
1.	Jumlah 2012	13	319	235	554

Sumber Data : Dinas Sosial, 2013

9.6 Fasilitas Kesehatan yang Melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Pelayanan kesehatan merupakan hak bagi setiap penduduk. Untuk itu, pelayanan kesehatan juga diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Berdasarkan data pilah fasilitas kesehatan yang melayani anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kota Yogyakarta, diperoleh data bahwa

jumlah Puskesmas induk sebanyak 18 tempat, serta Puskesmas pembantu sebanyak 9 tempat. Untuk pelayanan kesehatan berupa rumah sakit umum sebanyak 9 tempat dan rumah sakit khusus sebanyak 9 tempat. Sedangkan jumlah klinik mencapai 51 tempat yang dapat diakses oleh para anak berkebutuhan khusus di Kota Yogyakarta. Jumlah ini tidak dapat dibandingkan mengingat data mengenai fasilitas kesehatan pada dua tahun sebelumnya tidak dapat diperoleh.

Tabel 9.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012

No	Tahun	Jumlah Pelayanan Kesehatan			
		Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik	Lainnya, Sebutkan
1	Jumlah 2012	Induk : 18 Pustu : 9	RSU : 9 RSK : 9	51	

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2013

9.7 Jumlah Tenaga Medis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Berdasarkan data mengenai jumlah tenaga medis bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kota Yogyakarta diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2012 dokter anak ABK laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan dokter anak perempuan. Sedangkan jumlah dokter rehab medis

perempuan hanya berjumlah 1 orang. Sama halnya tenaga medis psikolog, jumlah psikolog didominasi oleh perempuan, yakni sebanyak 11 orang.

Tabel 9.7 Jumlah Tenaga Medis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

No	Tahun	Jenis Tenaga Medis					
		Dokter Anak		Dokter Rehab Medis		Psikolog	
		L	P	L	P	L	P
1.	Jumlah 2012	38	24		1		11

Sumber data: Dinas Kesehatan, 2013

9.8 Jumlah SLB Negeri dan Swasta

Keberadaan SLB merupakan salah satu indikator pemerataan pendidikan di Kota Yogyakarta yang diperuntukkan bagi para siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Tabel 9.8 menunjukkan bahwa jumlah SLB negeri dengan jenjang TK hingga SMA sebanyak 12 tempat. Jumlah ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan SLB swasta yang mencapai 17 tempat di Kota Yogyakarta. Tidak ada perbandingan yang dapat melihat jumlah kenaikan maupun penurunan SLB di Kota Yogyakarta. Hal ini karena data yang diperoleh hanya satu tahun.

Tabel 9.8 Jumlah SLB Negeri Dan Swasta Di Kota Yogyakarta

No	Tahun	SLB NEGERI				Jumlah	SLB SWASTA				Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA		TK	SD	SMP	SMA	
1.	2012	3	3	3	3	12	5	6	3	3	17

Sumber Data : Dinas Pendidikan

9.9 Jumlah Guru Negeri dan Swasta di SLB

Pendidikan tidak lepas dari keterlibatan guru sebagai pendidik sekaligus fasilitator dalam Kegiatan belajar mengajar di Sekolah. Untuk itu keberadaan guru menjadi poin penting, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Yogyakarta. Dari tabel dapat diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2012 ditemukan data bahwa guru yang mengajar di SLB dengan jenjang Sekolah Dasar didominasi oleh perempuan, yakni sebanyak 1.814 orang dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 851 orang. Hal serupa juga terjadi pada SLB di jenjang SMP dan SMA, dimana guru perempuan lebih mendominasi ketimbang guru laki-laki. Di SLB swasta jenjang SMP, jumlah guru perempuan mencapai 964 orang, sedangkan guru laki-laki hanya 680 orang. Pada SLB Swasta dengan jenjang SMA, jumlah guru perempuan mencapai 836, sedangkan jumlah guru laki-laki sebanyak 729 orang.

Tabel 9.9 Jumlah Guru Negeri dan Swasta di SLB Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta

No	Tahun	Guru Negeri di SLB								Guru Swasta di SLB							
		TK		SD		SMP		SMA		TK		SD		SM P		SMA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2012	-	-	851	1814	680	964	729	836	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data: SIM DIT, PSLB2009, Dinas Pendidikan, 2013

9.10. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum

Jumlah anak berhadapan dengan hukum menurut kelompok umur di Kota Yogyakarta menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2012 kelompok umur 0-12 tahun berjumlah 2 orang. Sedangkan untuk kategori umur 13-17 tahun, jumlahnya mengalami penurunan di tahun 2012 yakni sebanyak 67 anak. Jumlah ini turun bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 100 orang. Sedangkan anak berhadapan dengan hukum dengan kategori usia 18-21 tahun mengalami kenaikan di tahun 2012. Jumlah tertinggi pada kategori usia ini terjadi pada tahun 2008, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2009.

**Tabel 9.10. Jumlah Anak Berhadapan dengan
Hukum Menurut Kelompok Umur**

NO	TAHUN	KELOMPOK UMUR			JUMLAH
		0 - 12	13 - 17	18 - 21	
1	2012	2	67	22	91
2	2011		100	5	105
3	2010		94	23	117
4	2009		93	3	96
5	2008		96	35	131

Sumber data: Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, 2013

**9. 11 Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Data yang diperoleh dari Balai Pemasarakatan menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pendidikan terbagi berdasarkan jenjang pendidikan SD, SMP, SLTA, Perguruan Tinggi dan lain-lain. Rata-rata pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum terjadi pada jenjang pendidikan SMP bila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini terkait dengan kategori usia anak yang menginjak remaja serta faktor lingkungan hingga menyebabkan anak rentan berhadapan dengan hukum.

Dari data diperoleh gambaran bahwa anak berhadapan dengan hukum yang mengenyam jenjang pendidikan tertinggi pada tahun 2008, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2012. Ini mengindikasikan bahwa anak

berhadapan dengan hukum memerlukan program untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 9. 11. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Menurut Pendidikan

No	Tahun	Pendidikan						Lai-lain
		Buta Aksara	SD	SMP	SLTA	PT	LAIN-LAIN	
1	2012		27	42	18		4	91
2	2011		53	47	3		2	105
3	2010		43	51	12		11	117
4	2009		32	61	3			96
5	2008	1	34	61	35			131

Sumber data: Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, 2013

9.12. Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan data diatas diperoleh gambaran bahwa anak berhadapan dengan hukum di Kota Yogyakarta melibatkan beberapa kasus, diantaranya: kejahatan susila, perjudian, pembunuhan, penganiayaan, penggelapan, merusak barang, narkoba, kejahatan lain dan pelanggaran.

Tindak kejahatan pencurian menduduki jumlah tertinggi pada tahun 2008 bila dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Selanjutnya mengalami penurunan tiap tahun, yang ditunjukkan dengan jumlah sebanyak 40 kasus pada tahun 2012. Kasus penganiayaan menduduki angka tertinggi kedua, yakni 148 kasus dalam 5 tahun terakhir (2008-2012). Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2008, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2009 dan 2012. Kasus

anak lainnya yang perlu disoroti ialah permasalahan pada tindak kejahatan susila dan narkoba. Kecanggihan teknologi tidak dipungkiri memberikan dampak positif dan negatif terhadap fenomena tersebut.

Tabel 9.12. Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Menurut Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kejahata Politik					
2	Kejahatan Terhadap Negara					
3	Kejahatan Terhadap Ketertiban					
4	Pembakaran					
5	Penyuapan					
6	Kejahatan Mata Uang					
7	Pemalsuan Meterai					
8	Kejahatan Susila	6	5	4	3	4
9	Perjudian	1				
10	Penculikan					
11	Pembunuhan	1	1		2	1
12	Penganiayaan	37	26	32	27	26
13	Pencurian	63	47	53	53	40
14	Perampokan					
15	Pemerasan					
16	Penggelapan		1	6	1	
17	Penipuan					
18	Merusak Barang	2				
19	Kejahatan Dalam Jabatan					
20	Penadahan					
21	Kejahatan Ekonomi					
22	Narkotika	13	10	10	10	11
23	Kejahatan Lain-lain	3	2	4	6	6
24	Pelanggaran Lain-lain	5	4	8	3	3
JUMLAH		131	96	117	105	91

Sumber data: Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, 2013

Hal lain yang turut mempengaruhi adalah aspek sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, peran serta semua pihak dalam upaya menghadapi permasalahan yang menimpa anak menjadi tanggung jawab bersama.

9.13 Data Tumbuh Kembang Anak Tentang Jumlah Lembaga Pendidikan Bagi Anak

Tabel 9.13. Jumlah Lembaga dan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Kecamatan

Tahun	Jumlah anak	PAUD Nonformal		PAUD Formal		Jumlah Anak Terlayani	Jumlah Belum Terlayani	Prosentase	Prosentase
	Usia 0-6 Tahun	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik	(F+NF)		(F+NF)	PAUD NF
Jumlah 2012	35,654	711	18,455	216	11,835	30,290	5,364	85%	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2013.

Pendidikan merupakan upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen masyarakat berhak memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut ialah, melalui keberadaan institusi dan lembaga pendidikan yang dimulai sejak dini. Dari data pilah yang diperoleh, lembaga pendidikan di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 terdiri dari PAUD formal dan nonformal. Jumlah PAUD nonformal sebanyak 711 dan melayani peserta didik sebanyak 18455 anak. Sedangkan PAUD formal sebanyak 216 serta

melayani peserta didik sebanyak 11.835 anak. Dari jumlah tersebut diperoleh kesimpulan bahwa data anak yang telah terlayani di lembaga pendidikan PAUD nonformal maupun informal sebanyak 30.290 anak atau sekitar 85%. Sedangkan yang belum terlayani ialah sebanyak 5.364 anak.



BAB X. DATA BIDANG KELEMBAGAAN PUG DAN PUHA

BAB X

DATA BIDANG KELEMBAGAAN PUG DAN PUHA

Untuk memenuhi prasyarat PUG, keberadaan kelembagaan PUG menjadi sangat krusial. Kelembagaan PUG berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan. Sedangkan PUHA (Pengarusahaan Hak Anak - *Mainstreaming Children Rights*) adalah strategi untuk memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak.

Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, terutama terkait dengan pengarusutamaan gender dan pembangunan nasional seperti diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah RI No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya konkrit di ranah operasional dalam rangka

mewujudkan sinergitas berbagai sektor pembangunan demi merealisasikan kesamaan akses, peran, kontrol, dan memanfaatkan hasil pembangunan tanpa memandang apakah itu perempuan atau laki-laki.

10.1 Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)

10.1.1 Bidang Kesehatan

Kecamatan Sayang Ibu

Kecamatan Sayang Ibu adalah kecamatan yang telah mempunyai satuan tugas (satgas) Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan melaksanakan program GSI secara terorganisir yang didukung oleh desa dan kelurahan Siap Antar Jaga (SIAGA). Kecamatan yang menjadi pioneer terbentuknya Kelembagaan PUG Kecamatan Sayang Ibu adalah Gondokusuman di tahun 2009 dan tahun berikutnya adalah kecamatan Mergangsan. Tahun 2011 dan 2012 dua kecamatan yang teridentifikasi sebagai kecamatan sayang ibu adalah Danurejan dan Gondokusuman. Total GSI di seluruh kecamatan pada tahun 2012 adalah 5 unit, namun belum teridentifikasi proporsi keterlibatan laki-laki dan perempuan di dalamnya. Demikian juga perbandingan laki-laki dan perempuan yang terdaftar dalam Satgas revitalisasi GSI belum dapat dimunculkan.

Tabel 10.1 Kecamatan Sayang Ibu

Kecamatan		Kecamatan sayang Ibu					Gugus Tugas GS
No		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Tegalrejo						
2	Jetis						
3	Gondokusuman		1			1	1
4	Danurejan				1		1
5	Gedongtengen						
6	Ngampilan						
7	Wirobrajan					1	
8	Mantrijeron						
9	Kraton						
10	Gondomanan						
11	Pakualaman						
12	Mergangsan			1			1
13	Umbulharjo						1
14	Kotagede						
	2012						5
	2011						4
	2010						3
	2009						2
	2008						1

Sumber : KPMP Kota Yogyakarta, 2013

10.1.2 Bidang Ekonomi

1. Desa Prima

Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima) merupakan sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik alam maupun manusia.

Tabel 10.2 Desa Prima

No	Kecamatan	Desa Prima
1	Tegalrejo	
2	Jetis	1
3	Gondokusuman	
4	Danurejan	
5	Gedongtengen	
6	Ngampilan	
7	Wirobrajan	
8	Mantrijeron	
9	Kraton	
10	Gondomanan	
11	Pakualaman	
12	Mergangsan	1
13	Umbulharjo	1
14	Kotagede	
	2012	3
	2011	2
	2010	1
	2009	1

Sumber : KPMP, 2013

Tahun 2012 tercatat tiga kecamatan yang berstatus sebagai desa prima, masing-masing di Mergangsan, Jetis dan Umbulharjo. Jumlah tersebut masih terlampaui minim sehingga ke depan diperlukan upaya-upaya untuk mengembangkan desa prima di kecamatan lain terutama yang tergolong sebagai kecamatan miskin. Wilayah miskin di suatu daerah, pada umumnya lebih banyak dihuni kelompok perempuan miskin. Kelompok ini tidak hanya miskin jika ditinjau dari sisi pendapatannya, tetapi juga miskin jika dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan hidupnya yang mencakup kebutuhan sosial, politik, pendidikan dan kesehatan. Model Desa Prima memberikan alternatif pilihan cara dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan perempuan keluarga miskin, dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, serta mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, Organisasi Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan.

2. P2W-KSS

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah program terpadu peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas keluarga. Di tahun 2012,

terdapat 16 kelompok P2W-KSS di Kota Yogyakarta. Jumlah ini meningkat jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, rata-rata peningkatan adalah 2 kelompok per tahun.

Tabel 10.3 P2WKSS

Kecamatan		P2W-KSS				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Tegalrejo	2	2	2	2	2
2	Jetis			2	2	2
3	Gondokusuman					
4	Danurejan	2	2	2	2	2
5	Gedongtengen					2
6	Ngampilan					
7	Wirobrajan					2
8	Mantrijeron		2	2	2	2
9	Kraton					
10	Gondomanan					
11	Pakualaman					
12	Mergangsan					
13	Umbulharjo	2	2	2	2	2
14	Kotagede	2	2	2	2	2
	2012					12
	2011				14	
	2010			12		
	2009		10			
	2008	8				

Sumber : KPMP, Kota Yogyakarta, 2013

10.1.3 Focal Point Gender

1. Forum Perlindungan Perempuan

Tabel 10.4 Forum Perlindungan Perempuan

No	Kecamatan	Forum Perlindungan Perempuan
1	Tegalrejo	1
2	Jetis	1
3	Gondokusuman	1
4	Danurejan	1
5	Gedongtengen	1
6	Ngampilan	1
7	Wirobrajan	1
8	Mantrijeron	1
9	Kraton	1
10	Gondomanan	1
11	Pakualaman	1
12	Mergangsan	1
13	Umbulharjo	1
14	Kotagede	1
	2012	14

Sumber : KPMP,2013

Diseluruh kecamatan di Kota Yogyakarta telah terbentuk forum perlindungan perempuan, namun belum dapat diidentifikasi jumlah anggota forum di masing-masing kecamatan termasuk komposisi laki-laki dan perempuan di dalamnya.

2. Lembaga Pusat Studi Wanita/Gender

Terdapat beberapa lembaga Pusat Studi Wanita atau Gender di Kota Yogyakarta diantaranya PSW Universitas Ahmad Dahlan (UAD), PSW Janabadra, PSW UST (Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa) dan PSW UKDW (Universitas Kristen Duta Wacana). Pusat-pusat studi tersebut merupakan mitra potensial bagi pemerintah kota Yogyakarta, khususnya KPMP dalam melakukan berbagai aktifitas riset dan pemberdayaan perempuan dan anak.

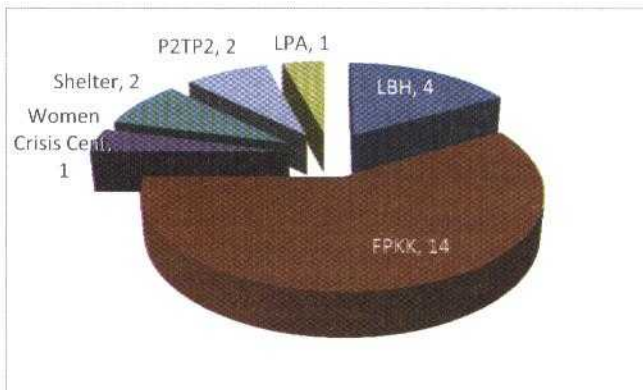
**Tabel 10.5 Daftar Lembaga Pusat Studi Wanita/
Gender**

No	Nama Universitas	Tahun Pembentukan
1	PSW Universitas Ahmad Dahlan (UAD)	
2	PSW Universitas Janabadra	
3	PSW UST (Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa)	
4	PSW UKDW (Universitas Kristen Duta Wacana)	

Sumber : KPMP, 2013

3. Lembaga yang Bergerak Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Grafik 10.1 Lembaga yang Bergerak Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak



Sumber : KPMP, 2013

Lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak dan perempuan di Kota Yogyakarta sudah relatif banyak. Diantaranya terdapat 1 (satu) *women crisis center*, 2 (dua) *shelter*, 2 (dua) P2TP2A, 1 (satu) LPA, 4 (empat) LBH dan 14 FPKK.

4. Daftar lembaga yang Bergerak dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Tabel 10.6 Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH/ yang Peduli Perempuan dan Anak

No	Nama Lembaga/LSM/LBH	Alamat Kantor (Telp/fax)
1	LBH Yogyakarta	Jl.H.Agus Salim 36 Yk, Telp (0274)-37321
2	PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)	Jl.Ki Penjawi No 26, Kotagede, Yk
3	Rifka Annisa Women Crisis Center	Jl. Jambon, IV Kompleks Jatimulyo Indah, YK
4	Yasanti (Yayasan Annisa Swanti)	Kuncen,Tegalsari WBI/270, Telp. 0274-558545
5	Yayasan SAMIN (Serikat Anak Merdeka Indonesia)	Jl. Sindikan gg.Saridi, UH V/5567, Yk, Telp 0274-412301
6	LABH (Lemb.Advokasi HAM dan Bantuan Hukum)	Jl.Pringgokusuman GT II/397
7	Rumpun Tjoet Nyak Dien	Wirosaban Barat Indah No 22 RT.58/14, Sorsutan,UH
8	LBH APIK Yogyakarta	Jl. Tentara rakyat Mataram, Gg. Kapas B2, Badran
9	Anak Wayang Indonesia	Jl.Pakelrejo UH VI/1197 Yk, Telp.08174119922
10	IHAP (Institut Hak Asasi Perempuan Indonesia)	ihp@yogya.wasantara.net.id
11	LKBH UWK Yogyakarta	Jl.Perkapalan No 14 Alun-alun Utara Yk
12	Aksara	Jl.Adyaksa II,No 1A,perum Banteng Baru, Telp.0274-880334
13	Rekso Dyah Utami (RDU)	Balerejo
14	LK3 Sekar Melati	Jl. Batikan No 20 Yk
15	KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)	Jl. Kuncen Tegalsari, Wirobrajan, YK, Telp 0274-7478446
16	LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak)	Jl. Purwokinanti PA 1/278 Pakualaman YK
17	Mitra Wacana	Jl.Sidikan Gg. Perdana, Tegalsari UH VI/114B. Telp 0274.3883326
18	Wadah Titian Harapan	Gedung AGAPE Lt 1,UKDW, Jl Wahidin Sudirohusodo, No.5
19	SOS Desa Taruna	Jl Timoho II No 107B, Telp 0274-9128239

Sumber : KPMP, 2013

Secara total terdapat 19 buah lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta.

5. Peraturan Daerah dan Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang responsif gender

Tabel 10.7. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		
Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender		
Tahun	Jumlah	Keterangan
2008	1	1. Peraturan Daerah Kota Yk Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
2009	18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Ketenagakerjaan. 2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggungjawab Bencana Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rumah Pemulihan Gizi Balita Kota Yogyakarta. 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009. 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta.

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		
Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender		
Tahun	Jumlah	Keterangan
		8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Menengah.
		9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana ASKES Sosial Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas Kota Yogyakarta.
		10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tabungan Pendidikan Kota Yogyakarta.
		11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta.
		12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
		13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terlambat Bagi Penduduk Kota Yogyakarta.
		14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2009 tentang Tapak Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta
		15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 417 Tahun 2009 tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta.
		16. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 477 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta
		17. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 417 Tahun 2009 tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta.

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		
Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender		
Tahun	Jumlah	Keterangan
		18. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 477 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Yogyakarta
2010	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Mahasiswa Berprestasi. 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelayanan Psikologi Klinis Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Puskesmas di Kota Yogyakarta. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah. 5. Peratura Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pelayanan Puskesmas Pada Hari Minggu. 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2010 tentag Home Care Service. 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2010 tentang Penggunaan Layanan Internet Yang Tersaring . 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2010 tentang Pemberian Santuna Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2011.

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		
Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender		
Tahun	Jumlah	Keterangan
		10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Yogyakarta.
2011	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga. 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Parameter Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Daerah di Kota Yogyakarta. 3. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 157 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PWKSS) Kota Yogyakarta Tahun 2011. 4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 533 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap (Pokjatap) Gerakan Sayang Ibu (GS)I Kota Yogyakarta. 5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 603 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) di Kota Yogyakarta Tahun 2011. 6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor tentang Penetapan SKPD Pelaksana PPRG 7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 535 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Yogyakarta.
2012	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 244 Tahun 2012 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta. 2. Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Focal Point PUG
Sumber : KPMP, Kota Yogyakarta, 2013		

Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender pada tahun 2008 hanya tercatat satu, namun di tahun 2009 tercatat ada 18 aturan, kemudian tahun 2010 sejumlah 10, tahun 2011 sebanyak 7 buah dan tahun 2012 bertambah satu.

6. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan

Berkaitan Perda dan kebijakan/program/kegiatan tentang perlindungan perempuan, Pemerintah kota memiliki satu aturan yang dikeluarkan pada tahun 2007 seperti termuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 10.8. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan tentang perlindungan perempuan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		
Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan tentang perlindungan perempuan		
Tahun	Jumlah	Keterangan
2007	1	Peraturan Walikota No 62 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking di Kota Yogyakarta

Sumber : KPMP Kota Yogyakarta, 2013

10.2 Kelembagaan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)

PUHA merupakan suatu strategi yang dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. PUHA yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Apabila hal ini dilaksanakan, diharapkan kepedulian mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga akan semakin cepat dan terjamin.

Terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA.

1. Peraturan Daerah dan Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang Peduli Anak

Berikut ini adalah data peraturan daerah dan kebijakan/program/kegiatan yang peduli anak. Terdapat empat Keputusan Walikota terkait hal tersebut, tidak ditemukan SK Camat, SK Kades dan SK lainnya.

Tabel 10.9. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak

Tahun	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	
	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	
	Jumlah	
2012	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 tahun 2012 tentang pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalulintas di Kota Yogyakarta. 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta.
2011	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Terlambat dan Penduduk Kota Yogyakarta.

Tahun	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	
	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	
	Jumlah	
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Rumah Pemulihan Gizi Balita Kota Yogyakarta. 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggal Biaya Pendidikan. 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang BOSDA. 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011. 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Taman Pintar Yogyakarta.

Tahun	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	
	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	
	Jumlah	
		<p>9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2011 tentang Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Kantor Pengelola Taman Pintar Kota Yogyakarta.</p> <p>10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.</p> <p>11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nopmor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p> <p>12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Republik Indonesia (KIA WNI)</p> <p>13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tabungan Pendidikan Kota Yogyakarta.</p>

Tahun	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	
	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	
	Jumlah	
		<p>14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pengembangan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan.</p> <p>15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.</p> <p>16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta.</p>
2010	7	<p>1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tunggalan Biaya Pendidikan.</p> <p>2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berpretasi.</p> <p>3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.</p> <p>4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelayanan Psikologis Klinis di Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Puskesmas di Kota Yogyakarta.</p>

Tahun	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	
	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	
	Jumlah	
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Prestasi Peserta Didik Berprestasi di Kota Yogyakarta. 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2010 tentang Penggunaan Layanan Internet yang Tersaring. 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat. 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Kota Yogyakarta.
2009	20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2009 tentang Pemberian Santuan Kematian bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2010. 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Tahun	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	
	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	
	Jumlah	
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Registrasi dan Heregistrasi. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah. 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rumah Pemulihan Gizi Balita Kota Yogyakarta 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Jamina Pendidikan Daerah. 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta. 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta. 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendataan Keluarga

Tahun	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	
	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	
	Jumlah	
		<p>Miskin.</p> <p>12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Menengah.</p> <p>13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana ASKES Sosial bagi pelayanan kesehatan peserta PT ASKES (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas Kota Yogyakarta.</p> <p>14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tabungan Pendidikan di Kota Yogyakarta.</p> <p>15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2009 tentang Hubungan dan Mekanisme Kerja Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.</p> <p>16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta.</p> <p>17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2009 tentang</p>

Tahun	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	
	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	
	Jumlah	
		<p>Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan Swasta di Kota Yogyakarta.</p> <p>18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah.</p> <p>19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.</p> <p>20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Kelahiran Terlambat bagi Penduduk Kota Yogyakarta.</p>
2008	6	<p>1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta.</p>

Tahun	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	
	Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	
	Jumlah	
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008. 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besar Tarif Masuk per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta. 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja (menyediakan TPA/ dan pemberian ASI). 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja (menyediakan TPA/ dan pemberian ASI).

Sumber : KPMP, 2013

Selama lima tahun terakhir Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan 55 Peraturan/kebijakan/program/kegiatan yang peduli anak, masing-masing tahun 2008 (6 buah), 2009 sebanyak (21 buah), 2010 (8 buah), 2011 sebanyak (16 buah) dan 2012 (3 buah) .

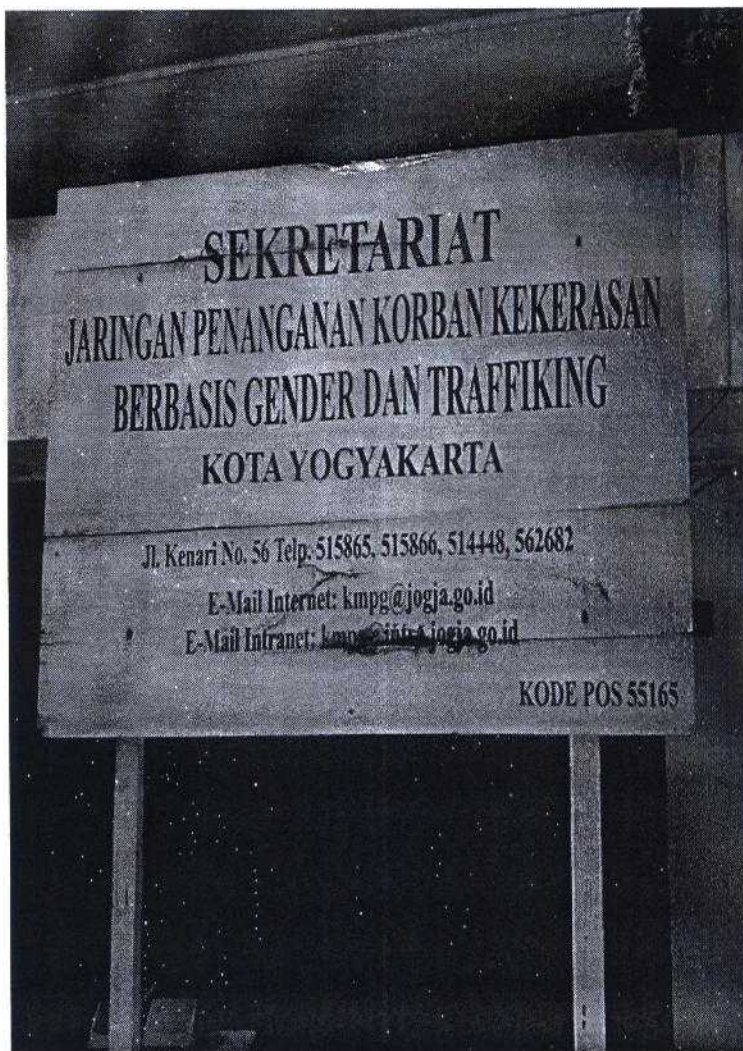
2. Panti Asuhan Anak Yatim Piatu

Dari data yang terhimpun, diperoleh jumlah panti asuhan yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 13 panti asuhan. Ketiga belas panti asuhan tersebut tersebar di 9 kecamatan di Kota Yogyakarta. Jumlah panti asuhan terbanyak terdapat di kecamatan Umbulharjo, yakni sebanyak 4 panti asuhan, disusul kecamatan Wirobrajan yang memiliki 2 panti asuhan. Sedangkan di kecamatan lainnya, panti asuhan, memang belum ada.

**Tabel 10.10 Data Panti Asuhan Anak Yatim
Piatu Se-Kota Yogyakarta**

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Panti	Alamat	Jumlah Pelayan
1	Tegalrejo	1	PAI Ibadah Bunda	Bangirejo KW I/50	36
2	Jetis	1	PA Wiloso Projo	Penumping JT III/211	32
3	Gondokusuman	1	PA Rekso Putra Bagian Putri	Reksonegaran GK V/1291	20
4	Danurejan	-	-	-	-
5	Gedongtengen	-	-	-	-
6	Ngampilan	1	PA Putri Aisyiyah	Jl. Munir 109	71
7	Wirobrajan	2	1. PA Gembala Baik	Gampingan WB I/756	20
			2. Helen Keller	Jl. RE. Martadinata 88A	26
8	Mantrijeron	1	Yaketunis	Jl. Parangtritis 46	86
9	Kraton	1	Prayuwana	Ngadisuryan No. 2	10
10	Gondomanan	-	-	-	-
11	Pakualaman	-	-	-	-
12	Mergangsan	1	PA Putra Muhammadiyah	Jl. Lowanu MG III/1361	72
13	Umbulharjo	4	1. PA Putra Islam	Giwangan UH VII/2	52
			2. PA Putri Islam	Jl. Pramuka 68	65
			3. PA Tunas Harapan	Jl. Kenari No. 7	32
			4. LSPPAG	Jl. Imogiri 224	37
14	Kotagede	-	-	-	-

Sumber : Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2013



BAB XI

KESIMPULAN

1. Bidang Kesehatan

- a. Angka Harapan Hidup** : Angka rata-rata harapan Hidup penduduk Kota Yogyakarta lebih tinggi dari harapan hidup nasional 70 tahun, yakni usia 71,43 tahun bagi laki-laki dan 75,22 tahun bagi perempuan. Data harapan hidup dalam kurun waktu 2008-2009 menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
- b. Angka kematian Ibu Melahirkan** : Jumlah kematian ibu melahirkan yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebanyak 7 dari 105 kasus.
- c. Cakupan Pertolongan** : Pada tahun 2012, Kota Yogyakarta berhasil mencapai target 100% dalam upaya pertolongan persalinan. Standar tersebut melampaui standar dari pemerintah yang hanya sebesar 90%. Cakupan pertolongan tersebut dilakukan oleh tenaga medis dan profesional yang disesuaikan dengan bidangnya, sehingga dapat memperlancar persalinan.

d. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan

Puskesmas : Pada tahun 2012 tercatat jumlah kunjungan Ibu Hamil ke Puskesmas mencapai 100 % di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Hal ini terjadi karena pelayanan kesehatan disebarluaskan di hampir seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Perolehan tingginya persentase kunjungan ibu hamil telah menunjukkan tingginya kesadaran ibu hamil untuk mengunjungi Posyandu dan Puskesmas guna mendapatkan pelayanan kesehatan.

e. Imunisasi atau Vaksinasi Tetanus Toxoid (TT)

pada Ibu Hamil : Pelaksanaan Imunisasi dan Vaksinasi pada ibu hamil masih jauh dari target yang diharapkan. Dari 5.105 ibu hamil, hanya sekitar 3.502 yang mendapatkan vaksin TT1-TT5. Sehingga tidak lebih dari 67% ibu hamil yang terlindungi oleh penyakit TT. Untuk itu, distribusi informasi berperan penting dalam memberikan kesadaran ibu hamil mengenai imunisasi dan vaksinasi selama kehamilan.

f. Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) :

Tahun 2012 prosentase ibu hamil yang memperoleh zat besi belum optimal seluruhnya, hanya berada di angka 77,9% dan 72%.

- g. Pengidap HIV-AIDS :** Temuan data tahun 2012, jumlah pengidap HIV/AIDS di Kota Yogyakarta mencapai angka 459 orang.
- h. Keluarga Berencana :** Pada tahun 2012, jumlah akseptor keluarga Berencana di Kota Yogyakarta masih didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 70 % dan laki-laki hanya mencapai 23 %.
- i. Usia Perkawinan :** Pada tahun 2010-2011 telah ditemukan kasus pernikahan dibawah umur sebanyak 55 dengan rincian : 47 kasus yang terjadi di Tahun 2010 serta 8 kasus sisanya terjadi pada tahun 2011.
- j. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA):** Dalam waktu Lima tahun terakhir yakni tahun 2008-2012, pengguna narkoba mengalami perubahan secara fluktuatif. Secara umum jumlah pengguna laki-laki lebih banyak ketimbang pengguna perempuan.

2. Bidang Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) :** APK perempuan dan laki-laki menunjukkan kecenderungan yang membaik tiap tahunnya. Meskipun masih terdapat disparitas gender.

- b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) :** Pada tahun 2012 APS perempuan berdasarkan jenjang pendidikan lebih rendah dari APS laki-laki.
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA :** Dalam kurun waktu 5 tahun, APM perempuan di jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA berada lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki.
- d. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA :** Angka Putus sekolah (APS) di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2010 di jenjang SD, SLTP dan SLTA. Angka putus sekolah yang terjadi pada laki-laki justru lebih besar bila dibandingkan dengan APS perempuan.
- e. Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan :** Pada tahun 2011, jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan mengalami penurunan di jenjang SD, SLTP, SMA dan Akademi di bidang sebelumnya.
- f. Jumlah Peserta Paket A,B, dan C :** Jumlah peserta Paket A, B, dan C mengalami peningkatan pada tahun 2012. Akan tetapi, terdapat gap antara peserta laki-laki dan perempuan, dimana jumlah peserta laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan di setiap paket.

g. Jumlah Guru (Negeri/Swasta) : Pada tahun 2012, jumlah guru dari tingkat TK , SD, SLTP dan SLTA cenderung lebih rendah daripada tahun 2011. Jumlah guru TK menurun 62 orang, guru SLTP menurun 235 orang, guru SMA dan SMK menurun 151 orang.

h. Sertifikasi Guru (Negeri/Swasta) : Peserta dan lulusan sertifikasi guru dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan.

i. Jumlah Penerima Beasiswa SLTP dan SLTA : Tahun 2012 total beasiswa yang diberikan bagi siswa SLTP dan SLTA di Kota Yogyakarta mencapai 452 beasiswa, dengan perincian 179 untuk SLTP dan 273 untuk SLTA. Rata-rata beasiswa lebih banyak diperoleh oleh siswa perempuan ketimbang laki-laki.

j. Jumlah Siswa Berprestasi : Prestasi yang diukir siswa meliputi : bidang akademik, seni dan olahraga masih minim

3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) : Disparitas gender menunjukkan angka negatif di sepanjang tahun 2008-2012. Ini menandakan posisi perempuan tertinggal jika dibanding laki-laki dalam hal angkatan kerja.

- b. Perkembangan Jumlah tenaga Kerja di Kota Yogyakarta :** Perkembangan tenaga kerja di Kota Yogyakarta meliputi keterlibatan warga lokal dan non-lokal, serta jenis pekerjaan yang dilakukan sebagai matapencaharian. Mayoritas warga menggeluti sektor perdagangan, usaha eceran, rumah makan serta hotel sebagai matapencaharian. Disamping itu, tenaga kerja laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan.
- c. Pekerja di Sektor Formal :** Dalam kurun waktu 5 tahun, pekerja sektor formal di Kota Yogyakarta mengalami penurunan.
- d. Pekerja di Sektor Informal :** Jumlah pekerja disektor informal pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
- e. Pengangguran :** Dalam rentang waktu lima tahun, jumlah pengangguran menunjukkan tren penurunan. Jumlah terendah ditunjukkan pada tahun 2012, total pengangguran mencapai 17.199 orang. Angka ini lebih rendah dari tahun tahun sebelumnya.
- f. Pengangguran Terbuka :** dalam rentang waktu 5 tahun, pengangguran laki-laki tertinggi terjadi pada tahun 2008, sedangkan penangguran perempuan tertinggi terjadi pada tahun 2009.

- g. Keanggotaan Koperasi** : Terdapat 17 jenis koperasi dengan jumlah keanggotaan mencapai 37.834 orang dan mayoritas anggotanya adalah laki-laki.
- h. Penduduk Kota Yogyakarta Berusia >15 Tahun Yang Bekerja Sebagai Pekerja Keluarga Tidak Dibayar** : Secara keseluruhan jumlah pekerja yang tidak di bayar lebih banyak dialami oleh perempuan dibanding laki-laki.
- i. Perempuan Pekerja Profesional dan di level Manajerial** : Jumlah perempuan yang bekerja di ranah profesional dan teknisi lebih tinggi bila dibandingkan perempuan yang bekerja sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan.
- j. Pekerja menurut lapangan Usaha** :, jumlah pekerja yang bergerak di sektor perdagangan, rumah makan dan hotel menempati posisi tertinggi dibanding sektor lain.
- k. Pekerja menurut status pekerjaan** : jumlah laki-laki dengan status pekerjaan berusaha sendiri, buruh tidak tetap, buruh tetap, pekerjaan bebas non pertanian dan karyawan lebih tinggi dibanding perempuan. Namun, pada pekerjaan yang tidak berbayar jumlah perempuan jauh melampaui laki-laki dalam tahun yang sama.
- l. Pekerja menurut jenis pekerjaan** : Sejak tahun 2009-2012 tenaga profesional lebih didominasi oleh

pekerja laki-laki ketimbang perempuan. Perempuan lebih banyak bekerja di sektor tenaga usaha, jasa dan kondisi teknis lainnya.

4. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

a. Perempuan di Lembaga Eksekutif : Dalam 25 tahun terakhir, tidak ada perempuan yang memegang jabatan sebagai walikota, atau wakilnya. Pada tingkat di bawahnya, hanya satu perempuan yang menjadi camat, yakni Pakualaman. Perbandingan lurah perempuan dan laki-laki sekitar 1:3 atau sekitar 26% dari 45.

b. Rata-rata setiap kecamatan memiliki 16 orang PNS perempuan yang tersebar pada Golongan I, II, III, dan IV.

c. Perempuan di Lembaga Legislatif : Berdasarkan jumlah komisi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta, jumlah perempuan di lembaga legislatif masih minim dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

d. Jumlah Caleg yang ada di 14 kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki perbandingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di Kecamatan Pakualaman menunjukkan jumlah caleg perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki sementara itu kesenjangan besar tampak pada kecamatan Margangsari. Secara umum, di dalam dua periode terakhir Pemilu DPRD, jumlah caleg perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki meskipun

jumlah total caleg selama dua periode tersebut menurun hingga mendekati 40% pada 2014.

- e. **Perempuan di Lembaga Yudikatif** : Jumlah jaksa perempuan lebih banyak ketimbang jaksa laki-laki. Sedangkan secara struktural jumlah perempuan yang memangku jabatan struktural hanya 1 orang dan 10 orang lainnya merupakan fungsional. Sedangkan jumlah hakim lebih didominasi oleh laki-laki, mencapai 60 % .
- f. **Disamping itu, pada lembaga kepolisian**, baik di Mapolres maupun di Mapolsek, jumlah laki-laki yang menduduki jabatan struktural masih mendominasi ketimbang perempuan.

5. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

- a. **Jumlah Lanjut Usia Terlantar** : Jumlah lansia di Kota Yogyakarta tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebanyak 2.303 jiwa. Sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2209 yakni sebanyak 1.546 jiwa.
- b. **Jumlah Pengungsi Akibat Konflik dan Bencana** : Selama lima tahun terakhir tidak ditemukan data pengungsi yang diakibatkan oleh bencana dan konflik di Kota Yogyakarta.
- c. **Perceraian** : Kasus perceraian yang terjadi di Kota Yogyakarta tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan

jumlah total sebanyak 88 kasus, sedangkan kasus terendah terjadi pada tahun 2009 yakni sebanyak 35 kasus.

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- a. Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Korban :**
Angka KDRT di Kota Yogyakarta dalam tiga terakhir dihitung cukup tinggi, yakni 557 kasus. Total perbandingan korban KDRT antara laki-laki dan perempuan adalah 1 : 5.
- b. Kekerasan Menurut Usia :** Usia 25 merupakan usia yang rentan menerima KDRT dalam rumah tangga. Dalam kurun waktu 3 tahun, jumlah korban mencapai angka mencapai 408 atau 73% dari total korban.
- c. Jenis Kekerasan :** Jenis kekerasan yang seringkali terjadi ialah kekerasan psikis, kekerasan fisik serta kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.
- d. Tempat Kejadian :** Pada tahun 2010-2012 tercatat kasus KDRT cenderung terjadi di lingkup privat. Secara kuantitas sebanyak 70 % (440) kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga.
- e. Jenis Pelayanan Yang diberikan :** Jenis pelayanan yang diberikan terhadap korban KDRT, disesuaikan dengan keadaan lembaga yang bersangkutan, kepentingan lembaga, serta metode yang digunakan oleh lembaga yang bersangkutan. Perbedaan metode

dan kepentingan lembaga mempengaruhi jenis layanan yang diberikan kepada korban.

f. Trafficking (Perdagangan Manusia) : Dalam kurun waktu 2 tahun yakni 2011-2012 telah ditemukan 24 kasus *trafficking* di Kota Yogyakarta. Perempuan merupakan kelompok yang rentan dijadikan korban. Rata-rata, korban perdagangan orang terjadi pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Pada tahun 2011, sebanyak 3 orang korban trafficking belum menikah, sedangkan 6 orang lainnya berstatus janda.

7. Tumbuh Kembang, Kelangsungan Hidup, Dan Perlindungan Anak

a. Anak Jalanan : Pada tahun 2012 jumlah anak jalanan laki-laki mengalami penurunan mencapai 45,9 %. Begitu juga yang terjadi pada anak jalanan perempuan, yang mengalami penurunan sebanyak 47 orang dari tahun 2011.

b. Anak Terlantar : Dalam kurun waktu 2 tahun (2010-2011) jumlah anak terlantar di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan, Angka penurunan hampir mencapai 50 %. Penurunan jumlah ini terjadi pada anak terlantar laki-laki maupun perempuan. Bahkan di beberapa kecamatan, jumlah anak terlantar tidak ditemukan sama sekali.

- c. Anak Balita Terlantar** : Angka penurunan juga terjadi pada anak balita terlantar. Dalam kurun waktu 2 tahun (2010-2011), anak balita terlantar mengalami penurunan yang sangat signifikan.
- d. Anak Yang Berumur di Bawah 18 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Lahir** : Kepemilikan akta kelahiran bagi Anak di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tampak dari kepemilikan akta kelahiran mencapai 50 % dari total anak.
- e. Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Ditampung di Panti Asuhan** : Pada tahun 2012 terdapat 13 panti asuhan di Kota Yogyakarta yang dapat menampung sebanyak 554 orang, dengan rincian 319 anak laki-laki dan 235 anak perempuan.
- f. Fasilitas Kesehatan yang Melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kota Yogyakarta** memiliki 18 Puskesmas induk, serta 9 tempat Puskesmas pembantu, 9 rumah sakit umum dan 9 rumah sakit khusus. Sedangkan jumlah klinik mencapai 51 tempat yang dapat diakses oleh para anak berkebutuhan khusus di Kota Yogyakarta.
- g. Jumlah Tenaga Medis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)** : Pada tahun 2012, jumlah tenaga medis yang dikhususkan bagi ABK sebanyak 1 dokter

laki-laki dan 1 dokter perempuan yang menangani masalah anak. Sedangkan dokter rehab medis berjumlah 1 orang, psikolog berjumlah 11 orang perempuan.

h. Jumlah SLB Negeri dan Swasta : Jumlah SLB (Sekolah Luar Biasa) negeri dengan jenjang TK hingga SMA sebanyak 12 tempat. Sedangkan jumlah SLB swasta mencaai 17 tempat.

i. Jumlah Guru Negeri dan Swasta di SLB : Jumlah guru di SLB pada setiap jenjang di tahun 2012 didominasi oleh perempuan ketimbang laki-laki.

j. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum : Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Yogyakarta mengalami perubahan yang signifikan. Anak dengan kategori usia 13-17 tahun paling banyak berhadapan dengan hukum. Jumlah tertinggi ABH pada kategori ini terjadi pada tahun 2008.

k. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Tingkat Pendidikan : Anak yang berhadapan dengan hukum rata-rata berada pada jenjang SMP. Hal ini disebabkan oleh masa transisi remaja pada kategori usia tersebut, hingga menyebabkan anak rentan berhadapan dengan masalah-masalah hukum.

l. Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum: Tindak kejahatan pencurian oleh anak-anak menduduki jumlah tertinggi bila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

m. Data Tumbuh Kembang Anak Tentang Jumlah Lembaga Pendidikan Bagi Anak : Jumlah PAUD formal dan nonformal di Kota Yogyakarta adalah 927 sedangkan jumlah peserta didik mencapai 30.290 orang atau sekitar 85 %. Sedangkan yang belum terlayani ialah sebanyak 5.364 anak.

8. Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)

a. Peraturan Daerah dan Kebijakan/ Program/ Kegiatan responsif gender

Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender pada tahun 2008 hanya tercatat satu, namun di tahun 2009 tercatat terdapat 18 aturan, kemudian tahun 2010 sejumlah 10, tahun 2011 sebanyak 7 buah dan tahun 2012 bertambah satu.

b. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/ Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan

Berkaitan dengan Perda dan kebijakan/program/kegiatan tentang perlindungan perempuan, Pemerintah kota memiliki satu aturan yang dikeluarkan pada tahun 2007.

9. Kelembagaan PUHA

Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak

Selama lima tahun terakhir Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan sebanyak 55 Peraturan/ kebijakan/program/kegiatan yang peduli anak, masing-masing tahun 2008 sebanyak 6 buah, 2009 sebanyak 21 buah, 2010 sebanyak 8 buah, 2011 sebanyak 16 buah dan 2012 sebanyak 3 buah.

BAB XII

REKOMENDASI

12.1 Rekomendasi Umum

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun kebijakan bagi tersedianya data pembangunan dan pemerintahan secara terpilah, hingga tingkat desa dan kecamatan pada semua aspek pembangunan. Kebijakan ini dapat dikembangkan melalui penegasan tugas pokok dan fungsi di masing-masing satuan kerja Kota Yogyakarta dalam proses tersedianya data dan informasi gender dan anak.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menjadikan dokumen Profil Gender & Anak tahun 2008-2012 sebagai bagian yang melekat dalam dokumen kebijakan perencanaan program pembangunan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang di tingkat kota. Khususnya bagi *mainstreaming* PUG & PUHA di segala bidang dengan melibatkan lintas sektor dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta.

12.2 Rekomendasi Khusus

1. Bidang Kesehatan

- a) Angka Harapan Hidup penduduk perempuan lebih tinggi di banding laki-laki tahun 2008-2009. Meskipun data terkini belum diketahui namun gambaran AHH di tahun tersebut penting untuk dijaga oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Kenaikan angka harapan hidup bermakna pada peningkatan derajat kesehatan perempuan yang dipengaruhi oleh semakin meningkatkannya kesadaran, pengetahuan, infrastruktur, layanan dan kebijakan di bidang kesehatan. Tingginya AHH juga berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi kelompok lansia perempuan. Angka Harapan Hidup yang tinggi harus diantisipasi dengan layanan kesehatan yang memadai sehingga kualitas hidup perempuan meningkat.

- b) Terdapat tujuh (7) kasus kematian ibu dari 4.660 kelahiran hidup. Jumlah ini kurang dari 0,1% dari total kelahiran. Meskipun terhitung kecil, kematian ibu melahirkan tidak semestinya terjadi seandainya seluruh ibu hamil mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Untuk menekan jumlah kematian ibu, penting melakukan antisipasi seperti

promosi untuk mencegah Tiga terlambat dan Empat terlalu, utamanya bagi kecamatan rentan yang berkategori miskin dan tertinggal. Selain itu, penting untuk melakukan peningkatan gerakan sayang ibu, Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, memaksimalkan pokja GSIB dan Satgas GSIB di tingkat desa.

- c) Capaian K4 masih di bawah target standar nasional sebesar 95%. Dukungan para medis, bidan dan dokter di setiap kecamatan/desa akan sangat efektif untuk meningkatkan angka kunjungan ibu hamil di posyandu & Puskesmas secara berkala terutama untuk tiga kecamatan dengan pencapaian K4 terendah, yakni Danurejan (57.710%), Kotagede (54.86 %) dan Umbulharjo (65.13 %).
- d) Kurang optimalnya serapan tablet Fe bagi ibu hamil di Kota Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian khusus oleh dinas terkait terutama Dinas Kesehatan, sebagai bentuk antisipasi pencegahan kematian Ibu yang diakibatkan oleh anemia. Program dan upaya peningkatan serapan tablet Fe perlu di lakukan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- e) Terkait dengan cakupan pertolongan persalinan, penting untuk terus dipertahankan prosentase

maksimum dari jumlah kelahiran yang sepenuhnya ditangani oleh tenaga profesional.

- f) Jumlah perempuan pengidap HIV AIDS jauh lebih rendah di banding laki-laki, namun, patut untuk diwaspadai supaya pergerakannya tidak meningkat di tahun berikutnya. Salah satu pilihan strategis yang dapat dilakukan adalah memberdayakan kaum perempuan dalam penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Hal ini bisa ditempuh dengan peningkatan pengetahuan, pemahaman, peran serta, baik secara individu maupun melalui organisasi perempuan dalam bentuk penyuluhan, motivasi dan bimbingan serta penyebarluasan komunikasi, informasi edukasi (KIE)
- g) Dominasi perempuan dalam program KB sangat tinggi. Untuk meningkatkan kebersertaan laki-laki dalam program KB, maka pemahaman mengenai aspek gender menjadi sangat penting. Terutama dalam merancang program dan kegiatan yang selalu memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara seimbang (responsif gender) sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa diabaikan kebutuhannya, baik dalam informasi maupun pelayanan. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang responsif gender tersebut meliputi: 1) Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dirancang untuk

meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan mengubah perilaku dalam praktek KB dan kesehatan reproduksi yang memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki secara seimbang. 2) Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, yaitu pelayanan Komunikasi interpersonal (KIP)/Konseling dan pelayanan medis berkaitan dengan KB dan kesehatan reproduksi. Dengan pelayanan yang responsif gender ini perempuan dan laki-laki dapat: Mengakses informasi dan pelayanan, berpartisipasi dalam KB dan kesehatan reproduksi, memperoleh manfaat yang sama, adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan tentang KB dan kesehatan reproduksi.

- h)* Tahun 2010 dan 2011 ditemukan 55 kasus perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2010 terdapat 47 kasus, sementara pada tahun 2011 pernikahan usia dini turun dalam jumlah cukup banyak, yakni hanya 8 kasus atau turun sebesar 83%. Untuk terus menekan angka pernikahan di bawah umur, maka perlu program-program yang terkait dengan pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana. Misalnya melalui promosi dan pendidikan reproduksi bagi remaja, hukum perkawinan, pendidikan agama dan lain-lain di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, khususnya bagi remaja.

2. Bidang Pendidikan

- a) APK perempuan pada tingkat PAUD, TK dan SMA lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun pada tingkat SD dan SMP APK laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga lebih mengutamakan pendidikan untuk anak laki-laki pada level yang lebih tinggi. Diperlukan strategi program untuk mengkampanyekan pendidikan untuk semua (*education for all*) melalui pertemuan PKK, RT atau pertemuan lainnya, hingga tingkat kabupaten. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pendidikan tinggi bagi anak perempuan di tingkat keluarga.

- b) Masih adanya kesenjangan gender dalam Angka Partisipasi Kasar, maka diperlukan program melekat teknologi khususnya pada siswi perempuan. Selain itu, akses, kontrol dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan atau sekolah perlu ditingkatkan, khususnya pada sekolah kejuruan/teknologi perlu dijadikan prioritas program. Selain itu, perlu promosi *affirmative action* dibidang pendidikan untuk meningkatkan angka partisipasi perempuan pada level pendidikan tinggi.

3. Angka putus sekolah yang dialami laki-laki lebih besar jika dibanding perempuan. Angka Putus Sekolah yang tinggi disebabkan oleh faktor ekonomi dan persepsi. Salah satu upaya mengurangi kasus tersebut dengan penambahan dana BOS pada level SMA/SLTA dan beasiswa pada siswa berprestasi dan kurang mampu.

4. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- a) Tingkat Partisipasi Perempuan Angkatan Kerja perempuan lebih rendah dari laki-laki. Diperlukan sosialisasi secara terus menerus kesetaraan gender baik di ranah privat dan publik (dunia kerja). Pada saat yang bersamaan program untuk meningkatkan kualitas SDM perempuan juga harus dilakukan melalui berbagai pelatihan, pendidikan dan peningkatan ketrampilan.
- b) Untuk mengatasi angka pengangguran di Kota Yogyakarta, terutama di kecamatan-kecamatan rawan diperlukan berbagai program stimulus baik untuk laki-laki maupun perempuan seperti misalnya program pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, serta program peningkatan akses dan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja.
- c) Keanggotaan koperasi lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Diperlukan strategi peningkatan akses dan

partisipasi perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan permodalan dalam bentuk lembaga keuangan mikro dan koperasi sebagai sarana untuk memberdayakan perempuan sekaligus strategi mengurangi kemiskinan di kalangan perempuan.

- d) Masih ditemukannya Pekerja Tak Dibayar, terutama dialami oleh pekerja perempuan. Salah satu faktornya adalah manajemen usaha yang bersifat konvensional, tidak ada pemilahan keuangan keluarga dan usaha. Diperlukan penyuluhan manajemen usaha dan pelatihan manajemen usaha khususnya untuk mendorong produk produk lokal Kota Yogyakarta.

5. Bidang Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif masih rendah dibanding Lembaga Eksekutif, demikian juga Lembaga Yudikatif. Bahkan untuk camat dan lurah hampir seluruhnya didominasi oleh laki-laki. Diperlukan program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kapasitas *leadership* perempuan. Disamping itu diperlukan kampanye di kalangan masyarakat untuk memilih pemimpin yang lebih peka gender.

6. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

a) Diperlukan program untuk Paguyuban Lansia dimana Lansia mendapatkan ketrampilan untuk menunjang hidupnya. Lansia produktif perlu diberi bantuan modal sesuai keahliannya dengan syarat syarat khusus dan mudah. Sedangkan Lansia yang tidak produktif perlu diberikan jaminan hidup layak.

b) Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan

Korban KDRT tertinggi pada umumnya adalah perempuan berusia di atas 25 tahun. Pelaku hampir semuanya adalah orang terdekat korban, bukan orang yang tidak dikenal. Diperlukan program untuk mensosialisasikan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu korban kekerasan perlu advokasi baik secara hukum, rehabilitasi, trauma healing, jaminan keamanan ataupun jaminan keberlangsungan hidup dan masa depan korban dari pihak SKPD terkait dan lintas sektor. Program Keluarga Sehat dan Bebas dari Kekerasan perlu disosialisasikan secara berjenjang sampai tingkat desa. Promosi tentang gerakan anti kekerasan terhadap perempuan juga perlu dilakukan melalui strategi perumusan sistem pelayanan terpadu berbasis

masyarakat dan korban, dengan melibatkan berbagai pihak dan organisasi yang ada di masyarakat.

7. Data Anak: Tumbuh Kembang, Kelangsungan Hidup, dan Perlindungan

- a) Anak Jalanan kebanyakan adalah produk anak-anak putus sekolah, pengaruh lingkungan yang kurang baik, dan kurangnya perhatian dari keluarga. Diperlukan program pembinaan mental dan karakter pada anak jalanan. Sebaiknya tidak ada razia, tetapi dilakukan pendekatan berbasis masyarakat. Yang berasal dari Kota Yogyakarta akan mendapatkan pembinaan dan disekolahkan, sedang yang berasal dari luar dikembalikan ke keluarga dari daerahnya. Jika tidak punya keluarga akan dikirim ke Panti Sosial.

- b) Masih ditemukan sebanyak 5.096 anak yang belum memiliki akta kelahiran. Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota karena pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam pelaksanaannya serendah-rendahnya dilaksanakan oleh kelurahan/desa.

8. Data Kelembagaan: Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kelembagaan

Melihat minimnya ketersediaan Data Kelembagaan PUG dan PUHA, maka perlu program optimalisasi fungsi dan peran pendataan POKJA PUG dan PUHA dalam meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak, melalui data terpilah gender di semua data yang tersedia di Kota Yogyakarta. Data kelembagaan bidang kesehatan (kelompok suami antar jaga, desa siaga, Kader Bina Keluarga Balita), Bidang ekonomi (koperasi wanita), *focal point gender* (pokja PUG) belum tersedia. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah optimalisasi peran laki-laki dalam semua struktur kelembagaan PUG dan PUHA secara setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Chusniyati, Tatik. 2008. Forum : Upaya Menangani Anak Jalanan. Media Indonesia : Selasa, 29 Juli 2008. Halaman 25.
- B. Jauchar.2008. Local Government Approaches to Solve Beggar in Samarinda (No. 16 year 2002 Samarinda City Rules Implementations) Spirit Publik Volume 4, Nomor 2 Oktober 2008 Halaman: 153 - 168
- Ekarini, Sri MB. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Selo, Kabupaten Boyolali*. Diakses dari www.google.com. Diakses tanggal 10 Agustus 2012
- Fatimaningsih, Endry.2008. *Analisis Situasi dan Kondisi Perempuan Dalam Perspektif Gender di Kabupaten Lampung Tengah*. Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, UNILA Tahun 2008 hal. 74-81
- Hasbianto, Elli N. 1996. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan". Makalah pada seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan kekerasan seksual. Yogyakarta, 6 November 1996.

International Labour Organization. 2012. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2011 (Mempromosikan Pertumbuhan Lapangan Kerja di Tingkat Provinsi)*. Jakarta : Kantor Perburuhan ILO.

International Labour Organization. 2013. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2012 (Upaya Untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan)*. Jakarta : Kantor Perburuhan ILO.

Rob, dkk. 1999. *Men's in Bangladesh, India, and Pakistan Reproductive Health Issues*. Dhaka, Bangladesh: Karshat Publisher

Twikromo, Y. Argo. 1999. *Pemulung Jalanan : Konstruksi Marginalitas Dan Perjuangan Hidup Dalam Bayang-bayang Budaya Dominan*. Yogyakarta: Media Pressindo

www.google.com/fahdisjro.blogspot.com diakses pada 4 November 2013

TIM PENULIS

Ninik Sri Rahayu SE, MM

Dosen Tetap Program Diploma III Fak. Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ketua Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia Periode 2010-2014 dan alumnus Pascasarjana Magister Manajemen FE UII.

Amin Nurrahmah, S.Pd

Peneliti di Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia dan alumnus Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta dan sedang menempuh program Magister Geografi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Ika Pasca Himawati, S.Pd, MA

Peneliti di Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia dan alumnus Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Abdul Rohman, M.Si, MA

Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi Fak. Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Peneliti di Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia dan alumnus Magister Administrasi Publik, Florida State University, USA

EDITOR

Masduki, M.Si, MA

Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi Fak. Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fasilitator Pelatihan Peliputan Isu Gender dan Kesehatan Reproduksi untuk Jurnalis di LP3Y dan alumnus Magister Kajian Jurnalistik di The Ateneo De Manila University, Philippines



**KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
KOTA YOGYAKARTA**

ISBN 978-602-14066-6-3



9 786021 406663